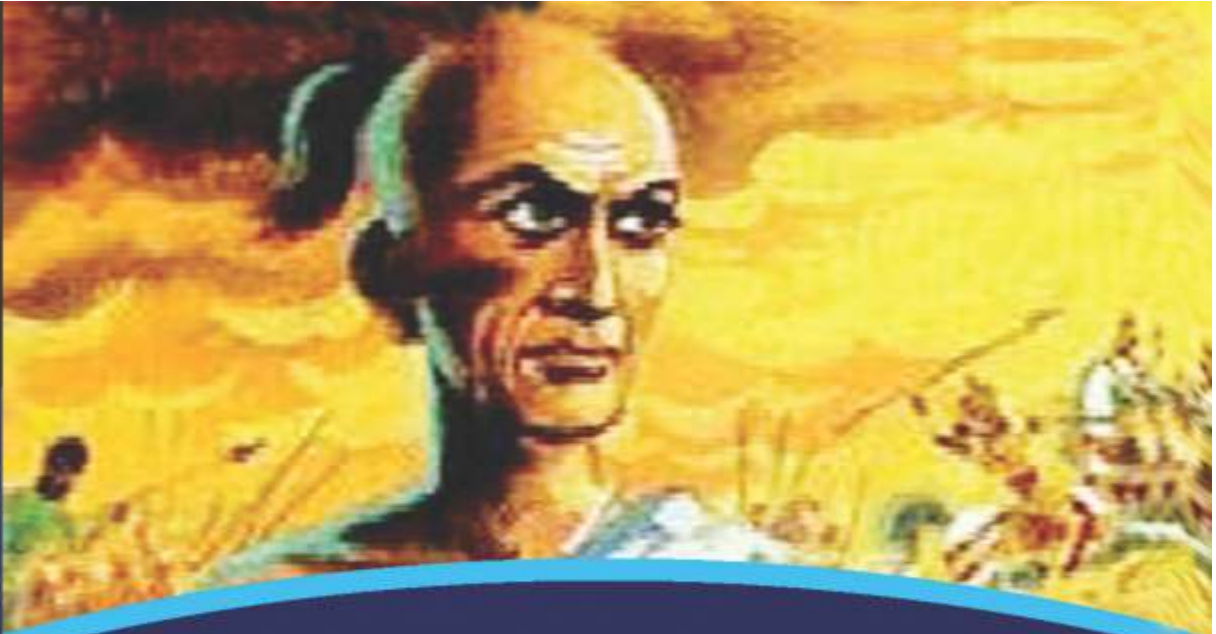


N. Yoga Segara
Kautilya Arthashastra
Jejak Pemikiran Politik Hindu



Kautilya Arthashastra

Jejak Pemikiran Politik Hindu

N. Yoga Segara

[ESBE]

Kata Pengantar :
Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, MSi.
Guru Besar Sastra Hindu, Universitas Hindu Indonesia



KAUTILYA ARTHASASTRA

Jejak Pemikiran Politik Hindu

Kautilya Arthashastra

Jejak Pemikiran Politik Hindu

N. Yoga Segara

Kata Pengantar :

Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si.

Guru Besar Sastra Hindu, Universitas Hindu Indonesia





KAUTILYA ARTHASASTRA

Jejak Pemikiran Politik Hindu

I Nyoman Yoga Segara

Cover Design : M. Setia

Lay Out : N. Bakti

Cetakan : I Desember 2019

ISBN : 978-602-6740-47-2

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Penerbit : CV. Setia Bakti

Jl. Padma 30 Penatih Denpasar Timur

esbeutama@yahoo.com

Isi di luar tanggung jawab percetakan

PT. Mabhakti

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si.

Guru Besar Sastra Hindu, Universitas Hindu Indonesia

Kehadiran buku ini patut disambut suka cita selain karena isinya yang kaya dengan perspektif baru tinimbang buku sejenis, kehadirannya juga akan memperkaya khasanah literatur Hindu. Temanya juga tak tanggung-tanggung: politik Hindu. Sebagaimana diakui sendiri oleh penulisnya, buku ini tidak sepenuhnya membahas Kautilya dan Arthashastra, tetapi bagaimana kedua subjek ini memberikan ide untuk memperbesar spektrum kita tentang pemikiran seorang tokoh besar dalam kitab yang disusunnya. Dan penulis cukup berhasil mengelaborasi lalu menyoroti pikiran sang maharsi yang sangat luas dan kompleks itu, sehingga tulisannya merembesi banyak kanal perspektif. Tak lupa, komparasi pemikiran antartokoh menjadi cara yang cerdas penulis untuk memberikan *insight* lain kepada pembaca. Meskipun cara ini juga rentan menjadi simplitis, namun sepanjang perbandingan itu memiliki titik temu yang justru memperkuat argumentasi tokoh yang dikaji, tetaplah sah.

Selain telah dilakukan penelusuran literatur hingga ke Leiden University saat mengikuti *post-doctoral*, sebagian besar isi buku ini oleh penulis telah pula dipublikasikan ke dalam jurnal dan orasi ilmiah. Harapannya, pembaca atau pendengar sudah mengujinya sendiri. Cara ini menjadi penting dalam dunia

akademik agar kebaruan sebuah buku terus hidup dan terpelihara, selain materi buku yang diambil dari kitab suci ini juga terus dan akan hidup sepanjang jaman. Bukan saja karena ditulis oleh seorang maharsi, tetapi juga isinya yang selalu relevan dengan detak jantung kehidupan, dari dulu hingga kini. Tampaknya isi kitab Arthasastra mengandung nilai-nilai perenialisme, sekaligus bersifat preskriptif, dan normatif, khas kitab-kitab suci yang dituliskan ribuan tahun silam.

Menjadi menarik dan layak ditunggu apakah proyeksi penulis bahwa ajaran Kautilya yang beberapa teksnya dalam Arthasastra dianggap ideal akan dapat diaktualisasikan meski dengan cara yang bisa saja berbeda, sesuai kemauan jaman. Aktualisasi itu memang tak harus serupa dengan apa yang dipikirkan Kautilya di masa lalu yang hampir semuanya baik-baik saja. Hal ini karena kontekstualisasi pemikiran memang tidak selalu diametral dengan teks, namun keduanya sangat mungkin berlangsung dialektis, berjalan bolak balik. Karena itu, saat penulis memberanikan diri menyatakan bahwa Arthasastra dapat saja digunakan oleh para pegawai disebuah pemerintahan, perusahaan swasta atau organisasi modern bukan dimaksudkan untuk mengecilkan posisi Arthasastra. Sebaliknya, untuk kepentingan bagaimana Arthasastra terus dapat menjadi buku manual bagi umat Hindu, utamanya dalam bidang politik dan kekuasaan. Proyeksi penulis seperti ini harus mendapat kredit tersendiri karena Arthasastra sejak semula dianggap sebagai kitab multiperspektif. Kautilya sendiri adalah glorifikasi dari banyak tokoh. Sekali lagi, sebagai kitab yang *prescriptive*, Arthasastra akan terus menemani manusia dalam ceruk jaman yang terus berubah. Jika tidak karena isinya yang *normative*, kitab ini sudah lama ditinggalkan. Pun, tidak akan ada buku Niti Sastra hingga kakawin Niti Sastra yang dengan indah dapat dinyanyikan di segala waktu. Konsep-konsep kepemimpinan Hindu yang lainnya juga tidak akan kita pelajari seperti sekarang.

“Keberanian” penulis untuk mengatakan bahwa Kautilya Arthashastra merefleksikan politik Hindu, lebih-lebih berdimensi filosofis, tetap harus diuji dengan mendiskusikan celah kosong yang alfa diisinya. Termasuk mengkritik proyeksi penulis bahwa kitab ini dapat diarahkan sebagai panduan bagi siapa saja yang memiliki otoritas memimpin. Berbeda dengan ilmu politik modern, terutama di Barat, Arthashastra agak rentan untuk dijustifikasi secara monolitik karena selain ruang lingkungannya sangat luas, juga didominasi aspek moral dan spiritual, seperti kebanyakan karya seorang maharsi. Adagium bahwa yang ideal (yang suci, yang sakral) tidak serta merta dapat segera menjadi aktual (yang profan, yang sekuler) adalah tantangan tersendiri dari penulis, dan bagi kita semua. Namun sekurang-kurangnya usaha ke arah itu telah dirintis, bukan hanya oleh penulis seorang.

“Kekayaan” lain dari buku ini adalah penjelajahan penulis untuk meyakinkan bahwa kitab Arthashastra memang adalah salah satu kitab politik, selain menjadi kitab ekonomi, ilmu pemerintahan, ketatanegaraan, admistrasi, dlsb. Meskipun kita semua juga memiliki keyakinan yang sama, tampaknya penulis memerlukan amunisi lain karena anggapan umum itu dirasakannya masih samar, remang-remang, dan dipenuhi keraguan. Penolakan pertama penulis, tepatnya meminta untuk didiskusikan lagi adalah kesimpulan sederhana banyak orang bahwa Kautilya itu sama persis dengan Nicollo Machiavelli, bahkan Machiavelli didaulat sebagai Kautilya dari Timur. Untuk penjernihan ini, penulis sudah tepat menyediakan satu bab khusus untuk membahas dua tokoh besar ini. Tidak berhenti pada Machiavelli, penulis juga ingin meyakinkan dengan menyelami pemikiran politik dan kekuasaan, terutama tema kontrak sosial dari Thomas Hobbes, terutama dari buku spektakulernya, *Leviathan*. Komparasi seperti ini tentu saja tidak pernah cukup memuaskan. Namun apa yang dilakukan penulis dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya. Boleh jadi, dengan cara seperti ini penulis ingin memberikan pola untuk melakukan kajian serupa.

Agar mewakili pemikiran Timur, penulis juga berusaha keras mendalami kebudayaan Jawa yang pernah mendapat pengaruh langsung dan begitu dekat dengan Hindu, terutama saat beberapa kerajaan Hindu berkuasa penuh di tanah *jambudwipa*. Usaha ini pun harus dihargai sebagai cara penulis untuk merefleksikan politik Hindu dengan adab keindonesiaan. Jawa dipilih mungkin karena telah menjadi sumbu awal saat pijar-pijar kejayaan Hindu ditiupkan hingga menyebar ke seluruh nusantara. Selain kerajaan Hindu yang silih berganti mewarnai Jawa, juga kesusasteraan melalui teks dan prasasti banyak lahir bukan saja memengaruhi perjalanan agama Hindu di Jawa tetapi juga Indonesia. Kitab *Nagarakretagama* dan *Pararaton* yang menjadi rujukan tentang kehebatan pengaruh Hindu lahir dari rahim kebudayaan Jawa. Kesusasteraan yang lain, misalnya Mpu Tantular melalui kakawin *Sutasoma* telah menjadi inspirasi para pendiri bangsa untuk menjelaskan bahwa sejak lama Indonesia itu majemuk. *Sesanti Bhinneka Tunggal Ika* lalu dicengkeram kuat-kuat oleh kaki burung Garuda, simbol negara yang juga “sangat Hindu”. Dan ini semua bukan tentang sebuah nostalgia ke masa lalu belaka.

Terakhir, sebagai karya akademik, buku ini dapat menjadi referensi terutama mereka yang ingin mendalami politik Hindu pada umumnya. Lepas dari kekurangan yang ditinggalkan, buku ini tetap memiliki kredit karena kegigihan penulis yang sejak 2012 membaca jejak pemikiran politik Hindu melalui kitab *Arthasastra*. Tentu tidak mudah, sekaligus pasti melelahkan. Namun semua itu terbayar lunas, bukan hanya karena berhasil diterbitkan, tetapi karena buku ini layak dibaca, bukan saja oleh para dosen, peneliti, dan akademisi lainnya, tetapi juga umat Hindu pada umumnya. Selamat membaca, semoga jejak pemikiran politik Hindu menjadi lebih terang dengan buku ini.

Tembau, 10 Nopember 2019

PRAKATA

Naskah buku ini sebenarnya sudah lama selesai, tepatnya pada 2014, namun dalam waktu panjang itu belum juga diterbitkan. Bukan apa-apa. Pemikiran Kautilya sudah banyak dibicarakan dalam berbagai forum, juga ditulis dan diinterpretasi. Bagi saya, kitab ini sudah tidak lagi orisinal. Satu-satunya yang membedakan buku ini dengan buku sejenis adalah keberanian saya merefleksikan pemikiran Kautilya dan Arthashastra dengan ilmu yang saya gemari selama ini, yaitu filsafat dan antropologi, terutama saat membaca filsafat politik dan antropologi kekuasaan. Pendekatan ini tentu juga tak mudah. Perlu tarikan dialektis antara apa yang dipikirkan Kautilya dalam teks dengan tindakan manusia secara kontekstual.

Kehati-hatian, namun sekaligus penyemangat saya menerbitkan buku ini karena secara *mainstream*, Kautilya Arthashastra “hanya” dianggap sebagai kitab ekonomi atau sebatas ilmu pemerintahan. Yang lain mengatakan sebagai kitab untuk pemimpin. Semua anggapan itu tidak salah tentu saja, karena di dalam kitab ini banyak ditemukan konsep dan strategi pengelolaan ekonomi, mengatur administrasi pemerintahan, dan juga pesan-pesan penting kepada penguasa. Namun bagi saya, kitab ini jika diibaratkan sajian prasmanan, penuh dengan ragam makanan. Karena itu, Arthashastra sudah benar tidak dibaca mono-perspektif, karena kitab ini mengemaskan ilmu tentang negara, etika dan moralitas, administrasi, manajemen hingga

politik. Saya hanya mendekatinya dari filsafat politik dan antropologi kekuasaan untuk menelusuri jejak-jejak pemikiran politik Hindu di dalamnya. Setidaknya ada tiga kata kunci dalam buku ini yang sejak awal perlu saya sampaikan.

Pertama, buku ini bukanlah buku yang secara khusus menjelaskan ilmu politik Hindu, tema yang dapat kita baca dalam banyak literatur politik, atau kita dengar dari ilmuwan politik. Politik Hindu yang sampai hari ini belum jelas pola dan strukturnya masih mengikuti arus disiplin ilmu politik pada umumnya. Mengikuti ilmu politik di Barat, tentu tidak tabu. Ini adalah pekerjaan yang belum tuntas dari para ilmuwan Hindu yang bergerak dalam disiplin politik. Artinya secara epistemologi, politik Hindu berintersepsi dengan pengertian politik yang kita kenal secara umum. Dan cara ini tentu juga tidak keliru, apalagi mempersoalkannya. Jika perilaku manusia atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk membangun interaksi menjadi basis ilmu politik, maka pernyataan itu sama saja dengan apa yang dikatakan Kautilya dalam Arthashastra. Namun, sedikit berbeda dengan Barat, Kautilya Arthashastra—jika kita menyepakatinya sebagai politik Hindu—sejak awal menawarkan aspek etika dan moral dalam setiap pembahasan mengenai politik, terkhusus untuk penguasa dan kepemimpinan pada umumnya. Karena itu, bicara politik Hindu, itu artinya kita membicarakan kepemimpinan Hindu yang tercerap ke dalam banyak kitab suci, tidak saja Arthashastra karena beberapa pernyataan politik juga ditemukan dalam Kitab Weda Sruti dan Weda Smrti.

Kedua, tentang Kautilya. Ada banyak nama lain yang juga dikenal luas, dua diantaranya Canakya dan Wisnugupta. Ketiga nama ini sebenarnya merujuk pada satu nama yang sama, dan secara konsisten dalam buku ini hanya akan disebut Kautilya saja. Sebagai penulis, saya tidak akan memperdebatkan kembali perbedaan ketiga nama tokoh, mengingat sulitnya menemukan

referensi yang akurat, terutama sejarah hidup dan jejak pemikirannya. Namun berdasarkan simpulan beberapa ahli yang khusus menulis politik Hindu, ketiga nama tersebut diyakini sama. Dalam tradisi India, kadang nama seorang tokoh tidak serta merta menunjuk nama orang, bahkan nama kelompok atau komunitas menjadi lebih terkenal tinimbang nama aslinya. Misalnya, banyak yang menduga nama Wyasa bukanlah nama untuk seseorang, tetapi sekelompok maharsi yang bertugas mengkodifikasi Weda. Kata Wyasa dalam bahasa Sanskerta diartikan sebagai penghimpun. Dugaan seperti ini perlu mendapat kajian, mengingat masih banyak nama tokoh lainnya memiliki keserupaan dengan nama seperti Wyasa. Lebih-lebih di masa lalu, terutama para mahakawi, sering mereka tidak menuliskan namanya (anonim). Jika pun ditemukan nama pengarang, umumnya juga menggunakan nama samaran. Misalnya, Mpu Tanakung yang mengarang Lubdaka diyakini samaran dari seseorang yang mengaku “tidak memiliki lagi cinta dan asmara”.

Ketiga, Arthasastra. Kitab ini juga dianggap sama dengan Niti Sastra, meskipun keduanya juga bisa berbeda, tetapi para ahli menyebutnya sama saja. Malah yang terkenal adalah Canakya Niti Sastra. Secara tradisional, Arthasastra diartikan sebagai kitab politik atau ilmu pemerintahan. Kitab ini digolongkan sebagai Upaweda, yang secara harafiah berarti kitab yang dekat dengan Weda. Tiga kitab lain Upaweda adalah Ayurweda, Dhanurweda, dan Gandharwaweda. Niti Sastra, oleh umat Hindu di Indonesia lebih dekat sebagai ilmu tentang kepemimpinan. Masyarakat Bali, misalnya juga sudah lama mengenal Niti Sastra sebagai kakawin yang dinyanyikan setiap waktu karena tidak terikat oleh jenis upacara yadnya. Jangan lupa, di Jawa pada masa kerajaan dan kesusasteraan tumbuh, terdapat kitab Panitisastra yang juga mengajarkan sikap hidup yang etis. Jika di India, dan di dunia pada umumnya, Arthasastra

lebih dipahami sebagai kitab politik, ekonomi, administrasi hingga ilmu pemerintahan, maka di Bali, aspek moralitas dari kitab ini adalah Niti Sastra, sehingga ia juga menjadi buku etika. Namun, baik Arthasastra dan Niti Sastra pada dasarnya menjadi pedoman bagi pemimpin, bahkan pemimpin dalam bidang pekerjaan apa saja.

Dengan demikian, Kautilya Arthasastra menjadi menarik tidak saja dibincangkan tetapi juga dipraktikkan; tidak saja menjadi teori tetapi juga praktis. Dan biasanya, politik menjadi makin menarik, jika berkelindan dengan momentum politik, seperti di Indonesia dengan pilpres, pileg, pilkada, dan kini bahkan pada pemilihan kepala dusun di kampung-kampung. Fakta ini menjadi lumrah manakala terdapat kontestasi yang berkenaan dengan emosi keagamaan dan afiliasi politik. Mempraktikkan kembali Arthasastra sama persis seperti Kautilya melakukannya seperti pada masa Candragupta, tentu saja agak muskil, karena *pertama*, teks kitab ini relatif tua, malah sangat tua jika mengandaikannya masa kini sama dengan masa ketika Kautilya menuliskannya. Ada lompatan yang terlalu jauh, sekaligus naif jika apa yang dipikirkan secara ideal dan kompleks dalam Arthasastra dapat diimitasi secara sederhana. Karena itu, konteks menjadi sangat penting untuk menangkap apa yang diinginkan Kautilya. *Kedua*, dan sudah diterangkan di atas, Arthasastra untuk masa kini terlalu ideal, kalau tidak menyebutnya utopis, serta mengandung konsep yang terlalu kompleks untuk ukuran jaman post-modern yang meminta sebaliknya: sederhana, mudah, cepat, dan murah. Tepatnya menuntut semacam spesialisasi. *Ketiga*, cara paling mudahnya adalah menjadikan Arthasastra sebagai *self reminder* yang dimulai dari diri sendiri, karena saat ini manusia juga berada dalam jebakan kesendirian. Agak sulit memaksakan sebuah ajaran, seideal apapun itu untuk dilakukan secara massif. Harapan ini bisa sama seperti konsep Ahimsa yang bukan saja

berhasil merasuki alam pikir orang India secara kolektif, tetapi juga sukses dimodifikasi menjadi sebuah gerakan oleh Mahatma Gandhi. Sekali lagi, ajaran Arthashastra bisa dimulai dari diri sendiri, lalu menular pada kelompok yang lebih besar.

Selain ketiga alasan itu, dunia yang dibayangkan dalam Arthashastra sangat mungkin kini terbagi-bagi ke dalam banyak subordinat. Misalnya, tentang manajemen dan administrasi bisa saja menjadi panduan bagi para pegawai atau karyawan di dalam organisasi atau perusahaan dalam mengerjakan tugas-tugas kepegawaian, HRD, manajer, dlsb. Strategi perang Kautilya dalam menghadapi musuhnya yang dahulu bahkan sukses melawan The Alexander Agung, kini bertransformasi pada perang dagang, bisnis dunia maya hingga *proxy war*. Atau, bagaimana ajaran Kautilya tentang seorang pemimpin yang harus memiliki kesanggupan untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat banyak dapat dipraktikkan mulai dari tingkat bawah, di kampung, pedesaan, kelurahan hingga ke level makro, propinsi dan negara misalnya. Begitu juga ajaran hidup seorang pemimpin yang justru merasa bahagia jika melihat rakyatnya bahagia dengan hidup bersama rakyatnya, bahkan di gubuk reyot sekalipun, adalah cara pemimpin merasakan bau keringat rakyat yang dipimpinnya. Bukan sebaliknya, melihat kebahagiaan rakyatnya melalui jendela istana yang mewah. Artinya pemimpin itu turun ke bawah, bersama rakyatnya menjadi pelayan.

Yang paling serius, dalam kaitannya dengan politik praktis, secara khusus untuk konteks Indonesia, ajaran Kautilya tentang *swamin* yang kini nyaris mulai hilang tampaknya menjadi sesuatu yang bukan saja perlu tetapi sangat penting dihidupkan lagi. Jika dahulu seorang raja didampingi *purohita*, dan Kautilya sendiri malah menjadi perdana menteri sekaligus penasehat raja, kini peran itu mulai hilang. Tak ada penasehat, apalagi *purohita*. Politik dan politisi sering mengalami

disorientasi. Tak salah, khusus peran ini, Kautilya dapat disamakan dengan pikiran Plato tentang *The Philosopher King*. Para pemimpin kita, tepatnya juga politikus lebih banyak ditemani konsultan politik yang mengorientasikan kekuasaan sebagai target tunggal. Sedangkan Kautilya mengajarkan banyak hal kepada Candragupta agar siap menjadi pemimpin besar. Mungkin, jika Kautilya hidup hari ini, ia yang dengan rambut terkuncir dan senyum tipisnya kira-kira akan berujar: *“tidak bisalah anda menjadi pemimpin hebat jika hanya bermodal kecantikan atau ketampanan, uang melimpah, ketenaran dan hasil survei bernama elektabilitas semata”!*

Melalui penelidikan berbagai hal yang berkenaan dengan Kautilya, Arthashastra, politik dan kekuasaan ini, saya berkesempatan untuk menemukan titik temu pemikiran antara Kautilya dengan tokoh besar lainnya, seperti Machiavelli, Hobbes, dan inspirasi apa yang kita dapatkan dari sosok Gajah Mada misalnya. Oleh karena itu, saya juga harus bergerak menyemai pemikiran Kautilya yang tertanam ke dalam konsep kekuasaan, politik dan negara, terutama pada masa kerajaan Hindu khususnya di Jawa. Tentu saja cara ini tidak selalu tepat, apalagi paling benar. Karena itu, sebuah buku hasil elaborasi seorang tokoh yang sangat mewah pada masanya bisa terus didiskusikan, bahkan didebat. Semoga buku ini menjadi pelenting ide para terpelajar Hindu untuk membaca Arthashastra dari perspektif lain yang berbeda. Kekayaan kitab ini justru pada apa yang masih tersembunyi dalam setiap babnya [*]

Serangan, 10 Oktober 2019

INYS

UCAPAN TERIMA KASIH

Terbitnya buku ini tak lepas dari dukungan banyak orang, terutama mereka yang dekat di hati saya. Dian Karina, istriku. Anak-anakku, I Gde Amartya Sattvika Segara dan I Kadek Chaka Sababathi Segara. Juga kedua orang tuaku, I Made Jaya dan Ni Wayan Suni. Ucapan terimakasih saya sampaikan juga kepada Nanang Sutrisno, Kadek Surpi, Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari, I Gede Suwantana dan penulis lain yang terlampir dalam buku "Politik Hindu, Sejarah, Moral dan Proyeksinya" (IHDN Press.[*])

DAFTAR ISI

Halaman Depan	i
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	v
Prakata	ix
Ucapan Terima Kasih	xv
Daftar Isi	xvi
Bab Satu: Tentang Buku Ini	1
A. Apa Masalahnya?	1
B. Bagaimana Buku Ini Dikerjakan?	5
C. Apa Posisi Buku Ini?	9
Bab Dua: Jejak Hidup, Karakter, dan Gagasan	
Kautilya	12
A. Asal Muasal Nama Kautilya, dan Intelektualitasnya	12
B. Suka Duka Kehidupan Kautilya, dan Intuisi Cemerlangnya	15
C. Kautilya, Sang Penganut Ajaran Satya	19
D. Saripati Pemikiran Kautilya dalam Arthashastra	22

Bab Tiga: Sejarah Politik Hindu dan Refleksinya	
dalam Arthashastra	31
A. Pembabakan Sejarah Politik Hindu	31
B. Arthashastra: Pesan Politik kepada Penguasa Negara	44
C. Menjalankan <i>Swadharma</i> sebagai Praktik Politik Hindu	48
Bab Empat: Filsafat Politik, Teori Politik,	
dan Ajaran Niti	51
A. Politik Hindu dan Kekuasaan dalam Dimensi Filosofis	51
B. Teori Politik dalam Arthashastra untuk Mengelola Negara	61
C. Kautilya Arthashastra, dan Ajaran Tentang Niti	68
Bab Lima: Kautilya dalam Perbandingan dan Tafsir	
Kekuasaan	80
A. Kautilya dan Niccolo Machiavelli	80
B. Kautilya dan Thomas Hobbes	88
C. Politik Hindu di Nusantara	95
Bab Enam: Melanjutkan Pesan Politik Kautilya	
Arthashastra	110
A. Berpolitik, Kenapa Tidak?	110
B. Syarat, Tujuan dan Strategi dalam Politik Hindu ..	113
C. Dari Kautilya untuk Kita	121
Catatan Penutup	127
Daftar Pustaka	130
Tentang Penulis	137

BAB SATU

TENTANG BUKU INI

“(Raja) yang terlalu lemah memegang Danda Negara, dianggap rendah. (Raja) yang secara tepat memegang Danda Negara akan dihormati. Karena Danda yang dipergunakan dengan penuh pertimbangan, akan memberi kepada rakyat kebahagiaan rohani, kesejahteraan jasmani dan kesenangan indria” (Arthasastra Buku Pertama, Bab Tiga, Bagian 1: 9-11)

A. Apa Masalahnya?

Buku ini adalah hasil kajian terhadap salah satu pemikiran tokoh besar Hindu, Maharsi Kautilya. Selama membaca karya monumental sang tokoh, Arthasastra, saya menjadikan filsafat dan antropologi, utamanya filsafat politik dan antropologi kekuasaan sebagai “teman dialog” sejak awal hingga menyudahinya dengan sebuah catatan penutup. Lalu yang menarik adalah kitab Arthasastra dapat dibaca melalui berbagai spektrum. Arus besar memahaminya sebagai kitab ekonomi karena banyak menguraikan masalah-masalah ekonomi dan bagaimana mengelolanya. Arus besar lainnya menganggap Arthasastra sebagai kitab politik karena kitab ini mengajarkan bagaimana strategi mengelola sumber-sumber daya alam untuk kepentingan orang banyak. Melengkapi kedua arus ini,

Arthashastra juga adalah kitab etika sekaligus ilmu pemerintahan, manajemen, administrasi, bahkan seni berperang.

Perdebatan posisi Arthashastra tidak saja masalah isinya, namun juga pengarangnya. Banyak pihak, terutama intelektual Hindu, masih ada yang mensimplifikasinya dengan mengatakan Kautilya itu sama dengan Niccollo Machiavelli, hanya karena sama-sama membicarakan masalah politik. Bagi saya, perbandingan keduanya — Kautilyadan Machiavelli — dengan cara seperti ini terasa ganjil dan tidak adil, terutama karena mereka tidak hidup sejaman. Kautilya misalnya, hidup di abad 4 Sebelum Masehi, dibandingkan dengan Machiavelli yang dilahirkan di Florence, 3 Mei 1469 saat Italia dan daratan Eropa bergolak akibat kecamuk perang. Kemegahan figur Machiavelli yang seolah menenggelamkan tokoh-tokoh lain pada jamannya, mungkin saja Kautilya termasuk di dalamnya, hanya dilihat dalam salah satu buku paling masyurnya, *Il Principe*. Meskipun memang buku ini adalah “kitab kuning” bagi penggiat politik dari dulu hingga ke masa kini.¹

Harus diakui pula, gaya politik Machiavelli telah menjadi magnet bagi perpolitikan dunia, ia dibenci dan ditolak namun pada saat bersamaan ideologi politiknya diikuti dan bahkan dijalankan, meski tidak terang-terangan. Pun namanya yang menjulang sering dimirip-miripkan dengan banyak tokoh yang muncul belakangan. Atas kontribusi besarnya dalam ilmu politik, Machiavelli mendapat gelar “Bapak Ilmu Politik”, meski tidak semua ahli menyetujuinya, salah satunya Hannah Arendt yang mengungkapkannya dalam *Between Past and Future* (1968).²

Dalam buku ini, saya merasa tidak perlu ikut menyibukkan diri hanya dengan mencari titik lemah keduanya, bukan karena agak merepotkan, tetapi lebih pada timbangan pertanggung

¹Banyak karya menjelaskan hal ini, dua di antaranya yang cukup penting adalah L.A. Burt, (ed). 1891. *Il Principe*. Oxford dan Donno Daniel. 1985. *The Prince with Selection from Discourses, Niccolo Machiavelli*. New York: Bantam Books.

²Hannah Arendt. 1968. *Between Past and Future*. New York: Penguin Books.

jawaban ilmiah. Sintesis pemikiran jauh lebih penting, terutama sebagai *lesson learn*. Bertungkal-pangkal dengan mencari mana yang lebih baik, atau siapa lebih dulu dari siapa adalah ketidak-bajikan dalam dunia yang semakin cair, sempit dan kecil. Sebab jika pandangan naif seperti ini membesar di mana-mana, maka yang terjadi hanya saling klaim kebenaran (*truth claim*) dan tanpa disadari esensi perbandingan menjadi kabur.³ Buku ini hanya mencoba menstimulus pemikiran ke arah sintesis itu, dengan menjawab pertanyaan: siapa itu Kautilya, apa saja gagasan besarnya, bagaimana pandangan dan tafsir pemikir lainnya, dan apa yang bisa diambil dari Kautilya Arthashastra untuk kita (baca: politik Hindu)?

Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, buku ini bertujuan untuk memberikan *insight* bagi siapa saja yang masih gelisah untuk menemukan wacana baru, hanya saja, saya memulai dari seorang tokoh, sehingga pendekatan yang dapat digunakan antara lain sejarah dan historisitas sekaligus. Meski hanya selintas, dan terutama karena bukan murni penelitian sejarah, nantinya jejak-jejak kehidupan Kautilya sangat perlu diceritakan kembali untuk merespon agar kajian ini tidak bersifat ahistoris. Menurut saya, langkah ini harus dilakukan lebih awal karena sebuah gagasan besar tidak hadir begitu saja, terlebih gagasan itu bernuansa filsafati. Sebuah gagasan besar itu, biasanya akan digodok oleh tradisi dan budaya pada masanya dengan berbagai kejadian-kejadian penting dan bersejarah, hasil kontemplasi intelektualitas maupun pergolakan batin sang empunya gagasan itu. Sebuah gagasan jenius, sekali lagi, biasanya juga akan

³ Lihat selengkapnya perbandingan umum ini dalam M.V. Krishnarao. 1979. *Studies in Kautilya*. Munshiram Manoharlal Publisher Pvt. Ltd., yang menyatakan terutama pada Bab VI "The Prince" in the Political System of Machiavelli and Kautilya (hal 56) dan Bab VI The Swami in the System of Kautilya (hal 68). Dalam dua bab itu, memang seperti Rao tidak secara eksplisit mengarahkan pembaca untuk sampai pada perbandingan personal yang subjektif namun lebih memaparkan titik temu pemikiran, khususnya ketika membahas satu ikon abstrak yang dianggap memiliki fungsi penting dalam mengelola negara, yakni *The Prince* dalam Machiavelli dan *Swami* dalam Kautilya.

melahirkan satu perspektif yang boleh jadi baru, atau bahkan belum pernah dipikirkan banyak orang. Karena orisinalitasnya pula, gagasan jenius itu dapat melampaui batasan spasial dan temporalitas pemikirnya sendiri, bahkan ketika ia tiada, gagasannya akan tetap hidup abadi. Universalisme pemikiran seperti ini sekurang-kurangnya dapat ditelusuri dari bagaimana seorang pemikir, katakanlah Kautilya dalam kasus ini, mengalami “proses menjadi”.

Bagaimana lika-liku perjalanan hidup Kautilya, akan coba diungkap dari berbagai sumber, dengan harapan penulis dapat menangkap sisi lain dari apa yang telah diwariskannya kini. Penelusuran ini, meski hanya selintas, tetap penting karena berbagai peristiwa yang mewarnai pengalamannya adalah buah dari pertemuannya dengan situasi tertentu yang pada akhirnya akan memperlihatkan siapa Kautilya itu sebenarnya. Hal ini saya lakukan karena bagaimanapun aspek waktu dan tempat, diikuti berbagai peristiwa yang mewarnai kehidupan seorang tokoh besar mengandung arti bahwa kehadirannya tidak bisa dilepaskan dari karakter, kepribadian, dan suasana batin yang melingkupinya.

Setelah memahami peta pemikiran Kautilya secara utuh melalui pendekatan sejarah, saya akan melakukan teknik evaluasi kritis yang bersifat reflektif melalui berbagai buku lain, sehingga kajian ini benar-benar mengambil posisinya yang jelas, bukan kajian teks semata. Saya ingin menjernihkan maksud ini, bahwa sedikit berbeda dengan kajian teks yang umumnya bersumber pada teks-teks utama tertentu, lalu ditafsirkan, salah satunya yang berkembang dalam ilmu linguistik adalah semiotika atau teknik hermeneutika dalam metode filsafat. Dalam kajian pemikiran yang beremanasi filosofis, seorang penulis harus berani memperluas interpretasi tidak hanya pada teks yang eksplisit tetapi juga gagasan tokoh dibalik berbagai kejadian waktu dan peristiwa yang bersifat menyejarah. Gagasan

itu bisa saja implisit tersebar ke dalam banyak tulisan dan tafsir orang lain di waktu yang berbeda. Namun bukan berarti kajian pemikiran lebih progresif ketimbang kajian teks, karena keduanya memiliki kekuatan sebagai konsekuensi metodologis yang jika dikerjakan sama berat dan sulitnya.

Jadi, buku ini diarahkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap, *pertama*, mendorong kajian pemikiran seorang tokoh besar dari berbagai perspektif, sehingga menjadi lebih kaya dan makin banyak pilihan untuk memahaminya. *Kedua*, mendorong kajian pemikiran dan gagasan tokoh Hindu yang dianggap berjasa dalam dunia keilmuan maupun peradaban. *Ketiga*, mengembangkan pemikiran seorang tokoh untuk dijadikan bahan dalam menganalisis isu aktual, terutama dalam bidang politik dan kekuasaan. *Keempat*, buku ini diarahkan sebagai bahan pendamping dari matakuliah filsafat politik dan antropologi kekuasaan.

B. Bagaimana Buku Ini Dikerjakan?

Penulisan buku ini selain menggunakan studi komparasi tokoh antara Kautilya dengan Machiavelli, dan tokoh lainnya termasuk menelisik refleksi politik dan kekuasaan dalam kesusasteraan Jawa, juga akan menggunakan tafsir dari filsafat bahasa dan hermeneutika. Ikut digunakannya filsafat bahasa karena para filsuf di masa lalu sering menghadapi masalah tentang konsep-konsep filsafat yang pada dasarnya dituangkan ke dalam bahasa. Masalah ini kemudian dicarikan solusinya dengan analisa bahasa yang akhirnya melahirkan filsafat bahasa.⁴ Selanjutnya, melalui filsafat bahasa akan dibahas, dianalisis dan dicarikan hakikat dari obyek material filsafatnya.

Cara tersebut menurut Paul Ricoeur masuk akal karena manusia itu pada hakikatnya adalah bahasa, karena bahasa

⁴Lihat Steven Davis. 1976. *Philosophy and Language*. TheBobbs Merrill Company.

merupakan syarat utama bagi pengalaman manusia. Artinya bahwa manusia mengungkapkan dirinya melalui bahasa, memahami dirinya dan segala sesuatu yang ada melalui bahasa. Manusia bergaul dalam masyarakat melalui bahasa. Bahasa tempat bermuaranya seluruh aktivitas manusia, menalar, berlogika, menangkap fenomena, menghadap Tuhannya, menganalisa kejiwaannya, menafsirkan sesuatu, mengungkapkan gagasan-gagasan, emosi, rasa seni dan filsafat. Bahasa diwujudkan melalui ucapan dan tulisan atau teks. Teks menurut Ricoeur adalah suatu diskursus yang difiksasi dengan tulisan. Menurut definisi ini, eksasi dengan tulisan menampakkan ketentuan teks itu sendiri.⁵ Ricoeur selanjutnya menyatakan bahwa kata dalam wujud teks itu pada dasarnya adalah simbol yang mempunyai pluralitas makna bila dihubungkan dengan konteks yang berbeda, bersifat polisemi, memiliki lebih dari satu makna.

Kesimpulannya, *paradigma teks pertama* dari Ricoeur adalah tentang diskursus yang selalu direalisasikan secara temporal dalam waktu, sedangkan sistem bahasa itu virtual dan keluar dari waktu. *Paradigma teks kedua* adalah maksud pengarang dan makna teks berhenti menyesuaikan. Makna teks tidak lagi berhubungan dengan psikologi maksud pengarang. *Paradigma teks ketiga* adalah teks membebaskan diri dari referensi yang diucapkan dengan membuka *being-in-the-world* yang baru. Membebaskan makna dari situasi yang dialogis. *Paradigma teks keempat* adalah diskursus sendiri tidak hanya sebuah dunia tapi yang lain, orang lain, teman bicara yang diskursus arahkan. Pada saat yang sama, diskursus ditampakkan seperti diskursus dalam universalitas sasarannya.⁶

⁵ Paul Ricoeur. 1991. *Hermeneutics the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation*, Ed. and Trans. John B. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 106

⁶ *Ibid*, hlm. 145-150

Keempat paradigma di atas menunjukkan bahwa sebuah teks memiliki otonomi, yakni otonom dari maksud pengarang (intensi), otonom dari situasi kultural dan kondisi sosial ketika teks dibuat, otonom dari untuk siapa teks itu dimaksudkan. Otonomi ini menunjukkan bahwa materi teks melepaskan diri dan cakrawala intensi yang terbatas dari pengarangnya. Terjadi pembebasan dari konteks (dekontekstualisasi), di mana teks membuka diri terhadap kemungkinan dibaca secara luas, oleh pembaca yang berbeda-beda dalam konteks yang baru sehingga terjadi proses masuk kembali ke dalam konteks (rekontekstualisasi). Awalnya ada sesuatu yang asing kemudian dijadikan sebagai milik (apropriasi). Bagaimana menghadirkan yang asing (*otherness*) itu yang memiliki jarak (*distansi*) secara temporal dan spasial menjadikannya sebagai kemilikan (*ownness*).

Dengan demikian, apropriasi masa lalu berproses terus menerus secara dialektis. Bila para pakar bidang sains menerangkan bahwa ia akan berhenti pada kasus yang ia terangkan sebagai suatu fakta atau peristiwa, menggunakan diagram ilmiah untuk memberikan penjelasan, jadi bersifat obyektif terstruktur. Sebaliknya para interpreter menafsirkan ilmu-ilmu kemanusiaan agar ia dapat memahami dan mempergunakan metode interpretasi, tanpa perlu menjelaskan sehingga bersifat subyektif. Kelonggaran ini dikarenakan interpretasi itu selalu bersifat *open minded*, terbuka untuk diinterpretasi ulang. Interpretasi tidak mempunyai titik akhir. Menurut Ricoeur antara menjelaskan dan memahami bukan dua hal yang harus dipertentangkan dan saling meniadakan, tapi keduanya berproses secara dialektis. Proses dari pemahaman ke penjelasan akan memahami makna teks secara keseluruhan. Proses dari penjelasan ke pemahaman, akan memahami mode pemahaman yang didukung dengan prosedur penjelasan.

Dengan demikian, ada tiga tahapan pemahaman, yaitu *pertama*, menafsirkan makna verbal teks berarti menafsirkan

seluruhnya sebagai sebuah karya kumulatif dan holistik, bukan sekedar tulisan. *Kedua*, menafsirkan teks berarti menafsirkan individu, karena di samping karya dihasilkan berdasarkan aturan generiknya, juga karya sebagai yang tunggal. *Ketiga*, teks literal melibatkan cakrawala makna potensial yang mungkin dimaksimalisasikan dengan cara yang berbeda-beda. Pemahaman tidak hanya sekedar mencari hubungan antara teks dengan pengarangnya, tetapi untuk mencari dunia proposi-proposisi yang terbuka oleh referensi teks.

Langkah-langkah metode hermeneutik dari Ricoeur dilakukan melalui distansi, interpretasi dan apropriasi. Distansi, yaitu membuat jarak antara apa yang dikatakan dari intensi subyek yang menulis, antara penafsiran si penafsir dengan makna yang dimaksudkan oleh penulis. Pembaca mencari bukan sesuatu yang ada di belakang teks, tapi mencari sesuatu yang terbuka di hadapan teks. Makna melampaui apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan oleh teks tidak berhubungan dengan apa yang dimaksud oleh penulisnya. Dalam ekspresi ucapan atau oral sudah mengandung relasi dan situasi tertentu antara yang mengucapkan dengan yang mendengarkan, sedangkan diskursus tertulis berhadapan dengan pembacanya yang tidak dikenal, situasi pengucapan tidak ikut ambil bagian. Artinya teks membuka diri kepada pembacanya yang tak terhitung jumlahnya, dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Dimensi referensial terbuka untuk proses penafsiran. Interpretasi suatu teks adalah *self understanding* yang tidak dapat disamakan dengan subyektivisme naif. Hermeneutik berkaitan dengan *understanding of being* dan hubungan antar *being*. Dengan demikian, Ricoeur mencoba memisahkan antara penjelasan tentang kebenaran dengan pemahaman. Prosedur validasi lebih mempergunakan logika probabilitas. Suatu interpretasi lebih propable atau lebih tepat dari interpretasi yang lainnya jika dilihat dari kekuatan argumentasinya. Metode

hermeneutika fenomenologis dari Paul Ricoeur menurut saya akan dapat berperan dalam memberikan pemahaman tentang jejak politik Hindu seperti apa yang dapat dibaca dari pemikiran Kautilya dalam Arthashastra. Artinya, sebuah gagasan dan wacana tidak akan muncul secara tiba-tiba, oleh karena itu basis sosial kehidupan pemikirnya juga akan dilacak. Itulah yang akan dikerjakan saat mengungkap sosok Kautilya.

C. Apa Posisi Buku Ini?

Mungkin buku ini tidak bisa dianggap baru, dalam arti, kebaruannya melampaui buku-buku yang sudah ada sebelumnya. Yang jelas, buku ini tetap dan masih bersinggungan dengan buku-buku sejenis. Satu yang pasti, buku ini menggunakan berbagai sumber, baik yang terserak di Barat, terutama ketika membaca ilmu dan atau filsafat politik.⁷ Selain itu, buku-buku terbitan India, tentu saja menjadi rujukan utama, meskipun selalu ada kesulitan tersendiri untuk memahaminya. Sebagaimana umumnya buku-buku yang ditulis penulis India, sering satu buku berisi banyak tema dan terdapat pertautan antartema yang melintasi berbagai jaman. Tidak jarang buku yang ditulis pada tahun ini, misalnya, isinya seolah terbawa ke masa lalu, seperti masuk ke jaman lahirnya Purana yang dipenuhi berbagai mitologi.⁸ Lalu bagaimana dengan buku-buku yang ditulis intelektual Indonesia?

⁷ Lihat Robert E. Goddin and Philip Pettit (eds.). 1997. *Contemporary Political Philosophy: An Anthology*. Oxford: Blackwell Publisher Ltd; William Ebenstein. 1959. *Modern Political Thought: The Great Issues*. New York: Rinehart & Company, Inc; J. Charles King and James A. McGilvray. 1973. *Political and Social Philosophy: Traditional and Contemporary Readings*. New York: McGraw-Hill; Alan Brown. 1986. *Modern Political Philosophy*. Middlesex: Penguin Books; Kymlicka, Will. 1990. *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press; William L. McBride. 1994. *Social and Political Philosophy*. New York: Paragon House; A.R.M. Murray 1953. *An Introduction to Political Philosophy*. London: Cohen and West; Steven M. Cahn. 2005. *Political Philosophy, The Essential Texts*. New York: Oxford University Press.

⁸ Sebut saja satu buku, misalnya dari R.K. Mookerji. 1943. *Chandragupta Maurya and His Times*. Madras.

Tampaknya, ketika akan membahas politik, kebanyakan buku-buku yang disusun intelektual Hindu berusaha keras mencuplik beberapa aspek atau ajaran kepemimpinan dalam Hindu. Salah satu yang paling jamak adalah *Astha Brata*.⁹ Memang, isi buku-buku tersebut bercerita tentang ilmu kepemimpinan, namun belum dapat dikategorikan sebagai buku politik. Saya tetap memberi kredit yang besar terhadap buku-buku klasik tersebut karena telah menyumbang banyak dalam buku ini yang saya juga tidak posisikan sebagai buku politik Hindu.

Dus, buku ini sebenarnya diinspirasi oleh IB. S. Radendra,¹⁰ yang membahas Arthasastra namun hanya dari aspek ekonomi dan politik. Bagaimana dan mengapa Ekonomi dan Politik itu ada dalam Arthasastra, sepertinya masih harus dielaborasi sehingga saya punya kesempatan untuk mengembangkannya lebih lanjut. Buku yang saya susun ini akan fokus pada satu aspek, yakni politik dan kekuasaan. Namun karena Arthasastra mengandung banyak aspek, maka politik dan kekuasaan yang saya lihat adalah sebuah refleksi. Dengan cara seperti ini, saya memiliki kesempatan untuk menjelajahi buku-buku lain dan menempatkannya sebagai sebuah kajian politik dan kekuasaan.¹¹

⁹ Buku-buku itu, misalnya dari Tjok Rai Sudharta. 2009. *Kepemimpinan Hindu Asta Bratha dan Nasehat Sri Rama Lainnya*. Surabaya: Paramita; I Gusti Agung Oka. 1970. *Niti Sastra, Rajaniti, Pengetahuan (untuk Leadership yang Berorientasi) Agama Hindu*; Ketut Gede Ariasna. 2000. *Kepemimpinan Hindu*. Surabaya: Paramita; S. Budhisantoso. (at al), 1990. *Niti Raja Sasana*. Depdikbud; G.K. Adia Wiratmadja. 1975. *Leadership: Kepemimpinan Hindu*. Magelang: s.n; G.K. Adia Wiratmadja. 1995. *Kepemimpinan Hindu*. Denpasar: Yayasan Dharma Narada.

¹⁰ IB. S. Radendra. 2009. *Ekonomi dan Politik dalam Arthasastra*. Denpasar: Vidya Dharma.

¹¹ Ada bua buku lain yang sangat membantu saya untuk merefleksikan Kautilya Arthasastra sebagai kajian politik dan kekuasaan, yakni Dharmayasa. 1995. *Chanakya Niti Sastra*. Jakarta: Yayasan Dharma Naradha dan M.V. Krishnarao. 1979. *Studies in Kautilya*. Munshiram Manoharlal Publisher Pvt. Ltd. Selain itu, saya juga dibantu dengan membaca kisah hidup sang maharsi dalam *Chanakya. An Original Novel* by B.K. Chaturvedi. New Delhi: Diamond Pocket Books Pvt. Ltd.

Mengingat buku ini berusaha menemukan makna baru dibalik teks, maka ada buku utama yang penting dijadikan etalase untuk dicari pada bagian apa buku tersebut merefleksikan politik dan kekuasaan. Buku utama itu adalah *Arthasastra* yang diterjemahkan Made Astanadan C.S. Anomdiputro.¹²Dipilihnya buku ini bukan tanpa sebab. *Pertama*, sampai saat ini buku ini menjadi rujukan utama untuk memahami *Arthasastra*. *Kedua*, dua penerjemah buku ini menggunakan dua buku lain sekaligus dengan bobot yang sejajar. *Ketiga*, buku ini menjadi peta yang cukup lengkap. Berdasarkan tiga alasan tersebut, buku ini akan mengambil posisi dengan hanya membaca aspek politik dan kekuasaan dalam Kautilya *Arthasastra*. Beberapa buku sejenis tetap menjadi perspektif dan inspirasi untuk dikembangkan dengan membuka ruang diskusi lebih lanjut [*]

¹²Made Astana dan C.S. Anomdiputro. 2003. *Arthasastra*. Terjemahan dari buku *Kautilya's Arthasastra* oleh R. Shamasastri dan *The Kautilya Arthasastra* oleh R.P. Kangle. Surabaya: Paramita

BAB DUA

JEJAK HIDUP, KARAKTER DAN GAGASAN KAUTILYA

“Raja yang telah terlatih dalam ilmu-ilmu, berniat memerintah rakyatnya dengan baik akan menikmati Bumi (sendiri) tanpa diganggu oleh penguasa lain, dan ia akan menjadi curahan kesejahteraan bagi semua makhluk”(Arthasastra Buku Pertama, Bab Lima, Bagian 2: 17)

A. Asal Muasal Nama Kautilya, dan Intelektualitasnya

Ada satu kerumitan untuk mengenal lebih jauh tentang siapa tokoh yang sebenarnya menyampaikan gagasannya dalam Arthasastra. Kesulitan ini dikarenakan begitu banyaknya nama yang disebut dalam berbagai buku. Serta belum ada satu buku khusus yang membahas profil Kautilya secara utuh, semacam biografi. Kesulitan ini bukan hanya ketika membaca Kautilya, tetapi hampir semua tokoh besar Hindu lainnya, contohnya Mahatma Gandhi. Bahkan saya harus membaca Gandhi dari buku-buku yang dikarang penulis Barat. Kalaupun ada tulisan dari penulis Hindu, sering menjadi semacam kompilasi saja dari berbagai pemikiran yang tercecce di sana sini. Tidak mengherankan jika ada kesan antara satu buku dengan buku lainnya saling dipertentangkan. Namun dengan bekal pemahaman terhadap teks, sebenarnya semua nama yang

beredar menunjuk satu nama yang sama yaitu Kautilya. Pada bab ini saya akan coba jelaskan kembali siapa Kautilya itu, meskipun lagi-lagi terbatas pada bacaan banyak buku, bukan biografinya.

Awal kesulitan mendalami tokoh ini sebenarnya adalah ketika di setiap buku kita akan mendapati nama Chanakya Pandit. Nama ini sepertinya tidak banyak dikenal dalam sejarah, khususnya yang berkaitan dengan Arthashastra. Satu-satunya data yang cukup memadai adalah ketika ia diketahui pernah belajar di Universitas Takshashila. Beberapa buku menyebutnya Universitas Taxila. Ayahnya bernama Chanaka, dan karena nama ayahnya itu pula, ia disebut Chanakya. Mengingat kecerdasannya yang luar biasa, khususnya dalam ilmu politik, ia diberi nama Kautilya. Tidak sampai di sini, masih ada nama lain yang acap dikaitkan dengan Kautilya, yaitu Wisnugupta, nama asli yang sebenarnya diberikan orang tuanya. Kelak di kemudian hari, Wisnugupta adalah seorang perdana menteri yang cerdas, bijaksana dan ahli strategi, politik dan pemerintahan.

Selain nama-nama di atas, adapula yang menyatakan bahwa nama Kautilya adalah sebuah ejekan, kini semacam *bullying* yang diberikan oleh para penganut Buddha ketika terjadi gerakan untuk mereformasi sistem kehidupan keagamaan ketika itu. Namun yang cukup mengejutkan, nama Chanakya diasosiasikan sebagai pribadi yang *kutila*, yaitu orang yang memiliki sifat-sifat licik dalam arti yang positif. Disebut *kutila* karena ia tidak mudah ditipu, suka membalas kebaikan dengan kebaikan dan keburukan dengan keburukan. Atas sifat-sifat tersebut, kata *kutila* akhirnya lama-lama menjadi Kautilya. Namun jika merujuk saat ditulisnya Arthashastra yang diperkirakan sekitar abad ke 4 Sebelum Masehi, banyak ahli cenderung mempercayai nama Chanakya sebagai penulisnya, meskipun nama Kautilya juga sangat jelas tertera, dan pada saat bersamaan di akhir ayat kitab ini (Arthashastra). Dalam Wisnu

Purana memang disebut Kautilya, dan dalam Niti Sara karya Kamandaka ia disebut Wishnugupta. Jadi, kedua nama ini menunjuk satu orang, yaitu Kautilya yang sebenarnya berkaitan erat dengan asal muasal keluarganya dari *kutula gotra*.

Beragamnya nama Kautilya seperti di atas, sekaligus kerumitan untuk menggambarkan personanya, merujuk pada pendapat Ganapati Sastri, seorang penulis yang dapat diandalkan, juga Jolly dalam karyanya *Arthasastra of Kautilya*. Namun jika nama Kautilya, Wisnugupta dan Chanakya memang benar satu orang, lengkap dengan segala tafsir dan kontroversi yang menyertainya, saya dalam tulisan buku ini hanya akan menggunakan nama Kautilya saja, bukan semata untuk memudahkan pembaca tetapi juga untuk menjaga konsistensi. Dan menyebutnya Kautilya saja sangatlah penting di tengah banyaknya nama “Kautilya” lainnya.

Masa muda Kautilya, apalagi kelahirannya tidak banyak diketahui orang, terutama karena alasan-alasan yang telah disebut di atas. Beberapa legenda hanya mengisahkan bahwa kepandaian Kautilya yang berasal dari Magadha sudah tampak bersinar sejak masa anak-anak. Minat terbesarnya ada pada pengetahuan Weda dan ilmu politik. Minat ini terus dipeliharanya untuk suatu saat menjadi ahli strategi politik. Untuk memperdalam intuisi politiknya, ia kuliah di Universitas Taksasila, salah satu universitas paling berpengaruh saat itu. Sempat ia mengalami masa sulit ketika universitas ini dipenuhi pengungsi akibat kekacauan kota Taksasila, namun peristiwa itu justru menjadi berkah buatnya karena ia menjadi salah satu intelektual muda universitas yang dilibatkan untuk meredam konflik. Selepas kuliah, ia menjadi pengajar di almamaternya, dan meraih gelar professor.

Apa yang kita ketahui secara ringkas dari berbagai buku itu, tampaknya atau mungkin dapat disimpulkan bahwa Kautilya tidak lahir dari keluarga sembarangan. Ia telah mendapat banyak ilmu terutama dari orang tuanya sendiri, sesuatu yang khas pada keluarga-keluarga brahmana di India masa lalu, tak terkecuali Kautilya. Selintas, fakta ini dapat kita ketahui dari tradisi dalam *ashram* atau lembaga perguruan Hindu masa silam di India. Bahkan ketika Rsi Bhyasa atau Wyasa menghimpun Weda bersama murid-muridnya, beliau juga harus menelusuri aspek kesejarahan dan keturunan asal-usul (geneologi) penyusun Catur Weda.

B. Suka Duka Kehidupan Kautilya, dan Intuisi Cemerlangnya

Ketika Kautilya menikmati masa emasnya sebagai salah satu pengajar terpandang, India mengalami pergolakan hebat dari serangan asing. Ia memilih jalan menyelamatkan negaranya, dan selanjutnya meninggalkan Universitas Taksasila menuju Pataliputra untuk membuka jalan baru bagi perubahan politik India. Ia diceritakan mengabdikan pada Raja Nanda di Pataliputra. Raja Nanda diartikan sebagai *Dhana-Nanda*, yaitu *Nanda* yang kaya raya. *Nanda* adalah nama seorang raja. Sayangnya, Kautilya dianggap telah mengabdikan pada raja yang arogan, angkuh dan tidak memiliki kehormatan. Bahkan dalam arti yang sebenarnya, Raja Nanda dianggap sebagai anak haram, buah perselingkuhan.

Masa bulan madu pengabdian Kautilya kepada Raja Nanda berakhir. Ada banyak versi yang menceritakan bagaimana akhirnya Kautilya berseberangan dengan sang raja. Dalam *Studies in Kautilya* disebutkan bahwa Raja Nanda melaksanakan upacara besar untuk memperingati kerajaan yang puncak acaranya harus diselesaikan oleh seorang brahmana. Kautilya lalu dihadirkan untuk menyempurnakan

upacara tersebut, namun karena ia berpenampilan sederhana dengan wajah yang tidak rupawan, Raja Nanda yang bergelimang harta dan kekuasaan menjadi sangat marah lalu habis-habisan menghina Kautilya. Tidak berhenti sampai disitu, Nanda lalu mengusirnya dengan kata-kata yang serampangan. Sayangnya, saat Nanda mengusirnya, Kautilya diceritakan sedang asyik makan. Akibatnya, Kautilya menjadi sangat malu dan batinnya terpuruk. Ia merasa sangat terhina. Sejak saat itu, benih kebencian dan balas dendam mulai tumbuh subur di hatinya.

Versi yang lain menyebutkan, saat Kautilya mengabdikan pada Raja Nanda di Pataliputra, Kautilya sempat dijadikan Pemimpin *Sungha (Trust)*, namun diturunkan dari jabatannya dengan sebab yang tidak jelas. Keputusan ini dianggap Kautilya. sangat menyakitkan dan membuat luka batinnya sangat dalam. Di lain pihak, Raja Nanda diceritakan pula mulai membasmi semua keturunan Mauriya, dan hanya menyisakan seorang anak yang kelak dikenal sebagai Chandragupta.

Akibat dari dua kisah pilu yang sama-sama berakhir dengan pedih dan getir tersebut, Kautilya lalu diceritakan pergi melakukan pengembaraan. Dalam perjalanannya itu, ia menyamar menjadi pertapa hingga ke pelosok desa-desa, hingga akhirnya bertemu dengan seorang pemuda bernama Chandragupta, salah satu dari dinasti Mauriya yang selamat atas penaklukan kejam Raja Nanda. Dengan instuisinya yang tajam, Kautilya sangat terkesan melihat Chandragupta yang sudah menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan, terutama saat ia bermain peran. Selanjutnya, Kautilya rela membayar 1.000 pana untuk membawa Chandragupta ke Taksasila. Atas kesamaan dendam kepada orang yang sama, Kautilya dengan tekun membimbing dan mempersiapkan Chandragupta sebagai pemimpin besar.

Oleh Kautilya, proses pembimbingan ini dipraktikkan secara nyata dengan langsung menyertakan Chandragupta ke dalam

medan perang ketika bangsa Yunani, yang dikomandani Panglima Alexander the Great melakukan kolonialisme ke India. Setelah India selamat dan bebas dari upaya ekspansi ini, Kautilya dan Chandragupta berpaling untuk menaklukkan Raja Nanda yang telah lama dibencinya bersama rakyat karena kezalimannya. Pendek cerita, Kautilya dan Chandragupta yang disokong kekuatan rakyat berhasil mengalahkan Raja Nanda. Bersama seluruh keturunannya, Raja Nanda akhirnya tewas. Kautilya dan rakyat lalu menasbihkan Chandragupta sebagai raja untuk meneruskan dinasti Mauriya yang sempat kocar kacir.

Dalam cerita yang lain namun dengan versi yang berbeda, disebutkan bahwa sebenarnya Kautilya dan Chandragupta adalah alat yang digerakkan oleh Wikatara yang juga ikut membalas dendam kepada Raja Nanda. Dikisahkan, suatu saat Raja Nanda hendak menyelenggarakan upacara Sraddha, yakni persembahan korban yang ditujukan kepada leluhurnya. Raja Nanda lalu mengutus seorang menterinya bernama Wikatara. Ia juga disebut dengan nama Raksasa, Amatya Raksasa atau Mudra Raksasa. Wikatara diminta untuk mencari seorang brahmana untuk memimpin upacara Sraddha tersebut. Namun begitu ia tiba di luar istana, Wikatara terngiang tentang kejahatan dan kekejaman yang dilakukan Raja Nanda kepada keluarganya. Ia sangat geram mengingat seluruh keluarganya yang dipenjarakan mati kehausan dan kelaparan. Wikatara ingin membalas dendam namun ia tak sanggup melakukannya sendirian. Oleh karena itu, ia merancang strategi dengan menggunakan perantara seorang brahmana yang mampu membunuh seluruh keluarga Raja Nanda dan keturunannya. Wikatara ingin mengimitasi Raja Nanda saat menghabiskan seluruh keluarganya.

Dalam perjalanannya mencari seorang brahmana itu, Wikatara lalu melihat seseorang yang berkulit gelap, bibirnya

tebal, matanya kecil namun berwarna merah, seperti sedang memendam amarah yang luar biasa. Ciri-ciri yang lainnya, orang tersebut menggunakan tali suci yang melingkar dari bahu ke pinggangnya. Wiktara yakin orang ini seorang brahmana. Keyakinannya semakin kuat karena brahmana itu juga menggunakan *tilaka*, semacam abu suci yang dioleskan pada anggota badan tertentu dan *sikha* atau rambutnya sedikit disisakan dan dibiarkan tidak terikat di belakang kepalanya. Wiktara melihat brahmana tersebut sedang mencabut alang-alang yang lalu disirami dengan racun.

Setelah sebelumnya memberi sujud hormat, Wiktara menanyakan tingkah brahmana yang menurutnya sangat aneh. Brahmana itu lalu menceritakan bahwa alang-alang tersebut dianggapnya telah berbuat kesalahan besar ketika ayahnya, Canaka berjalan-jalan di hutan. Alang-alang itu memiliki racun yang mematikan saat menusuk paha ayahnya hingga meninggal, dan membuat ia kehilangan figur seorang ayah. Kepada Wiktara ia memperkenalkan dirinya dengan nama Canakya yang akan membasmi alang-alang tersebut sampai ke akar-akarnya tanpa sisa. Oleh Wiktara, apa yang dilakukan Canakya tersebut sejalan dengan misinya untuk membasmi Raja Nanda sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya, kedua orang ini berkoalisi karena Canakya pernah dihina dan dilecehkan Raja Nanda saat memimpin upacara. Wiktara dan Canakya berhasil membalas dendam kusumatnya dengan membasmi Raja Nanda dan seluruh keturunannya, seperti Canakya mencabut alang-alang beracun hingga ke akar-akarnya.

Beberapa cerita di atas, meski dengan alur yang berbeda, dan mungkin juga dengan *setting* yang sedikit liyan, semuanya memiliki kesamaan, yaitu Wiktara, Kautilya dan Chandragupta berhasil membalaskan dendamnya kepada Raja Nanda. Meskipun dalam cerita lainnya, Chandragupta dan Wiktara diceritakan tidak akur dan sempat bermusuhan, namun Kautilya

dengan kepiwaiannya dikatakan berhasil mendamaikan hubungan keduanya menjadi sebuah sinergi yang besar. Chandragupta diangkat sebagai raja agung, Wikatara dijadikan abdi paling setia, sedangkan Kautilya menjadi penasihat kerajaan yang bijaksana.

Dari beberapa cerita di atas, terlihat dengan sangat jelas, betapa Kautilya telah menunjukkan dirinya sebagai sosok yang sangat terkenal karena penguasaan strateginya dalam bidang politik, ketatanegaraan, administrasi, ekonomi dan etika yang dituangkan dengan sangat baik melalui buku Arthashastra. Praktik politik dan ilmu perangnya teruji dalam medan perang. Puncaknya saat menghadapi Raja Nanda dan menghalau serangan Alexander the Great terhadap India. Selain itu, ia juga dikenal sebagai *king maker*, mulai dari mendidik hingga menempatkan Chandragupta sebagai raja besar. Padahal ia sendiri punya peluang untuk mengambil haknya sebagai pemenang. Sampai di sini, puncak kecemerlangan intuisinya baik sebagai brahmana maupun politikus telah mendapat pujian dan pengakuan.

C. Kautilya, Sang Penganut Ajaran Satya

Sejak berusia sangat muda hingga memasuki usia yang matang, Kautilya digambarkan sebagai orang yang tetap memiliki karakter teguh untuk memegang apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Ia tidak pernah berubah untuk urusan ini. Kautilya, misalnya sangat percaya pada teori brahmana tentang alam semesta dan keterpautannya yang kuat pada sistem sosial yang dibangun atas adat istiadat dan agama brahmana melalui empat kasta dan ashrama. Namun pada saat yang bersamaan, Kautilya adalah pencinta tindakan *ahimsa* dan melarang pembunuhan diri sendiri. Hal yang sama juga diberlakukan untuk binatang dan makhluk hidup lainnya. Pandangan dan sikap hidupnya ini, Kautilya banyak dipengaruhi ajaran Buddha.

Untuk mewujudkan gagasan tanpa kekerasannya, Kautilya diceritakan menyediakan tempat-tempat pemotongan binatang dan mengizinkan pemberian daging.

Kautilya dianggap brahmana yang semasa hidupnya mengalami langsung situasi saat gerakan reformasi dan ajaran Buddha menyebar dan “menyerang” kaum brahmana. Namun Kautilya juga adalah orang yang memiliki karakter kuat untuk memegang *Trayi Dharma*. Itulah yang mewarnai tindakannya untuk menyukai perdamaian dan jauh dari tindakan *himsa karma*. Sementara dalam membangun disiplin politiknya, Kautilya secara tegas mengatakan sangat berhutang budi pada kitab Atharwa Weda, dan lebih khusus Arthasastra. Keduanya telah mengayakan, dan menjadikan dirinya tampak ideal.

Meski ia sering dianggap immoral karena ketegasannya pada pengganggu keamanan negara, Kautilya sejatinya memiliki kecintaan untuk memuliakan negara. Itulah sebabnya, dalam beberapa buku yang menginterpretasinya, Kautilya dikatakan rela melakukan apa saja, bahkan dikritik telah bertindak kejam, namun misi utamanya, sekaligus kemuliaan ajarannya adalah bagaimana mengelola negara agar tetap makmur, damai dan stabil dengan meminimalkan potensi konflik dan gangguan. Integritasnya yang lain, dan ini sangat mengagumkan adalah ketika ia memiliki kesempatan memiliki kemasyuran sebagai raja, ia justru memilih berada di balik layar dengan mempersiapkan secara matang Candragupta sebagai raja diraja. Kehebatan Candragupta adalah buah gembelannya sebagai seorang pemikir dan praktisi karena ia politikus sekaligus seorang brahmana suci, sebuah peran yang tidak bisa dicarikan bandingannya mungkin sampai hari ini.

Setelah malang melintang dan melewati segala onak dan duri perjuangannya yang berakhir manis, Kautilya berhasil memposisikan dirinya sebagai *purohita*, sebanding dengan Aristoteles yang menjadi penasehat untuk Raja Iskandar. Bagi

Kautilya, *purohita* bukan sekadar peran yang kecil, tetapi agen yang sangat penting untuk mempertahankan keutuhan negara yang ditanamkan melalui Candragupta. Ia menjadi *purohita* karena kemampuannya dalam berbagai bidang disiplin ilmu, sekaligus orang yang sanggup menjadi panglima untuk bertarung di medan perang. Dengan pencapaian gemilangnya ini, Kautilya dianggap telah berhasil menurunkan ajaran agama yang bersifat abstrak pada kitab suci, menjadi sesuatu yang riil untuk kemanusiaan dan kehidupan. Kautilya juga sukses memerankan sosok religius yang suci sekaligus politikus yang sangat ulung. Menurut Kautilya, ilmu kebajikan telah menuntunnya menjadi seseorang yang harus mengutamakan kesejahteraan negara. Seni politik tidak dapat memberikan kepada umat manusia di mana segalanya harus ada, tetapi justru dapat menunjukkan kepada negara apa yang terbaik.

Memang, pada akhirnya banyak kritik yang ditujukan kepada politik Kautilya yang dianggap terlalu keras dan seolah menghalalkan segala cara. Namun begitulah Kautilya yang menjadi sosok paling teguh dalam memilih jalan kebenaran (*satya*). Ini adalah bentuk totalitas politik praktis yang sampai saat ini telah menjiwai konsep-konsep kepemimpinan sejak lama, misalnya *Catur Upaya Sandi*, *Pramiteng Prabhu*, *Asta Brata* hingga *Catur Pariksa*, yang semuanya ini terinspirasi dari Niti Sastra. Bahkan saat-saat kematian Raja Nanda, Wikatara berujar bahwa "*Raja Niti itu bagaikan wanita tuna susila yang tidak pernah menaruh cintanya di satu tempat*". Begitu pula politik yang tidak pernah mencintai seseorang selamanya. Ketika Raja Nanda terguling, politikpun menjatuhkan cintanya pada Chandragupta. Dalam dunia politik, khususnya politik praktis, pemandangan dramatis kekalahan Raja Nanda dan nasehat agung Wikatara seolah masih relevan hingga saat ini, bahkan sejak Arthashastra dikarang ribuan tahun lalu.

D. Saripati Pemikiran Kautilya dalam Arthasastra

Perjalanan hidup Kautilya, seperti diceritakan dalam banyak versi, secara langsung tergambar dalam gagasannya yang juga penuh spektrum. Karena ia seorang rohaniwan besar, pikirannya juga sangat filosofis, tak terkecuali tentang politik. Bahkan, seluruh ide besarnya dalam politik sarat filsafat. Tegasnya mengandung filsafat politik. Jika benar, dapat saja filsafat politiknya menjadi bagian dari filsafat praktis. Ini disebabkan Arthasastra bukan hanya kitab teoritik semata tetapi juga dapat dan seharusnya dipraktikkan dalam hidup. Dan ini berbeda dengan filsafat etika yang lebih mengatur norma individual, meskipun dari aspek sosialnya, etika memberi jalan bagaimana manusia harus diatur dalam satu rumah besar bernama masyarakat.

Seluruh gagasan Kautilya, terutama politik dalam Arthasastra, sebenarnya ia tuangkan bersama dengan lika-liku kehidupannya yang penuh gejolak politik. Kondisi ini mengharuskannya, kalau tidak disebut memaksanya untuk membuat satu panduan praktis yang dapat dijalankan secara konkrit. Namun pasang surut perjalanan hidup yang ikut dilibatkan dalam pokok pikirannya mengafirmasi asumsi banyak orang dengan mengatakan Kautilya telah menjauhkan ide politiknya dari etika dan moral. Padahal bagi Kautilya, dalam hal berpolitik praktis, salah satunya mengatur negara, ia memaksa masyarakat atau orang yang bermoral untuk memantapkan moralitas yang bersumber dari agama demi dan untuk terwujudnya kepatuhan praktis dalam menjalankan aturan hidup bersama. Sekali lagi, Kautilya malah menempatkan moralitas atau budi pakerti luhur sebagai azas paling penting yang harus dimiliki seorang *swamin* atau penguasa.

Bagi Kautilya, menjadi *swamin* bukanlah perkara mudah, bahkan bisa menjadi sulit jika tidak sanggup memenuhi beberapa syarat yang diajukannya, antara lain *Abhigamika*

(mampu menarik simpati rakyatnya), *Pradnya* (arif dan bijaksana), *Utsaha* (kreatif dan inovatif), *Atma Sampad* (berbudi pakerti yang luhur), *Sakya Samanta* (menjadi pemimpin mampu mengontrol bawahannya) dan *Aksudra Parisatka* (mampu memimpin sidang dan menyimpulkannya).¹³ Selain sejumlah syarat itu, Kautilya juga mengajarkan untuk menegakkan kebenaran, terutama dalam rangka membuat kepatuhan warga negara kepada penguasa, seorang *swamin* harus menjauhkan diri dari perangkap moralitas. Ajarannya ini memang cenderung kejam, keji, kotor dan tidak berperikemanusiaan, tetapi itulah yang mau tidak mau harus dilakukan jika negara dalam ancaman dari orang-orang jahat. Untuk aspek ini pula, banyak pembaca enggan menggunakan strategi Kautilya yang seolah bernuansa horror.

Ajaran lain yang tak kalah pentingnya diberikan Kautilya kepada para *swamin* adalah gagasannya tentang *rajadharma* melalui pemerintahan sendiri (*swaraj*) dan bergantung pada penguasaan diri serta penaklukan diri (*atma samyana*). Kautilya menghadapi suatu konsepsi tentang jabatan raja yang disingkirkan dari noda absolutisme dan menyatakan bahwa hanya penguasa yang menguasai dirinya sendirilah yang akan dapat menguasai orang lain dalam waktu yang lama. Menurutnya, siapa saja yang menjadi raja walaupun wilayahnya membentang sampai ke ujung dunia, bila moralnya bejat dan indranya tidak dikuasai, maka ia pasti akan segera binasa.

Masih tentang *swami*, Kautilya mempersepsikan raja adalah arsitek *dharma* dan dengan itu seorang raja adalah *dharmapravartaka* yang secara terus menerus berada dalam pekerjaan yang benar, pelindung tatanan sosial, serta tugas dan fungsi raja adalah tugas dan fungsi negara. Pernyataan-pernyataan tersebut memang terkesan ekstrim, seekstrim dengan

¹³ Tentang hal ini, lihat lebih lengkap I Gusti Agung Oka, *Op.cit.*, hlm. 20.

menganjurkan raja untuk tinggal di gubuk bukan saja untuk mendekatkan dirinya dengan rakyat, tetapi juga agar dapat merasakan bahwa kebahagiaan rakyat adalah juga kebahagiaan raja, bukan sebaliknya. Kebahagiaan rakyat adalah kebahagiaan raja, kesejahteraan rakyat adalah kesejahteraan raja. Kesejahteraan raja bukanlah apa-apa yang diinginkan oleh raja, tetapi adalah apa yang menjadi kesukaan rakyat. Intinya, pemimpin harus mampu mencium bau keringat rakyat yang dipimpinnya hingga ke tingkat bawah, bukan rakyatnya dipaksa mencium wangi tubuhnya.

Sementara secara filosofis, gagasan politik Kautilya dapat digunakan para pemimpin atau penguasa untuk dipraktikkan melalui alat-alat negara. Oleh karena itu, membicarakan politik Kautilya juga harus membicarakan bagaimana pemimpin mempraktikkan gagasan itu, yang menurutnya ada empat bidang yang harus dilakukan negara, yaitu (1) melindungi negara yang obyek paling utamanya adalah masyarakat (*loka*), (2) memelihara kepatuhan kepada aturan, di mana *dharmā* menjadi alat paling utama untuk memelihara keteraturan, (3) memajukan kesejahteraan dengan membahagiakan rakyatnya, bukan dirinya sendiri, (4) menjaga kepatuhan terhadap hukum dan keadilan, dan (5) menjaga stabilitas perdamaian dengan konsep *mandala*.

Secara eksplisit, beberapa pernyataan menarik Kautilya yang ditransformasi ke dalam *Canakya Niti Sastra*, terutama tentang bagaimana para penguasa (raja) harus bertindak, antara lain:

1. *Sukhayasya mulam dharmah*: sumber kebahagiaan sejati adalah kalau orang kembali kepada *dharmā* (agama dan kewajiban) asli sang roh, yaitu melakukan pelayanan cinta kasih bhakti kepada Tuhan.
2. *Naikam cakram paribhramayati*: (kereta) tidak akan bisa bergerak dengan satu roda. Begitu juga kerajaan, tidak akan bisa berjalan kalau raja tanpa menteri, atau menteri tanpa raja.

3. *Apastu snehasanyuktam mitram*: yang disebut teman adalah dia yang tetap setia pada saat kita mengalami musibah atau kedukaan.
4. *Saktihino balavantamasrayet*: kalau merasa diri kurang kuat, bertemanlah atau bergabunglah dengan yang kuat, sehingga tidak akan ada kecemasan. Dengan cara ini, rasa percaya diri akan menjadi mantap.
5. *Priyamapyahitam na waktawyam*: jangan mengucapkan kata-kata manis dan menarik tetapi tidak mengandung kebaikan dan kebenaran.

Mempertegas pesan di atas, Kautilya dalam Arthashastra menyatakan beberapa pesan yang menarik lainnya, antara lain:

1. *Awasendriyascaturanto'pi raja sadyo winasyati*: raja yang tidak menguasai indriya-indriyanya, walaupun raja tersebut kuat dan sakti, pasti segera binasa.
2. *Dutamukha wai rajanah*: mata-mata adalah muka sang raja.
3. *Praja sukhe sukham rajnah, prajanam ca hita hitam, natma-priyam hitam rajnah, prajanam tu priyam hitam*: kebahagiaan rakyat adalah kebahagiaan raja. Kesejahteraan rakyat adalah kesejahteraan raja. Kesejahteraan raja bukanlah apa-apa yang diinginkan oleh raja, tetapi adalah apa yang menjadi kesukaan rakyat, itulah yang mensejahterakan raja.

Saripati pemikiran politik Kautilya dapat diambil dari beberapa buku yang ditulis oleh para penafsirnya, atau hasil terjemahan. Salah satu yang dianggap mewakili adalah Kautilya Arthashastra yang diterjemahkan Made Astana dan Anomdiputera,¹⁴

¹⁴ Dipilihnya buku ini sebagai rujukan utama bukan berarti buku lain tidak sebanding, tetapi buku ini sudah cukup mewakili buku sejenis yang telah ada karena penerjemah ini menggunakan dua buku utama lainnya sekaligus, *Kautilya's Arthashastra* dan *The Kautilya Arthashastra*. Buku-buku lain menjadi pendukung bahkan saya sangat terbantu oleh buku-buku tersebut, misalnya *Studies in Kautilya* yang diterjemahkan I Gde Sura. 2003. Denpasar UNHI. Buku ini bahkan kental sebagai perbandingan antara Kautilya dengan Machiavelli. Ada dua bab khusus yang bahkan secara khusus membahas aspek politik dari gagasan keduanya.

meskipun Kautilya juga diyakini pernah menulis banyak buku selain Arthashastra, seperti *Laghu Canakya*, *Wrddha Canakya*, *Canakya Niti*, dan *Canakya Sutra*. Penelusuran jejak pemikiran politik Hindu dalam Kautilya Arthashastra, yang menjadi pintu masuk buku ini, akan dibaca melalui bab ke bab. Setidaknya dalam Lima Belas Buku yang terbagi-bagi lagi ke dalam Bab dan 180 Bagian, pemikiran politik Kautilya cukup menghamparkan ide dimaksud. Tentu tidak semua bab dalam Kautilya Arthashastra merefleksikan jejak pemikiran politik Hindu karena kitab ini, sekali lagi, memiliki spektrum yang luas. Berikut ini, saya menganggap beberapa bab yang merefleksikan jejak pemikiran politik Hindu.

1. Buku Satu Mengenai Latihan

Pada bab ini, Kautilya memulai gagasannya tentang daftar ilmu-ilmu, di mana ilmu politik (*dandaniti*) menempati posisi yang sangat penting di antara ilmu-ilmu lainnya. Tema ini diawali pada Bab Lima Bagian 2 tentang Hubungan dengan Orang-Orang Tua dan secara tegas pada momor 8 disebutkan: "Setelah dilakukan inisiasi oleh guru pembimbing, ia harus belajar ketiga Weda dan *Anwiksiki* (filsafat) dari *Sistha* (guru yang berwenang), *Warta* (ilmu ekonomi) dari kepala pemerintahan (dan) *Dandaniti* (ilmu politik) dari *Waktriprayoktribhya* (orang yang tahu ilmu politik secara teori dan praktik)".

Pada Bab Delapan Bagian 4 tentang Pengangkatan Para Menteri. Bab ini semakin memperlihatkan dengan jelas bagaimana Kautilya menyetengahkan perdebatan dalam memilih dan mengangkat para Menteri, serta persoalan integritas dalam politik. Hal yang sama juga dapat dibaca pada Bab Sembilan Bagian 5 saat Kautilya menjelaskan tentang bagaimana tata cara dan mekanisme Pengangkatan Penasehat dan Pendeta. Puncaknya adalah pada Bab Sepuluh

Bagian 6, saat Kautilya memberikan apa yang disebutnya Penegasan tentang Integritas atau Tidak Adanya Integritas para Menteri dengan Cara Ujian Rahasia. Masih tentang integritas, Kautilya memberikan ujaran yang sama ketika mengangkat orang-orang yang akan bekerja dalam dinas rahasia (Bab Sebelas Bagian 7 tentang Pengangkatan Orang dalam Dinas Rahasia), yang dilanjutkan dengan membuat aturan kepada para petugas rahasia (Bab Dua Belas Bagian 8 tentang Peraturan untuk Petugas Rahasia). Pada Bab Enam Belas Bagian 13 Kautilya mulai memikirkan bagaimana mempersiapkan putra raja dengan segala aturan untuk menjaganya. Hal ini dilakukannya agar putra raja suatu saat akan siap menjadi raja dengan berbagai bekal, termasuk ilmu pengetahuan agama. Sementara pada Bab Sembilan Belas Bagian 16, Kautilya menyampaikan aturan apa saja yang boleh dan tidak dilakukan seorang raja. Tampak sekali, sejak awal Kautilya mulai memposisikan diri sebagai apa yang disebut Plato sebagai *The Philosopher King*. Hal yang sama dapat dibaca secara jelas mulai Bab ini hingga Bab Dua Puluh Satu Bagian 18.

Gagasan Kautilya di atas memperlihatkan bahwa desain dan *setting* dalam mempersiapkan negara, setiap detilnya mendapat perhatian yang serius, yang dimulai dari pemetaan dan percabangan berbagai disiplin ilmu. Kautilya memberanikan diri untuk memposisikan ilmu politik (*dandaniti*) secara tegas dan jelas dalam memahami persoalan-persoalan politik dan negara. Artinya, *dandaniti* menjadi aspek yang penting dalam mengelola dan melindungi bumi, di mana hasilnya diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak seluas-luasnya.

Perencanaan bagaimana negara akan dikelola dan modal apa yang harus dimiliki seorang penguasa atau pemimpin menjadi penting untuk diuraikan di sini. Jika merujuk pada

pendapat ahli politik, salah satunya misalnya tentang distribusi barang-barang dalam sebuah masyarakat, maka ilmu politik akan memusatkan perhatiannya pada aturan atau prinsip bagaimana menentukan distribusi barang-barang tersebut, bukan tentang “bagaimana properti itu didistribusikan”, tetapi “distribusi properti apa yang adil dan *fair*”. Begitu juga halnya politik tidak akan mempersoalkan “hak dan kebebasan apa yang sesungguhnya dimiliki rakyat” tetapi sebaliknya, “hak dan kebebasan apa yang seharusnya dimiliki rakyat”. Dua pandangan ini memperlihatkan ada pembagian antara studi normatif dan studi deskriptif yang ternyata tidak selalu sejelas seperti yang mungkin disangka banyak orang karena masalah perilaku manusia seringkali berada di antara dua titik pembagian deskriptif dan normatif. Dengan demikian, apa yang digagas Kautilya di awal bab ini merefleksikan tentang studi normatif, di mana negara harus dikelola dengan baik dan benar serta sesuai perencanaan yang matang.

2. Buku Ke Ketujuh tentang Enam Kebijakan Politik

Pada bab ini secara eksplisit, Kautilya menyampaikan bagaimana menyusun perhitungan enam kebijakan (Bab Satu Bagian 98) dan Penentuan (Kebijakan) Kemunduran, Keadaan Stabil dan Kemajuan (Bab Satu Bagian 99). Sebetulnya Enam Kebijakan Politik Kautilya dapat dibaca mulai Bagian 98 hingga Bab Delapan Belas Bagian 126. Namun secara berturut-turut kita dapat memahami sikap politik Kautilya dalam Bab Tiga Bagian 101 tentang bagaimana Mentaati Kebijakan oleh (Raja) yang Sama, yang Lebih Lemah dan Lebih Kuat.

Lalu, bagaimana Kautilya memandang perang? Pandangannya tentang perang disampaikan pada Bab Empat Bagian 103 Berdiam Diri Setelah Berperang, Bagian 104 Berdiam Diri Setelah Berdamai, Bagian 105 Bergerak Setelah

Berperang, Bagian 106 Bergerak Setelah Berdamai dan Bagian 107 Bergerak Bersama (raja-raja lain). Bagi Kautilya, perang adalah sebuah pergulatan, sehingga harus diatur sedemikian rupa, kapan harus melakukan apa dan kapan melakukan refleksi dan kontemplasi. Sementara pada Bab Enam Belas Bagian 121, Kautilya menyam-paikan bagaimana seharusnya menunjukkan Sikap yang (Tepat) bagi Raja yang Menundukkan (Raja lain) dengan kekuatan. Pandangannya ini dapat dikatakan sebagai buah refleksi perjuangannya ketika menghadapi musuh-musuhnya, dan perjalanan karir politiknya yang mengalami jatuh bangun.

Pada buku Ketujuh dalam kitab Arthashastra ini, Kautilya mengawalinya dengan menyampaikan enam kebijakan politik yang dapat menjadi dasar pembentuk negara (*prakerti mandala*), di antaranya (1) memasuki perjanjian adalah perdamaian, (2) melukai adalah sebuah perang, (3) tetap tidak memihak adalah tinggal diam/netral, (4) meningkatkan (kekuatan) adalah siaga, (5) menyerah pada orang lain adalah aliansi, dan (5) mengadakan perdamaian (dengan yang satu) tetapi berperang (dengan yang lain) adalah kebijakan ganda. Enam kebijakan politik ini menjadi refleksi pemikiran politik Kautilya yang berada pada dua kutub di mana perang bisa kapan saja dilakukan tetapi yang terpenting bagaimana menjamin dan menjalankan sebuah perdamaian.

3. Buku Lima Belas tentang Metode Ilmu

Mengakhiri buku ini, Kautilya sekali lagi menyimpulkan bahwa sumber kehidupan umat manusia adalah *artha* (kesejahteraan), yakni bumi dan segala isinya yang dihuni manusia. Sedangkan ilmu yang mencakup cara untuk memperoleh hasil dan melindungi bumi adalah Arthashastra (ilmu politik). Dalam bab terakhir ini, Kautilya menegaskan bahwa ilmu-ilmu lain dan cara-cara pengelolaan administrasi,

perang, dan pengelolaan sumber daya yang terdapat dalam buku ini, tidak bisa dilepaskan dari ilmu politik, dan dapat dikatakan sebagai bagian dari ilmu politik itu sendiri. Tampaknya, Kautilya berhasil membuat jalinan pemikiran yang sejak awal dikatakannya sebagai keterkaitan antarilmu dan diakhiri dengan kesimpulan tentang alat yang dipakai dalam (olah) ilmu itu sendiri.

Pada poin 3 dalam Bab Satu Bagian 180 menggambarkan gagasan utuh Kautilya tentang bangunan ilmu politik, termasuk permainan logika dan silogisme serta analogi-analogi. Misalnya, pada poin 4. Objek, tentang pernyataan apa yang dibuat, adalah topik. Pada poin 5 dijelaskan, di mana (uraian) tunggal ini tentang ilmu politik disusun sebagian besar dengan menghimpun (ajaran) sebanyak uraian tentang ilmu politik yang telah disusun oleh para guru kuno untuk memperoleh dan melindungi bumi. Silogisme seperti ini dalam mengurai gagasan sistem politik yang dapat dibaca pada poin-poin selanjutnya. *Pertama*, pada Bab VI yang khusus memperlihatkan bagaimana Kautilya dan Machiavelli menggagas istilah "*The Prince*" dalam sistem politik di antara mereka. *Kedua*, pada Bab VII, Kautilya menggagas istilah *swamin* yang dalam sistem politik praktisnya diaktualisasikan secara gemilang oleh Candragupta. Sementara aspek lain yang dibahas namun lebih dekat dengan konsep negara, Kautilya menyampaikannya pada Bab VIII tentang Prinsip-prinsip Kemahakuasaan dan Bab XII saat Kautilya membahas beberapa aspek masyarakat Arthasastra. Apa dan bagaimana tafsir dan atau refleksi jejak pemikiran politik Hindu dalam kitab ini, akan diuraikan secara cair dan diaktis pada bab-bab selanjutnya [*]

BAB TIGA

SEJARAH POLITIK HINDU DAN REFLEKSINYA DALAM ARTHASASTRA

“Bagi seorang raja, sumpah (sucinya) adalah kesediaannya untuk bekerja, pengorbanan dalam urusan pemerintahan adalah pengorbanan sucinya, imbalan dari pengorbanannya adalah sikap yang adil, (dan) inisiasi pengorbanan baginya adalah pentasbihannya. Kebahagiaan rakyatnya adalah letak kebahagiaan raja, dan apa yang bermanfaat bagi rakyatnya juga bermanfaat bagi dirinya sendiri. Apa yang berharga bagi dirinya sendiri belum tentu bagi negara, tetapi apa yang berharga bagi rakyatnya adalah bermanfaat bagi dirinya” (Arthasastra Buku Pertama, Bab Sembilan Belas, Bagian 16: 33-34)

A. Pembabakan Sejarah Politik Hindu

Politik Hindu, baik sebagai bagian dari ilmu politik maupun sebagai nilai yang sebenarnya telah dipraktikkan dalam hidup, tidak hadir begitu saja. Memang menempatkan politik Hindu *an sich* ilmu politik sebagaimana ilmuwan politik modern mendefinisikannya, maka politik Hindu tidak akan persis sama dengan ilmu politik modern. Dalam buku ini, saya tidak akan membuat adagium ilmu politik modern *vis-à-vis* politik Hindu, namun *implicit meaning* yang terdapat dalam kitab Arthasastra sebagai refleksi politik Hindu dalam bab tersendiri. Oleh karena itu, pada bab ini saya akan memulainya dengan pembabakan

politik Hindu, dan mengapa Arthashastra sebagai representasi untuk maksud ini.

Namun membicarakan politik, sebenarnya pula kita akan membicarakan kekuasaan secara bolak balik, keduanya (politik dan kekuasaan) menjadi satu tema yang sekiranya dibahas secara bersamaan. Hal ini karena secara konseptual, konsep kekuasaan dalam ilmu politik tidak dapat dilepaskan dari peranan besar sosiologi, yang terutama karena membahas kekuasaan dalam konteks relasi dan interaksi sosial. Para ahli tampaknya sepakat dengan kesimpulan bahwa konsep kekuasaan memiliki banyak segi dan aspek yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, konsep kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari mengandung ragam dimensi lainnya, seperti wewenang, legitimasi, kedaulatan, kepentingan, hingga pengaruh. Dalam bab ini, saya hanya akan memaparkan bagaimana lintasan sejarah yang dilalui politik Hindu dan kekuasaan yang baik ditemukan dalam keseharian maupun akibat silang pengaruh dari satu kerajaan dengan kerajaan lainnya.

1 Periode Weda (2000-600 SM): dari lembah sungai Sindhu hingga kecamuk Bharatayuda

Untuk memetakan politik Hindu, meskipun tidak akan pernah tuntas, dapat dilakukan dengan melakukan perjalanan jauh ke masa lalu. Nanang Sutrisno meresumensinya dengan cukup rapih,¹⁵ dengan pertama-tama mengajak kita untuk sejenak menyelami romantisme sejarah awal mula peradaban Hindu, termasuk pergulatan politik di dalamnya, mulai dari lembah sungai Sindhu. Berdasarkan

¹⁵Nanang Sutrisno. "Sejarah Politik Hindu" dalam I Nyoman Yoga Segara (ed). 2019. *Politik Hindu. Sejarah, Moral dan Proyeksinya*. Denpasar: IHDN Press, hlm 1-12. Sebagian besar isi dalam bab ini, dan beberapa bab lainnya, diadaptasi maupun disarikan dari buku monograf ini.

hasil bacaannyayang cukup memadai dari beberapa ahli, Sutrisno memaparkan bahwa lembah ini adalah petunjuk mahapenting untuk mengetahui sejauhmana kemajuan suku Drawida, suku bangsa pribumi India dalam rentang tahun 3000-2000 SM. Beberapa bukti cukup mengesankan untuk menunjukkan peradaban Hindu yang terhampar saat daerah Harappa dan Mohenjodaro digali. Temuan dari reruntuhan bekas kota dinyatakan sudah tertata, teknologi peralatan hidup juga sudah digunakan, dan artefak-artefak bernuansa religius banyak ditemukan. Sayangnya memang, belum ditemukan keterangan tentang seperti apa politik bangsa Drawida. Kabar baiknya adalah gambaran awal tentang aktivitas politik masyarakat India, pertama-tama ditemukan dalam Catur Weda Samhita. Kitab ini menjadi satu peta jalan untuk memasuki kebudayaan dan keagamaan bangsa Arya yang saat itu diyakini telah berkembang antara 2000-1000 SM. Lalu petunjuk lain untuk menjelaskan politik Hindu, terutama periode Weda awal dapat ditemukan dalam kitab Rgweda Samhita, meskipun lagi-lagi, informasi tersebut agak tumpang tindih dengan munculnya berbagai kepercayaan, mitos, dan petunjuk keagamaan lainnya.

Salah satu catatan penting soal politik Hindu dapat dibaca dalam Rgweda VII.18, 33, 83, yang menjelaskan bahwa telah terjadi perang antara Sudasa melawan aliansi sepuluh raja (*dasarajna yuddha*). Tentang Sudasa ini, para ahli sejarah agak berbeda pendapat, misalnya muncul pertanyaan “apakah Sudasa berasal dari klan Bharata atau Tritsu?”. Dari peristiwa perang itu, para sejarawan mengemukakan beberapa hipotesisnya, antara lain *pertama*, perang ini berlangsung di wilayah barat laut Doab terkait migrasi suku Bharata. Terdapat pola yang sistematis untuk menguasai wilayah ini dengan mendorong penduduk asli

ke wilayah pinggiran. Dengan begini, pusat kota akan mudah dikuasai. *Kedua*, perang ini cenderung sebagai perang antarsuku tinimbang perang antarnegara karena istilah "*rajan*" lebih sebagai jabatan kepala suku, bukan raja. *Ketiga*, terdapat indikasi awal untuk menyebut adanya sistem monarki *rajarshi*, misalnya Sudasa yang dihubungkan dengan Maharshi Wasistha dan Wishwamitra sebagai *purohita*. *Keempat*, nama Bharatawarsa (tanah kaum Bharata) sebagai wilayah India Kuno telah menegaskan dominasi klan Bharata setelah berhasil menaklukkan 10 klan yang lainnya. Penaklukan ini selain berdampak besar pada perluasan wilayah kekuasaan Bharata, juga makin memperlihatkan supremasi Bharata atas klan-klan lainnya.

Selanjutnya, klan Bharata melakukan aliansi, tepatnya mungkin koalisi dengan klan Puru untuk membentuk dinasti Kuru. Tidak hanya itu, kalau Bharata juga menggandeng klan Pancala dalam menjalankan pemerintahan di sekitar lembah sungai Gangga dan Yamuna. Dapat dikatakan, dinasti Kuru-Pancala adalah penguasa tunggal Bharatawarsa (India Kuno) pada periode Weda Pertengahan sekira 1200-900 SM. Bukti kuat berkuasanya dinasti Kuru adalah ketika mereka sukses melakukan semacam reorganisasi sosial, kalau tidak disebut transformasi besar yang pernah terjadi pada zaman Rgweda Kuno dari masyarakat tribal menuju negara monarki. Itulah sebabnya, daerah Kuru dicap sebagai negara pertama di India. Alasan kuat ini didukung pernyataan dalam Yajurweda dan sejumlah teks Brahmana bahwa kondisi sosial politik bangsa Arya pada saat itu telah begitu mapan sehingga ritual-ritual keagamaan mulai tingkat keluarga (*grihya*) hingga kenegaraan (*sautra*), misalnya Aswamedha, Wajapeya, dan Rajasuya berhasil dilaksanakan.

Dus, Kitab Catur Weda Samhita, Brahmana, dan Upanisad juga menyebut Parikshit, dan penggantinya kelak, Janamejaya sebagai raja dinasti Kuru paling populer. Bahkan nama Parikshit setidaknya ditemukan dalam Atharwaweda Samhita, XX. 127.7-10, sebagai raja wilayah Kuru yang berhasil menciptakan kemakmuran dan kedamaian. Sedangkan Mahabharata I.109.1, menyebutkan bahwa kekuasaan Raja Kuru telah mencakup wilayah di sekitar lembah sungai Gangga dan Saraswati. Wilayah kekuasaan Kuru dibagi tiga bagian, yaitu Kurujangala, Kuru, dan Kurukshetra. Batas wilayah Kurukshetra disebutkan jelas dalam Taittiriya Aranyaka, yaitu Kandhawa di bagian selatan, Turghana (utara), dan Parinah (barat), sedangkan ibukotanya berada di Asandiwant.

Setelah Parikshit mangkat, Janamejaya meneruskan kejayaan dinasti Kuru yang penobatannya telah dimuat dalam Teks Aitareya Brahmana VIII.21. Dijelaskan dalam kitab ini bahwa Tura Kawaseya adalah maharsi yang menobatkan Janamejaya melalui sebuah Aindra Mahabhiseka atau inisiasi Indra. Keharuman Janamejaya juga disebut dalam Satapatha Brahmana XIII, 5.4.3 yang benerangkan bahwa Janamejaya dan tiga saudaranya, yaitu Bhimasena, Ugrasena, serta Sruhasena telah berhasil menyelenggarakan upacara Aswamedha dan Brahmahatya. Kedua upacara ini adalah ritual penebusan dosa-dosa leluhur atas pembunuhan para Brahmana. Tentang sepak terjang gemilang Janamejaya banyak diceritakan dalam Mahabharata, terutama saat menceritakan kisah leluhur Janamejaya, yaitu wangsa Bharata yang terdiri dari Pandawa dan Kaurawa. Meski demikian, kebenaran sejarah yang diceritakan dalam Mahabharata masih belum sepenuhnya meyakinkan para sejarawan dan para indolog.

Adapun temuan arkeologi yang dikaitkan dan disebut-sebut dalam Mahabharata adalah *Painted Grey Ware* (PGW), yaitu Hastinapura, Indraprastha, Ahicchatra, dan Kausambi. Atas temuan itu, disusun hipotesis untuk menyatakan bahwa temuan ini sezaman dengan era Mahabharata sekira 1100 SM. Namun, temuan *Ochre Coloured Pottery* (OCP) di Sanauli, Barnawa, dan Chandayana, Uttar Pradesh memberikan hipotesis berbeda. OCP diperkirakan berasal dari tahun 2000-1800 SM atau zaman Harappa akhir sehingga temuan kereta dan persenjataan perang di wilayah tersebut memberikan semangat baru untuk membangun hipotesis baru bahwa kisah Mahabharata ada sekira milenium ke-2 SM atau sejaman dengan periode Weda Awal. Seturut dengan asumsi bahwa kereta dan persenjataan perang yang ditemukan itu lebih menyerupai gambaran dalam perang Bharatayuddha. Kendati begitu, para sejarawan yang lain tetap meragukan kesamaan antara Dasarajna Yuddha dan Bharatayudha, yang itu berarti, temuan OCP diperkirakan sebagai peninggalan bangsa Arya dari zaman Rgweda awal, bukan pada zaman Mahabharata.

Adapun masa-masa sandyakalaning dinasti Kuru seperti dikisahkan dalam Mahabharata juga diperkirakan memiliki relasi historis dengan makin melemahnya pengaruh kekuasaan para penerus Janamejaya. Misalnya, dinasti Kuru dikatakan hanya memainkan peran politik yang tak begitu berarti dalam sejarah India Kuno pada zaman Weda Akhir, tak sebanding dengan kejayaannya di masa sebelumnya. Figur yang muncul setelah era ini adalah Janaka, raja Wideha yang dalam Satapatha Brahmana V. 1.1.13 dan Aitareya Brahmana VIII.14 disebut sebagai *Samraj*. Era Janaka berjarak sekira 5 hingga 6 generasi atau antara 150-200 tahun dengan era Janamejaya atau diperkirakan berlangsung antara tahun 900–700 SM. Maharaja Janaka dikisahkan

dalam Itihasa Ramayana sebagai ayah dari Dewi Sita, meskipun lagi-lagi, aspek historisnya masih perlu dikaji lebih lanjut. Selain Wideha, masih terdapat sembilan negara berdaulat lainnya di India bagian utara, yaitu Gandhara, Kekaya, Madra, Usinara, Matsya, Kuru, Pancala, Kasi, dan Kosala.

Memasuki abad ke-6 SM, sejarah politik India Kuno mengalami masa kegelapan setelah melemahnya cengkeraman kuku monarki Wideha-Janaka. Kemunculan negara-negara berdaulat "Mahajanapada" di wilayah India Kuno dianggap sebagai tanda bahwa negara-negara tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan *Samraj*, sebagaimana dicantumkan dalam teks Buddha, Anguttara Nikaya. Teks ini menyebutkan sekurangnya ada 16 negara (*solasa mahajanapada*), yaitu Kasi, Kosala, Anga, Magadha, Wajji, Malla, Chetiya (Chedi), Wamsa (Watsa), Kuru, Panchala, Surasena, Assaka, Awanti Machchha (Matsya), Gandhara, dan Kamboja. Catatan yang liyan ditemukan dalam teks Jaina, Bhagawati Sutra, yang menyebut Kasi, Kosala, Bajji (Wajji), Anga, Magaha (Magadha), Malawa, Moli, Malaya, Achchha, Banga, Ladha (Radha), Wachchha (Watsa), Kochchha, Sambhuttara, Awaha, dan Padha (Pandya) sebagai negara yang terdaftar sebagai Mahajanapada.

Dari negara-negara yang terdaftar sebagai Mahajanapada dijelaskan bahwa Kasi, Kosala, Anga, Magadha, dan Wajji adalah nama negara yang sama-sama disebutkan dalam teks Anguttara Nikaya dan Bhagawati Sutra. Sedangkan Malawa diidentikkan dengan Awati dan Moli dengan Malla. Sehingga dapat diprediksi bahwa teks Anguttara Nikaya ditulis lebih dulu daripada Bhagawati Sutra sehingga ada beberapa negara dalam Anggurata Nikaya yang tidak disebutkan lagi dalam Bhagawati Sutra. Para ahli menyebut, negara-negara tersebut mungkin telah

hilang pengaruhnya, mungkin juga runtuh pada saat Bhagawati Sutra ditulis. Berkebalikan dengan ini, Bhagawati Sutra menyebut sejumlah nama untuk negara baru yang tidak semuanya berada di wilayah India Utara, namun juga datang dari India bagian selatan dan timur jauh. Lepas dari beragam hipotesis tersebut, dapat dipahami bahwa Mahajanapada menjadi gambaran peta politik India Kuno pada periode Weda akhir (sekitar 600 SM), yang pada saat bersamaan dengan itu, agama Buddha dan Jaina mulai memiliki pengaruh yang luas di India.

2. Periode Kemunduran (543 SM-185 SM): terang dan gelap kerajaan Magadha.

Akhir era Mahajanapada diperkirakan sekira abad ke-6 SM yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan hampir semua kerajaan yang digantikan dengan munculnya imperium Magadha yang ditasbihkan sebagai kerajaan terbesar di India Kuno. Awalnya, kerajaan Magadha hanyalah satu dari *solasa mahajanapada* Mahajana pada yang wilayah kekuasaannya tercatat berada di sekitar Bihar, bagian selatan Gangga dengan Rajagriha sebagai ibukotanya. Selain Magadha, sebenarnya masih ada tiga negara berdaulat lainnya, yaitu Kosala, Watsa, dan Awanti namun tidak mampu menandingi kemegahan Magadha. Selain itu, juga lahir beberapa republik oligarki kecil lainnya yang didirikan oleh klan non Arya, yaitu Sakya di Kapilawastu, Koliya di Ramagama, Bhagga di bukit Susumara, Buli di Allakappa, Kallama di Kesaputta, Moriya di Phippalivana, dan Yakka di Alawaka yang didirikan oleh klan non-Arya.

Magadha didirikan oleh Bimbisara atau juga dikenal sebagai Srenika atau Seniya yang berasal dari dinasti Haryanka. Teks Mahawamsa menyebutkan bahwa Bimbisara dinobatkan pada usia 15 tahun oleh ayahnya (Bhattiya) dan memerintah Magadha selama 52 tahun (546-494 SM). Ikhtwal pembentukan imperium Magadha diawali dengan perkawinan Bimbisara dengan anggota keluarga penguasa Madra, Kosala, dan Waisali. Perkawinan ini melapangkan jalan Bimbisara untuk memperlebar wilayah kekuasaannya melalui ekspansi ke India bagian barat dan utara. Melalui gerakan ekspansi politiknya itu, Bimbisara sukses menguasai wilayah Anga dan sebagian wilayah Kasi. Disebutkan juga bahwa Magadha berhasil menguasai daerah Bihar hingga Benggal setelah menundukkan Bajji dan Anga. Dalam keterangan yang diperoleh dalam teks Mahawagga, wilayah kekuasaan Bimbisara dikatakan mencapai 80.000 kota.

Setelah Bimbisara, Kunika Ajatashatru, putranya sendiri hasil perkawinannya dengan Kosala berkuasa penuh di Magadha. Kunika Ajatashatru memerintah antara tahun 494-462 SM. Yang mengejutkan adalah beberapa catatan dalam teks Buddha menyebutkan bahwa Kunika Ajatashatru malah membunuh sang ayah, Bimbisara dan permaisuri Kosala melakukan bunuh diri (*sati*) demi cintanya pada Bimbisara. Alhasil, pemerintahan Kunika Ajatashatru banyak diwarnai konflik dan beberapa peperangan. Merujuk pada sejumlah teks Buddha dan Jaina diketahui bahwa Kunika Ajatashatru berperang melawan raja Pasanedi, penguasa Kosala yang menarik kembali pemberian sebagian wilayah Kasi (pada era Bimbisara) setelah saudara perempuannya (permaisuri Bimbisara) meninggal. Kunika Ajatashatru juga diceritakan berperang melawan raja Cethaka-Waisali karena

pelanggaran perjanjian terhadap wilayah Licchawi yang memiliki kekayaan berupa tambang permata.

Penerus Kunika Ajathashatru adalah Udayin atau Udayibhaddha. Teks Parisishtaparvan memberi petunjuk penting bahwa pada tahun keempat kekuasaannya, Udayin berhasil membangun ibukota baru di Pataliputra. Pemindahan kekuasaan dari Bihar (Rajagriha) ke Pataliputra ini diperkirakan akibat penyerangan Pradyota, raja Awanti, yang sejak masa Kunika Ajatashatru adalah musuh utama Magadha. Secara berturut-turut, pemerintah Udayin berlangsung antara tahun 462-446 SM, dilanjutkan Arunadha dan Munda (446-438 SM), kemudian Nagadasaka (438-414 SM) yang sekaligus menandai peralihan dari dinasti Hiranya ke dinasti Shishunaga. Dinasti Shishunaga memerintah Magadha dari tahun 414 SM hingga 346 SM lalu diteruskan oleh dinasti Nanda.

Pada masa selanjutnya, kerajaan Magadha diperintah dinasti Maurya yang berhasil menaklukkan kekuasaan dinasti Nanda. Chandragupta Maurya menjadi raja pertama (322 SM) dan memperluas wilayah kekuasaannya ke barat melintasi India tengah dan barat, serta menundukkan provinsi yang ditinggalkan Alexander Agung. Dan pada 317 SM, Chandragupta Maurya berhasil menduduki sepenuhnya daerah barat laut India. Keberhasilan Chandragupta Maurya tersebut tidak lepas dari peran besar Maharsi Kautilya, seorang Brahmana dari Takshashila yang menjadi penasihat sekaligus ahli strateginya. Pada masa inilah, para pendeta atau Brahmana Hindu kembali mendapatkan kehormatannya dan menduduki sejumlah posisi penting dalam struktur pemerintahan. Pemerintahan Chandragupta Maurya berlangsung antara 322-298 SM, lalu

dilanjutkan Bindhusara (298-272 SM) dan Ashoka (272-232 SM). Sepeninggal Ashoka, kekuasaan dinasti Maurya dianggap telah melemah meski masih ada beberapa raja yang tercatat dari dinasti Maurya, yaitu Dasaratha (232-224 SM), Samprati (224-215 SM), Shalisuka (212-202 SM), Dewawarman (195-187 SM), dan Brihaddatha (187-185 SM).

Dapat dikatakan, sisi gelap akhir Magadha sebagai era kemunduran politik Hindu karena para penguasanya tidak lagi mempraktikkan ajaran-ajaran Hindu dengan taat. Saat mengalami sandyakalaning inilah menjadi masa kejayaan agama Buddha dan Jaina pada sisi yang lain. Secara politik, ironisnya raja-raja Magadha mulai memperlihatkan sikap anti Hindu (Brahmanisme), misalnya dengan melarang seluruh upacara yadnya menggunakan binatang sebagai kurban. Akhirnya, pada era kekuasaan dinasti Maurya hampir semua raja Magadha dikaitkan dengan agama Buddha dan Jaina. Kenyataan ini ditemukan dalam teks Buddha yang mengklaim bahwa Bimbisara telah mencapai tingkatan pencerahan dalam ajaran Buddha atau *Sotappana*. Di lain pihak, teks-teks Jaina juga menyebut Bimbisara sebagai pengikut Jaina dan setelah kematiannya terlahir kembali sebagai *Mahapadma (Padmanabha)*, yaitu salah seorang *thirtankara* masa depan. Hal yang sama juga dikaitkan dengan Ashoka yang diyakini memiliki jasa paling besar dalam penyebaran agama Buddha, terutama di Asia Tengah dan Asia Selatan. Namun demikian, pada era Maurya inilah umat Hindu diberikan ruang yang luas untuk mempraktikkan agamanya, misalnya membangun kuil-kuil Hindu. Keleluasaan ini terjadi karena pengaruh Maharsi Kautilya dalam kebijakan politik dinasti Maurya, sebagaimana yang disampaikan dalam Arthasastra.

3. Periode Kebangkitan (300 SM-700 M): ritual Hindu, kesultanan Islam, dan politik modern

Setelah mengalami kemunduran yang telak, politik Hindu mulai bangkit yang ditandai munculnya sosok Pusyamitra Shunga, seorang Brahmana yang berhasil menggulingkan kekuasaan Bhrihaddatha Maurya pada 185 SM. Sosok Pusyamitra Shunga dan kiprahnya tercatat dalam kitab Harshacarita yang menceritakan bahwa pada saat raja Brihaddatha sedang mengadakan inspeksi pasukan dalam sebuah parade, ia dibunuh oleh Pushyamitra, *senani* atau *senapati* perang kerajaan Magadha. Setelah peristiwa itu, Pusyamitra Shunga merebut kerajaan Magadha dari Maurya dan mendirikan dinasti Brahmana bernama Shunga. Sejatinya, wilayah kekuasaan Magada di bawah dinasti Sunga meliputi beberapa bagian, yaitu bagian tengah kerajaan Magadha (Maurya) lama, dan pusat kota Ayodhya di India bagian tengah-utara. Cakupan wilayah kekuasaan ini tertulis dalam prasasti Dhanadewa-Ayodhya. Dapat dikatakan, Pushyamitra Sungha memiliki peran signifikan dalam kebangkitan kembali politik Hindu di Magadha, khususnya dalam sikap dan kebijakan politiknya terhadap agama Buddha yang hampir selama 300 tahun menguasai India.

Adapun sosok Pushyamitra Sungha, banyak disebut-sebut kitab agama Buddha dan catatan Taranatha, sejarawan Buddha yang berasal dari Tibet yang diperkirakan hidup sekitar abad ke-16 masehi. Kitab Buddha dan Taranatha menyatakan bahwa Pushyamitra Sungha adalah raja Brahmana yang kejam. Pushyamitra Sungha bahkan disebut sebagai orang yang tidak percaya dengan ajaran-ajaran Sang Buddha, dan dia sendiri diyakini sebagai pemimpin dalam penyerangan dengan membakar Wihara dan

menghancurkannya, serta membunuh para Bhikku. Pernyataan ini dikuatkan oleh kitab Buddha lainnya, salah satunya kitab Diwyawadana.

Namun citra Pushyamitra Sungha juga mengagumkan. Ia dipandang sebagai Brahmana yang sangat gigih dalam melindungi, mempertahankan, dan menyebarkan kembali agama Brahmana. Ia pula menjadi pioneer untuk mendobrak dan memusnahkan pengaruh agama Buddha di India. Pada masa kekuasaannya inilah ia menghidupkan kembali kejayaan agama Brahmana dengan melaksanakan kembali kurban binatang (*pasuyajna*) yang sebelumnya sempat dilarang keras oleh Ashoka. Dilaksanakannya kembali ritual keagamaan Hindu, seperti Aswamedhayadnya dalam pemerintahan Pushyamitra Sungha juga disebutkan dalam prasasti Ayodya. Bersamaan dengan itu juga, sejumlah mazhab Hindu mulai bermunculan, terutama yang paling penting dan berpengaruh mazhab Shaiwa dan Waishnawa. Kedua mazhab ini berperan besar memudahkan pengaruh agama Buddha di India.

Secara berturut-turut, dan menurut silsilahnya, Pushyamitra Sungha memerintah Magadha dari tahun 185 SM hingga 159 SM. Selanjutnya diteruskan oleh Agnimitra (149-141 SM), Wasujyesta (141-131 SM), Wasumitra (131-124 SM), Bhadraka (124-122 SM), Pulindaka (122-119 SM), Ghoshawasu (119-108 SM), Wajramitra (108-94 SM), Bhagabhadra (94-83 SM), dan Dewabhuti (83-73 SM). Setelah kekuasaan dinasti Sungha berakhir, kerajaan Magadha dikuasai oleh dinasti Kanwa antara 73 SM hingga 30 SM, yang kemudian ditaklukan oleh dinasti Saliwahana. Tanda dan bukti epigrafis dan numismatik telah menguatkan dugaan bahwa setelah dinasti Saliwahana, hegemoni dan

dominasi kerajaan Magadha telah berakhir dan muncul kerajaan baru di bawah dinasti Mitra dari Kausambhi dari abad ke-1 SM hingga abad ke-3 M. Periode ini dapat dikatakan sebagai lenyapnya imperium Magadha di India.

Baru setelah abad ke-3 M, mulai muncul beberapa negara baru di India. Misalnya, Dinasti Kushana menguasai sebagian besar wilayah Srilanka pada abad ke-4 M, atau dalam sejarah Buddhisme disebut sebagai "Ashoka kedua". Kemudian muncul juga era "Gupta kedua" yang dipimpin Chandragupta, Samudragupta I, dan Samudragupta II antara abad ke-4 hingga ke-7 M. Periode Gupta inilah dianggap sebagai periode akhir Hindu klasik. Setidaknya, dari abad ke-7 hingga ke-10 telah terdapat tiga dinasti yang menguasai India Barat, yaitu Gurjara Pratihara di Malwa, Pala di Bengal, dan Rasthrakuta di Deccan. Pada masa ini, Muhammad bin Qasim juga telah melakukan invasi ke wilayah Sindh (711 M). Setelah abad ke-13, India akhirnya dikuasai kesultanan Islam yang berpusat di Delhi hingga abad ke-16 M. Salah satu kerajaan Hindu yang muncul pada periode ini adalah Wijayanagar di India Selatan (1333 M). Setelah berkuasanya kesultanan Islam, India memasuki imperialisme Eropa dan dikuasai kerajaan Inggris (1858-1947 M). Pascakemerdekaan India pada 15 Agustus 1947, India sudah memasuki periode sejarah politik modern.

B. Arthasastra: Pesan Politik Kepada Penguasa Negara

Arthasastra yang disusun Kautilya banyak mengambil bahan baku dari literatur politik Hindu kuno, tradisi politik, dan pengalaman hidupnya. Menurut Sil (dalam Avalokitesvari),¹⁶

¹⁶ Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari. "Canakya Arthasastra: Warisan Politik Kenegaraan Hindu" dalam I Nyoman Yoga Segara (ed). 2019. *Politik Hindu. Sejarah, Moral dan Proyeksinya*. Denpasar: IHDN Press, hlm. 19-24

Arthashastra diartikan sebagai sastra (*science*) of *artha* (*wealth or territory with human population*). Namun Arthashastra bukan hanya tentang “*the science of wealth*” tetapi juga “*political science*” atau “*the science of government*”. Oleh karena itu Kautilya secara khusus juga menulis tentang pemimpin, moral politik yang dijelaskannya sebagai *rajanitisastra* atau *rajanitisamuccaya*.

Avalokitesvari secara rinci menjelaskan bahwa kitab Arthashastra terdiri dari 32 bagian, 15 adikarana (buku) dengan 150 bab, 180 Prakarana (bagian yang ditujukan untuk topik tertentu) dan 6000 sloka. Berdasarkan data ini, tidak keliru Arthashastra dianggap sebagai kompendium lengkap atau sebuah risalah mengenai tata pemerintahan sebuah negara. Risalah yang sangat komprehensif ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan masalah serta fungsi-fungsi yang dibutuhkan pada administrasi dalam negeri sekaligus hubungan luar negeri sebuah negara. Kompendium ini memberikan pendidikan kepada penguasa negara tentang cara untuk mencapai tujuan nasional negara seperti perluasan pengaruh dari kerajaannya. Kompendium ini tidak hanya luas, namun juga terperinci. Bagaikan sebuah panduan praktis yang tak terlalu mengikat dan baku untuk dapat menghadapi kondisi lingkungan strategis yang selalu berubah-ubah dari sebuah negara. Tidak keliru juga, banyak ahli membandingnya dengan pemikir hebat pada masanya, sebut saja Plato, Aristoteles, dan Machiavelli.

Menurut Kautilya, seorang raja atau pemimpin negara harus berupaya mengakumulasi kekuatan negaranya untuk menjadi yang terkuat, dengan maksud agar negara aman dari serangan negara lain. Kitab Arthashastra hadir sebagai jawaban atas kondisi umum sistem internasional yang bersifat anarki yang memperlihatkan tanpa supremasi yang lebih tinggi dari negara. Keadaan ini diperparah dengan nirkesepakatan terhadap

penghormatan atas kedaulatan dan batas teritori suatu negara, selainya yang sedang menjadi tren dimasa modern saat ini. Padahal pada masa dinasti Candragupta misalnya, sistem yang ada telah sanggup mengembangkan realisme. Pandangan ini mengedepankan *self-help*, yaitu sebuah upaya negara untuk terus mengakumulasi kekuatan-kekuatan itu agar keberlangsungan negara tetap terjaga.

Secara *mainstream*, ada dua arus utama pandangan yang berkembang dalam antarnegara, yaitu antara menaklukkan atau ditaklukkan. Pengembangan *power* atau *growth* negara bisa terjadi ketika negara berhasil mengakuisisi wilayah kerajaan tetangganya atau kerajaan-kerajaan lain yang ditaklukkannya. Akuisisi ini dianggap penting karena dengan strategi itu, sebuah kerajaan yang *powerful* akan memperoleh tidak hanya penambahan wilayah, memperbesar asset, tapi juga penguasaan melalui upeti dan sumber daya alam yang terdapat pada kerajaan yang dikalahkannya. Cara pandang seperti ini menjadi salah satu fokus pemikiran politik Kautilya yang menganggap bahwa negara adalah institusi tertinggi yang wajib dijaga keberlangsungannya. Artinya, seorang raja yang menjadi penguasa negara harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjalankan tata kelola negara. Memang, kekuasaan itu bersifat absolut, namun ini tidak bermakna bahwa raja dapat bertindak sewenang-wenang. Hal ini karena Kautilya tetap kukuh dengan moralitas dari filsafat politik praktisnya yang bertujuan untuk mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya.

Bagi Kautilya, segala daya upaya untuk membahagiakan dan mensejahterakan rakyat adalah tugas utama seorang pemimpin, terlebih ia terikat oleh sumpah suci sebagai raja yang bersedia untuk bekerja secara aktif untuk meningkatkan kesejahteraan negara dan rakyatnya. Pada sisi yang bertolak

lainnya, seorang raja dilarang untuk mencari kesenangan pribadinya karena kesenangan raja belum tentu diametral dengan keadaan rakyatnya. Jika penguasa sejahtera tapi rakyatnya tidak, maka penguasa itu dianggap gagal mewujudkan salah satu tujuan bernegara, yaitu mensejahterakan rakyat. Seorang penguasa negara juga harus memiliki kemampuan mumpuni untuk mencegah segala gangguan dan ancaman terhadap negara yang telah dan akan timbul, lalu mengatasinya, dan terakhir menghentikan secara tuntas bahaya yang membahayakan keselamatan negara.

Pesan politik yang ingin disampaikan Kautilya dalam Arthashastra begitu kuat. Resonansi ini berangkat dari ketegasan sikap hidupnya, tentu juga konsistensinya dalam menjalankan fungsi-fungsi negara. Bagi Kautilya, negara membutuhkan administrasi untuk menjamin kelangsungan tata kelola dalam negeri maupun hubungannya dengan luar negeri. Risalah yang ingin disampaikan dianggap sebagai pendidikan bagi penguasa negara secara detail, analog panduan praktis untuk menghadapi kondisi lingkungan strategis yang selalu berubah-ubah dari sebuah negara.

Berdasarkan latar di atas, kuat alasannya mengapa Kautilya memulai pembahasannya dalam *adhikarana* (buku) pertama mengenai raja yang harus melewati sejumlah pelatihan khusus, prosedur pengangkatan menteri, pejabat negara, keamanan dan menjaga keselamatan negara. Alasan yang sama juga dilakukan Kautilya pada *adhikarana* ketujuh saat ia menjabarkan teori *mandala*, lingkaran negara dan juga teori enam kebijakan luar negeri yang dapat digunakan dalam ragam situasi. Teori-teori itu secara konsisten digunakan untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan, yaitu memastikan semua rakyat dalam keadaan sejahtera.

Pada *Adhikarana-adhikarana* selanjutnya, Kautilya membahas secara rinci berbagai topik sebagai pengetahuan

dalam membangun negara yang kuat, strategi melakukan pertempuran maupun cara-cara rahasia untuk menaklukkan musuh. Secara eksplisit pula, Kautilya Arthashastra mengajarkan secara detail teknik dan metode untuk membangun sebuah negara dan memelihara kekuatannya dalam lingkungan yang kompetitif secara strategis, dan dalam kekuasaan adversarial dengan bahaya inheren dari subversi politik serta ketidakstabilan sosial. Semangat Kautilya ribuan tahun silam ini tampak terasa hidup di masa kini saat kondisi global yang mengalami disruption menjangkiti negara diberbagai belahan dunia.

C. Menjalankan *Swadharma* sebagai Praktik Politik Hindu

Jika kembali membaca kitab Weda Sruti, terang disebutkan tentang apa dan bagaimana seorang umat Hindu seharusnya melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Artinya, terminologi *dharma negara* yang kita kenal selama ini sebenarnya mengandung banyak aspek, mulai dari isu kepemimpinan, politik, keamanan, medan perang, bahkan juga tentang penghasilan dan pengadilan. Pertanyaan tentang apa kontribusi setiap warga (umat Hindu) kepada negara, jelas adalah pertanyaan politik, baik yang dapat dilakukan melalui konsep *dharma negara* maupun tentu saja melalui *dharma agama*. Surpi¹⁷ menjelaskan cukup jernih kewajiban-kewajiban setiap umat Hindu, terutama narasi tentang *dharma agama* yang menurutnya telah banyak terhampar dalam Regweda, Samaweda, Yajurweda dan Atharwaweda.

Bagaimana menjalankan kewajiban (*dharma*) itu juga dapat ditemukan dalam teks-teks penting lainnya, seperti Ramayana, Mahabharata, dan Arthashastra. Pesan yang sama juga ditemukan dalam Pustaka Pararatwan I Bhumi Jawadwipa,

¹⁷ Lihat lebih lengkap Ni Kadek Surpi. "Moral Politik dan Merosotnya Kualitas Peradaban Manusia" dalam I Nyoman Yoga Segara (ed), 2019. *Politik Hindu. Sejarah, Moral dan Proyeksinya*. Denpasar: IHDN Press. hlm. 59-61.

Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara, Naskah Tanjung Tanah (naskah Hindu tertua di Asia Tenggara) yang hampir semuanya menjelaskan tentang jalan ksatriya untuk mempersembahkan hidupnya kepada ibu pertiwi yang dianggap sebagai persembahan tertinggi. Pengorbanan ini dianggap sebagai jalan terhormat dalam konsep teologi patriotik yang menjadi pondasi politik dan tata negara serta membangun kesejahteraan negara dalam Hindu.

Lebih lanjut, Avalokitesvari bahkan menyatakan tegas bahwa agama Hindu sendiri jika harus menyebutnya sebagai “bangunan ilmu” juga merefleksikan konsep teologi yang selama ini belum banyak didiskusikan, utamanya teologi cinta tanah air atau kecintaan kepada ibu perthiwi. Konsep ini dapat dengan rinci ditemukan dalam Atharwaweda XII.1.2, Atharwaweda IX.10.12, Atharwaweda XII.1.1, Yajurweda XXV.17, dan Yajurweda IV.22. Tidak saja dalam teks suci, konsep ini juga sangat banyak disebut-sebut dalam kitab Weda Smrti, salah satunya dalam Ramayana Yudha Kanda. Disebutkan bahwa Sri Rama, tokoh sentral dalam Itihasa Ramayana, mengajarkan bahwa tanah air dan mencintainya jauh lebih tinggi dari surga sehingga setiap putra dari ibu pertiwi wajib mendedikasikan dirinya untuk negeri tempat ia dilahirkan. Apa yang diwedarkan Sri Rama ini sekaligus juga memotivasi untuk membangun teologi patriotik sebagai dasar praktik *dharma negara*. Saat ini kecintaan kepada tanah air, juga mulai dikembangkan dengan semangat bela negara, patriotisme, nasionalisme yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai kebangsaan. Dalam Hindu, semua aspek yang berkenaan dengan kecintaan pada tanah air disebut *prthiwi bhakti*.

Selain dalam Itihasa Ramayana, konsep kecintaan pada tanah air juga tak kalah menariknya ditemukan dalam Itihasa

Mahabharata. Dalam kisah pertarungan keluarga Bharata ini dijelaskan bahwa konsep kecintaan pada tanah air dapat terdiri dari dasar-dasar mencintai tanah air, ilmu pemerintahan, keahlian setiap *putraprthiwi* yang sangat dibutuhkan dalam membela *dharma* hingga ke aturan perang dan perdamaian. Perang besar di Kuruksetra yang terjadi hampir 5000 tahun silam memperlihatkan bagaimana seorang *putra prthiwi* harus berdiri mengorbankan jiwa raganya demi negara. Dalam perang kolosal ini juga ditegaskan bahwa Hindu bukanlah agama yang mengajarkan perang atas agama, melainkan atas perang melawan kebatilan, kezaliman dan syahwat kekuasaan.

Kisah Arjuna yang tidak tahan dan ingin pergi dari medan perang saat melawan orang-orang yang dicintainya, juga sangat menarik untuk membincangkan konteks *swadharma* di atas. Saat mendapati Sang Partha *lunglai* dan tidak ingin melanjutkan pertempuran, Sri Krishna datang sebagai motivator dengan menyatakan bahwa tugas utama seorang ksatria adalah membela negara dan kebenaran. Jika pembelaan itu harus dilakukan di medan perang, maka ia harus total melakukannya. Resiko dari pengorbanan itu adalah membunuh dan dibunuh. Oleh karena itu, Krishna meminta Arjuna melanjutkan peperangan sebagai cara terbaik menjalankan *swadharma* ksatria. Menurut Krishna, Tuhan menjamin seorang ksatria dengan pahala surga jika ia mati menjalankan *swadharmanya* di medan perang. Sebaliknya, seorang ksatria yang lari dari tanggung jawab dan desersi, diibaratkan seseorang yang memiliki luka namun tidak pernah menemukan obat penyembuh hingga akhir hayatnya. Ksatria pengecut itu akan menderita sepanjang hidupnya [*]

BAB EMPAT

FILSAFAT POLITIK, TEORI POLITIK DAN AJARAN NITI

“Sumber kehidupan umat manusia adalah Artha (kesejahteraan), dengan kata lain, adalah Bumi (dengan segala isinya) yang dihuni manusia. Ilmu yang mencakup cara untuk memperoleh hasil dan melindungi Bumi adalah Arthasastra, Ilmu Politik” (Arthasastra Buku Kelima Belas, Bab Satu, Bagian 180: 1-2)

A. Politik Hindu dan Kekuasaan dalam Dimensi Filosofis

Pemikiran politik Kautilya dalam Arthasastra mungkin tidak sama persis dengan pengertian ilmu politik modern sebagaimana ahli politik mendefinisikannya secara ketat. Namun, jika membaca ulang definisi politik dari para ahli, tentu saja apa yang diajarkan Kautilya berintersepsi pula dengan ilmu politik, salah satunya karena berbasis manusia dan segala tindakannya. Faktor manusia pula telah menjadi inti dari politik, sehingga telaah terhadap ilmu politik tidak bisa meninggalkan faktor manusia. Djawamaku (dalam Abdulkadir B. Nambu dan Muhammad Rusdiyanto)¹⁸ mengatakan bahwa pribadi seorang manusia adalah unit dasar empiris analisa politik. Bahkan asal kata politik, yaitu *politic* menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Kata politik juga telah lama dikenal dalam beberapa

¹⁸ Baca Abdulkadir B. Nambu dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa. “Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)”. *Jurnal Mimbar*. Volume XXI No. 2 April-Juni 2005: 262-285.

bahasa. Misalnya, “*politicus*” dalam bahasa Latin, dan “*politicos*” yang diartikan *relating to a citizen*. Kedua kata, baik “*politicus*” dan “*politicos*” berasal dari kata “*polis*” yang bermakna *city* atau kota. Asal kata politik ini juga terserap ke dalam bahasa Indonesia, yang diartikan segala urusan dan tindakan/kebijaksanaan, siasat, dlsb mengenai pemerintahan sesuatu negara terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan.¹⁹

Dalam perjalanan selanjutnya, disiplin ilmu politik dapat ditelusuri dari sejarahnya. Istilah politik sendiri pertama kali dikenal pada masa Yunani Kuno melalui Plato yang menulis buku *Politeia*. Buku ini juga memperkenalkan istilah republik. Karya Plato diteruskan muridnya, Aristoteles melalui karyanya, *Politicia*. Dua karya filosof ini dianggap sebagai awal mula pemikiran politik karena keduanya mengajarkan tentang bagaimana mengatur masyarakat dan bagaimana sebuah pemerintahan dapat dijalankan untuk mewujudkan kelompok masyarakat atau organisasi negara dengan baik.²⁰ Tentu saja, definisi lain tentang ilmu politik dapat kita baca dari pendapat ahli. Misalnya, Budiardjo²¹ menyatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Noer²² kembali menyatakan bahwa politik tidak terbatas pada suatu kegiatan yang berkenaan dengan hanya *decision making* atau *public policies*. Simpulan dari dua pendapat ini menunjukkan bahwa sistem politik sebagai hubungan manusia meliputi bentuk-bentuk kekuasaan, pengawasan, pengaruh, sehingga pengertian politik tidak terbatas hanya pada soal negara tetapi juga menyangkut bentuk yang lain, seperti komunitas, perkumpulan sosial, dan organisasi.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 263.

²⁰Delia Noer. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali. hlm. 11-12

²¹Miriam Budiardjo. 1983. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. hlm. 8

²²Delia Noer., *Op.Cit.* hlm 11-12

Berdasarkan definisi di atas, apa yang disampaikan Kautilya dalam Arthashastra dapat saja digolongkan sebagai bagian dari ilmu politik karena prasyarat sebagai ilmu politik jika merujuk pendapat ahli sudah terpenuhi. Namun saya juga ingin mengelaborasinya melalui dimensi filosofis, entah pemikiran politik dan atau kekuasaan, tetapi juga disiplin ilmu lainnya. Disebut mengandung dimensi filosofis karena kitab ini selain disusun oleh seorang maharsi besar dengan intuisi suci sebagai brahmana, juga mengajarkan konsep mengelola negara berdasarkan agama Hindu. Alasan ini pula, Arthashastra dimasukkan sebagai kitab ilmu pemerintahan dan tergolong Upaweda, yaitu kitab yang sangat dekat dengan Weda Smrti. Selain Arthashastra, kitab Upaweda lainnya adalah Gandharwaweda (ilmu seni), Dhanurweda (ilmu berperang) dan Ayurweda (ilmu pengobatan). Artinya pula, dengan begitu luasnya konsep dan ajaran yang terkandung dalam Arthashastra, kitab ini menjadi glorifikasi pemikiran Kautilya.

Selain itu, dalam sebuah proses kontemplasi, saya mengingat-ingat kembali salah satu keabadian sifat khas dari filsafat, yaitu ruhnya akan terus dapat hidup melintasi ruang dan waktu, dan yang selalu menawarkan idealisasi sebuah pandangan besar. Perenungan ini menjadi *entry point* untuk memahami bukankah apa yang dipikirkan Kautilya dalam Arthashastra di masa lalu juga sangat idealistik, bahkan sebagian pikirannya masih akan terus dapat bersenyawa dengan kehidupan di masa kini. Dalam benak saya, sebuah pengetahuan—terlebih berdimensi filosofis—hadir untuk merekatkan seluruh pengalaman manusia dengan dirinya sendiri, kehidupan dan termasuk imajinasinya tentang masa depan. Perjalanan filsafat, betapa pun tuanya, bahkan pencetusnya sendiri telah lama mati, akan ikut serta mendampingi hidup manusia kini, merasuki alam batiniah dan jasmaniah. Ia (filsafat) seolah terus hidup, bahkan ketika

kehadirannya tidak dikehendaki. Jika kehidupan ini ibarat puzzle, adalah tugas filsafat menyambung kembali bidak-bidak yang tercerai itu dengan satu universalisme ideologi, baik yang disukai maupun yang dibenci sekalipun. Kehadiran filsafat melingkupi ruang spasial manusia dari waktu ke waktu. Salah satu kekhususan filsafat, barangkali terletak pada titik tolak pembahasannya yang lebih elaboratif. Jika ilmu pengetahuan sering hanya sampai pada pencarian *know-how*, filsafat biasanya memasuki pintu *know-why*. Ada usaha tanpa lelah untuk mempersoalkan sebuah esensi, yang kemudian dipertanyakan berdasarkan kategori-kategori yang dalam ilmu filsafat dimanifestasikan ke dalam epistemologi, ontologi dan aksiologi. Pendek alasan, kategori ini bagi saya tetap bermuara pada ujung yang sama, yaitu pencarian makna hakiki yang melampaui batasan temporal untuk martabat kemanusiaan.

Mengingat pemikiran politik dan kekuasaan Kautilya penuh dengan emanasi filsafat, dan dengan asumsi itu, maka saya memiliki kesempatan juga untuk mengkonstruksinya sebagai filsafat politik. Oleh karena itu, isu pertama yang harus ditelusuri adalah *subject matter* dari filsafat politik. Usaha ini membawa saya juga harus memahami geneologi filsafat politik, terutama ahli politik di Barat. Beberapa pendapat penting tentang filsafat politik, dapat dimulai dari Alan Brown²³ yang menyatakan bahwa filsafat politik ada sejak manusia menyadari dirinya dapat hidup satu sama lain dengan cara yang lebih bermanfaat. Artinya, kerjasama di antara manusia sangat dimungkinkan, dan usaha menata kehidupan bersama yang ideal melalui rasionalitas mulai dikembangkan. Dengan rasionalitasnya, manusia menyadari bahwa berbagai pilihan terbuka untuk mengatur dan mengembangkan kehidupan bersama, meskipun tidak selalu jelas mana di antara berbagai pilihan itu yang dapat dianggap paling baik.

²³Alan Brown. 1986. *Modern Political Philosophy*. Middlesex: Penguin Books, hlm. 11

Kita bisa mulai mendiskusikan filsafat politik secara panjang lebar dari pernyataan Brown di atas yang lebih lanjut mengatakan, dengan rasionalitasnya manusia mencoba mempertanyakan apa hakikat dari organisasi masyarakat yang baik dan tepat. Pernyataan tentang yang baik dan yang benar seperti ini telah lama menjadi “perkelahian” dalam studi filsafat politik, terutama antara paham teolegi dan deontologi. Pertanyaannya adalah mana yang lebih utama, apakah prinsip kebaikan harus mengalah pada prinsip ketepatan, ataukah prinsip ketetapan harus diletakkan di bawah prinsip kebaikan,²⁴ atau “bagaimana cara hidup yang terbaik dan paling tepat bagi manusia, entah sebagai individu maupun kelompok”. Tulisan Brown memberi *insight* bahwa filsafat politik adalah studi tentang penilaian dan kritik moral terhadap proses yang melandasi sebuah kehidupan sosial, politik dan ekonomi demi penciptaan susunan organisasi masyarakat yang baik dan tepat. Secara tegas Brown menyatakan bahwa filsafat politik berkenaan dengan hal-hal praktis atau berhubungan dengan bagaimana pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat yang seharusnya. Cara lain untuk lebih memahami *subject matter* filsafat politik adalah dengan membedakannya dari ilmu politik dan teori politik. Kembali pada Brown²⁵ yang menyatakan bahwa pokok perhatian ilmu politik adalah realitas atau peristiwa politik seperti perebutan kekuasaan, kecenderungan memilih, hubungan antara kelas sosial dalam masyarakat dengan partai politik dan teori yang menjelaskan realitas dari berbagai peristiwa politik itu sendiri.

²⁴ Untuk mendiskusikan teori kebaikan dan teori kebenaran seperti ini dapat dibaca dalam Richard B. Brand. 1979. *Theory of the Good and The Right*; juga Pettit Philip, “The Contribution of Analytical Philosophy”, in *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, Robert E. Goodin and Philip Pettit (eds). 2004.

²⁵ Alan Brown., *Op.Cit.*, hlm. 14

Selain Brown, pemikiran filsafat politik juga disampaikan Sheldon S. Wolin²⁶ yang menyatakan bahwa:

Filsafat politik bukan sekadar hasil refleksi pasif atau *mirror images* tentang masyarakat. Ini semata karena jauh sebelum manusia mulai berfilsafat tentang masyarakat, institusi politik dan struktur sosial sudah ada lebih dahulu sehingga batas dan substansi dari *subject matter* filsafat politik sebagian besar ditentukan oleh praktek-praktek yang sudah ada dalam masyarakat.

Kecenderungan ini tampak dalam filsafat politik klasik, seperti dipikirkan Plato yang tidak membedakan filsafat politik dan filsafat pada umumnya, karena penyelidikan tentang *the nature of the good life of individual* diasosiasikan dengan penyelidikan yang mempertemukannya dengan *the nature of the good community*. Banyak filsuf klasik memberikan sumbangan pada perkembangan ide-ide politik, dengan menawarkan metode analisis dan kriteria penilaian, dan karena itu secara historis perbedaan utama antara filsafat dan filsafat politik sering dianggap sebagai masalah spesialisasi, bukan sebagai masalah metode atau pembawaan.²⁷ Persekutuan yang erat antara filsafat dan filsafat politik ini menjelaskan mengapa para filsuf politik menerima dorongan untuk mengejar pengetahuan yang sistematis seperti yang dilakukan para filsuf pada umumnya. Namun, ada pengertian lain yang lebih fundamental tentang keterkaitan yang erat antara filsafat politik dengan filsafat pada umumnya. Filsafat dipahami sebagai usaha mengejar kebenaran hingga ke akar-akarnya, meskipun kualitas esensial tentang apa yang “politik” (*political*) mulai mendapat perhatian di kalangan para ahli teori politik dan pokok masalah filsafat politik mulai terbentuk dengan

²⁶Sheldon S. Wolin. 2004. *Politics and Vision*. Expanded Edition. New Jersey: Princeton University Press. hlm. 7

²⁷*Ibid.*, hlm. 4

menentukan keterkaitannya dengan apa yang dianggap “publik”.²⁸

Pendapat Wolin, agak sejalan dengan pikiran William L. McBride²⁹ yang menyatakan “filsafat politik selalu mengandung aspek aktif dan kreatif, yang terpisah atau berbeda dengan keadaan yang sedang berlaku, dan dengan demikian juga mengimplikasikan adanya kritik terhadap keadaan yang ada pada saat ini”. Pandangan McBride ini menandakan bahwa filsafat politik juga memiliki sejumlah karakteristik yang lain. Salah satu yang utama adalah studi filsafat politik pada dasarnya merupakan cabang dari filsafat praktis (*practical philosophy*), yaitu cabang filsafat yang terkait erat dengan etika atau filsafat moral, yang bertugas menangani pertanyaan moral dari kehidupan publik. Para ahli mengakui adanya kontinuitas yang fundamental antara moralitas dan filsafat politik. Artinya pula, filsafat moral sangat menentukan latar-belakang dan batas bagi filsafat politik.

Namun Will Kymlicka³⁰ memiliki pandangan sedikit berbeda di antara para filsuf politik menyangkut pembagian bidang moralitas dan filsafat politik serta tentang kriteria untuk argumen yang dianggap paling berhasil. Filsafat politik berbeda dengan etika karena etika berhubungan dengan dimensi moral pribadi, misalnya bagaimana seseorang seharusnya hidup, nilai atau gagasan ideal apa yang seharusnya dipegang dan aturan hidup macam apa yang hendaknya diperhatikan. Namun, perbedaan antara moralitas pribadi dan filsafat politik yang menekankan etika bersama tidak mudah ditentukan. Aristoteles misalnya menyatakan bahwa negarawan tidak boleh dikacaukan dengan pemilik budak atau kepala rumah tangga.

²⁸*Ibid.*, hlm. 4

²⁹William L. McBride. 1994. *Social and Political Philosophy*. New York: Paragon House.

³⁰Will Kymlicka. 1990. *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press. hlm. 6.

Negarawan menyangkut sesuatu yang 'politis', sedangkan pemilik budak atau kepala rumah tangga tidak bersangkut paut dengan yang 'politis'. Masalahnya kemudian, para filsuf politik ketika memisahkan *subject matter* yang dalam realitasnya tidak bisa dipisahkan, karena kenyataannya tanggungjawab moral yang ada pada seseorang kepada orang lain kadang menjadi sesuatu yang pribadi, hanya melibatkan peraturan perilaku personal, namun kadang juga menjadi masalah publik, yakni harus dipaksakan melalui lembaga-lembaga politik. Akan tetapi, karena filsafat digambarkan sebagai usaha sistematis untuk memahami prinsip yang mendasari semua hal, penyelidikan tentang apa yang 'politis' (*political*) dianggap harus membentuk bagian dari usaha berfilsafat secara umum.³¹

Pendapat lain dapat dicerap dalam Jonathan Wolf³² yang menyatakan bahwa karakteristik lain dari filsafat politik adalah pengetahuan normatif, yaitu filsafat politik mencoba membentuk norma (aturan atau standar ideal), yang dapat dibedakan dari pengetahuan deskriptif, yaitu mencoba menguraikan bagaimana sesuatu itu secara apa adanya. Studi normatif mencari tahu bagaimana sesuatu itu seharusnya: apa yang benar, adil dan secara moral tepat, sementara studi politik deskriptif dilakukan oleh ilmuwan politik, sosiolog, dan ahli-ahli sejarah. Analisa yang bisa diajukan di sini, misalnya, meskipun filsuf politik memiliki perhatian yang sama seperti halnya ilmuwan politik yang mempertanyakan distribusi barang-barang dalam sebuah masyarakat, maka seorang filsuf politik (berbeda dengan ilmuwan politik) akan memusatkan perhatiannya pada aturan atau prinsip apa yang menentukan distribusi barang-barang tersebut. Seorang filsuf politik tidak bertanya 'bagaimana properti itu didistribusikan', tetapi

³¹William L. McBride. *Op.Cit.*, hlm. 1

³²Jonathan Wolf. 2006. *An Introduction to Political Philosophy*. Revised Edition. Oxford: Oxford University Press.

'distribusi properti semacam apa yang adil dan *fair*', ia tidak bertanya 'hak dan kebebasan apa yang sesungguhnya dimiliki rakyat' tetapi 'hak dan kebebasan apa yang seharusnya dimiliki rakyat'. Tentu saja, pembagian antara studi normatif dan studi deskriptif tidak selalu sejelas seperti yang mungkin disangka karena masalah perilaku manusia seringkali berada di antara dua titik pembagian deskriptif dan normatif.

Dengan demikian, teori politik merupakan kumpulan doktrin-doktrin tentang organisasi masyarakat politik yang diinginkan, seperti liberalisme, sosialisme atau anarkisme. Doktrin teori politik adalah deskripsi tentang kemungkinan bentuk masyarakat yang dianggap baik dan tepat serta di dalamnya juga terkandung berbagai rencana dan program politik, dan karena itu sering diistilahkan sebagai ideologi. Sedangkan filsafat politik, meski menaruh perhatian terhadap doktrin-doktrin politik, namun lebih berkepentingan untuk memberikan landasan kefilosofan terhadap doktrin-doktrin normatif tersebut. Asumsinya adalah bahwa teori politik (dan sebenarnya juga teori-teori ekonomi dan sosial) bisa saja tidak memiliki justifikasi rasional, atau hanya merupakan bentuk rasionalisasi praktik politik, ekonomi dan sosial yang dikembangkan berdasarkan kepercayaan semata melalui otoritas tertentu seperti agama. Jadi, minat filsafat politik dapat dibedakan dari teori politik dalam hal bahwa ada kebutuhan untuk memberikan landasan rasional atas nilai-nilai, ideal-ideal dan prinsip-prinsip yang memberikan bentuk pada teori atau doktrin itu.

Untuk semakin memahami filsafat politik, dan berusaha mensejajarkan gagasan Kautilya sebagai filsafat politik, maka penelusuran peta dan sejarah pemikiran politik India harus dilakukan, dan sebagian telah diuraikan pada bab sebelumnya. Penelusuran ini penting artinya karena pemikiran seorang tokoh, seperti Kautilya tumbuh dan besar bersama sejarah di

mana ia hidup. Pembabakan sejarah politik Hindu dan kekuasaan beberapa kerajaan yang pernah ada di masa lalu, atau India kuno, telah mengajarkan banyak hal kepada Kautilya dalam menata kelola negara (*state*), pemerintahan (*government*), administrasi publik (*public administration*), hukum dan masalah sosial (*law and society*), juga seni peperangan serta keadaan masyarakat dan sejarah politiknya. Sejarah politik Hindu dan kehidupan Kautilya pada masa awal abad masehi memengaruhi Arthashastra sebagai kitab yang lengkap.

Selain itu, Maharsi Kautilya yang hidup pada jaman Brahmana yang menggantikan jaman Weda Samhita berpengaruh besar terhadap isi kitab Arthashastra yang disusunnya. Kitab ini dianggap sebagai salah satu kitab dalam wacana Hinduisme yang memuat gagasan bersifat preskriptif dan normatif. Artinya, sejak awal Arthashastra digagas Kautilya sebagai ajaran yang dipedomani para kepala negara untuk menjalankan roda pemerintahannya, sehingga tidak berlebihan jika isi Arthashastra sangat filosofis ketika memandang politik dan kekuasaan, misalnya penuh dengan pesan-pesan moral yang sebaiknya diikuti penguasa dan rakyat. Secara tersirat, Kautilya mengatakan bahwa Arthashastra yang disusunnya adalah kelanjutan dari Arthashastra yang disusun para guru dan maharsi sebelum dirinya. Kitab ini menjadi pegangan bagi penguasa dalam memperoleh dan memelihara bumi. Bagi Kautilya, pengetahuan politik akan membawa kita mencapai *dharma*, *artha*, dan *kama* sebagai tujuan agama Hindu, lalu *dharma* dan *kama* akan tergantung pada *artha*.

B. Teori Politik dalam Arthasastra untuk Mengelola Negara

Maharsi Kautilya adalah orang yang sangat teguh dengan pendirian idealnya. Bahkan dalam menjalankan ajaran *satya*, ia termasuk yang melakukannya dengan penuh totalitas. Sejarah hidupnya yang penuh onak duri, karakternya yang kuat dan ide-idenya yang tegas dalam Arthasastra sudah cukup menguatkan siapa dirinya. Sebagai karya yang disusun dengan intusi kebrahmanaan, pemikiran Kautilya mengandung sejumlah teori politik, terutama konsepnya tentang diplomasi. Seorang penguasa negara haruslah mempedomani ajaran-ajarannya ini.

Avalokitesvari³³ melalui artikelnya memberikan paparan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang penguasa, yaitu (1) keadaan internal negaranya melalui teori *Saptanga*, (2) teori *Mandala* yang membahas tentang konstelasi geopolitik negara mana saja yang akan diajak bekerjasama atau malah ditaklukkan, (3) kebijakan apa yang harus diambil jika menghadapi negara lain melalui *Sadguna*, dan (4) setelah itu baru diputuskan upaya apa yang dapat ditempuh untuk menjalankan kebijakan luar negeri tersebut, apakah dengan *sama, dama, bedha* dan *danda* (*Catur Upaya*). Yang menarik adalah ajaran Kautilya ini tidak bersifat kaku, apalagi bersifat *textbook*. Ini pula salah satu alasan mengapa pemikirannya tentang politik Hindu dan kekuasaan terus dapat mengikuti arus jaman, hingga hari ini.

1. Teori *Saptanga*: tujuh elemen pembentuk negara kuat

Teori *Saptanga* adalah teori yang menjelaskan bahwa terdapat tujuh elemen yang membentuk sebuah negara.

³³Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari. *Op.Cit.*, hlm. 24-29.

Dalam Arthashastra (6.1.1), negara itu dianalogikan sebagai organisme yang terus tumbuh, berkembang dan secara prakrithis adalah bagian tubuhnya. Tujuh elemen itu adalah:

- a. *Swamin*, yaitu raja/penguasa/pemimpin negara
- b. *Amatya*, yaitu anggota dewan, semacam legislator atau mereka yang mewakili institusi negara
- c. *Janapada*, yaitu sumber daya negara, termasuk wilayah dan penduduk sebagai kekuatan
- d. *Durg*, yaitu entitas berdaulat yang dibentengi
- e. *Kosa*, yaitu asset atau perbendaharaan negara
- f. *Danda* atau *Bala*, yaitu pasukan militer dan penjagaan ketertiban
- g. *Mitra*, yaitu teman dan sekutu negara

Kautilya menjelaskan bahwa ketujuh elemen pembentuk negara itu adalah sebuah eksposisi dari teori *Mandala* yang melandasi kebijakan luar negeri di lingkungan yang didominasi oleh ekspansionisme teritori. Oleh karena itu, menurut Kautilya sebelum melanjutkan ekspedisi untuk menaklukkan wilayah lainnya, seorang raja harus mampu menggunakan langkah-langkah preventif dan strategi defensif untuk menghalau ancaman yang akan melemahkan salah satu unsur penyusun negaranya sendiri. Lebih lanjut, Kautilya menyatakan bahwa seorang raja harus memiliki optimisme dan gigih berjuang untuk melakukan tugas dan tanggung-jawabnya kepada rakyat dan negaranya. Tugas dan tanggung jawab tersebut meliputi perlindungan, pelayanan administrasi dan mensejahterakan rakyatnya.

Teori *Saptanga* yang disampaikan Kautilya tidak hanya diyakini sebagai tujuh elemen namun menjadi unsur pembentuk yang menginginkan kekuatan mumpuni bagi bangsa dan negaranya. Teori ini juga dapat dimaknai sebagai tujuh elemen kedaulatan negara. Bagi Kautilya, sebuah negara selainnya menjaga ketujuh elemen itu karena semua elemen itu merupakan satu kesatuan yang komplit. Jika salah satu elemen itu lemah maka akan melemahkan elemen yang lainnya. Sebaliknya, jika ketujuh elemen itu sama-sama kokoh akan dapat menjadi kekuatan super yang akan membuat penguasa mampu menjaga dan memperkuat negaranya.

Tujuh elemen atau *prakrithis* itu secara bersamaan memanasifestasikan *Shakti* atau kekuatan bagi negara. Kautilya mengidentifikasi tiga *shakti* dalam Arthasastra, yaitu *Prabhawa-shakti*, *Mantra-shakti* dan *Utsaha-shakti*. *Prabhawa-shakti* adalah kekuatan yang dapat melahirkan sebuah “efek” menguntungkan bagi negara, terutama dalam hal mengembangkan ekonomi dan membangun kekuatan militer. *Mantra-shakti* dapat dimaknai sebagai kekuatan untuk memengaruhi, memberi nasihat, dan mendorong negara lain untuk dikooptasi oleh sang *Wijigicu* (raja atau negara penakluk). Dalam ilmu politik, khususnya dalam hubungan internasional, *prabhawa-shakti* dapat dikatakan bersifat *hard power*, sedangkan *mantra-shakti* bersifat *soft power*. Kedua sifat ini oleh Kautilya diarahkan sepenuhnya untuk memperkuat *utsaha-shakti* sebagai kekuatan pendorong yang akan mengarahkan *prabhawa-shakti* dan *mantra-shakti* sehingga menjadi energi besar yang terfokus untuk melindungi negara. Melalui tiga *shakti* ini, Kautilya menggambarkan penguasa negara memiliki tugas untuk menjalankan manajemen negara secara terarah dan terencana.

2. Teori *Mandala*: negara dalam lingkaran negara

Teori *Mandala* yang digagas Kautilya dalam Arthashastra menjelaskan tentang adanya konstelasi geopolitik dari sebuah negara. *Wijigisu* akan mengambil posisi di tengah negara-negara lain dalam percaturan politik internasional yang berupaya saling memengaruhi antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam teori ini, terdapat 12 kategori negara dalam lingkaran negara, yaitu:

- a. *Wijigisu* adalah negara yang memiliki hasrat tinggi untuk menaklukkan negara lain
- b. *Ari* adalah negara yang menjadi musuh utama dari negara penakluk
- c. *Mitra* adalah sekutu dari sang *Wijigisu*
- d. *Arimitra* adalah sekutu dari musuh
- e. *Mitramitra* adalah teman dari sekutu sang *Wijigisu*
- f. *Arimitramitra* adalah teman dari sekutu sang musuh
- g. *Parsnigraha* adalah musuh di garis belakang sang *Wijigisu*
- h. *Akranda* adalah sekutu dari sang *Wijigisu* di garis belakang
- i. *Parsnigrahasara* adalah sekutu dari musuh di garis belakang sang *Wijigisu*
- j. *Akrandasara* adalah sekutu dari *akranda*
- k. *Madhyama* merupakan negara tengah yang berbatasan dengan *Wijigisu* serta *Ari* atau musuh.
- l. *Udasina* adalah tipe negara netral yang acuh tak acuh, berada di luar dari lingkaran negara, dan umumnya lebih kuat dari *Wijigisu*, *Ari*, dan maupun *Madhyami*.

Dalam konstelasi geopolitik, Kautilya memberikan titik tekan bahwa sang *Wijigisu* tidak dapat dimaknai secara harafiah sebagai negara yang selalu berminat melakukan penaklukan. *Wijigisu* juga tidak selalu menjadi episentrum dari negara-negara lainnya. Penggambaran 12 kategori negara di atas adalah simbolisasi atas keadaan nyata yang meniscayakan terbentuknya *Mandala* yang dapat saja saling tumpang tindih, tergantung konstelasi dan arah kerjasama maupun analisa lingkungan strategis dalam percaturan geopolitik, dari politik regional maupun global. Namun yang jelas, konstelasi ini bersifat dinamis dan dapat berubah karena memungkinkan juga negara tetangga yang sebelumnya menjadi *mitra* menjadi musuh. Kondisi sebaliknya bisa terjadi negara itu menjadi ramah dan hubungannya bersifat vasal atau menjadi negara bawahan.

3. Teori *Sadgunya*: enam kebijakan luar negeri

Teori *Sadgunya* adalah enam kebijakan luar negeri yang dipraktikkan oleh sebuah negara sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategisnya, terutama terhadap negara-negara lain dalam percaturan politik internasional. Teori ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana sebuah negara akan bersikap dengan negara lainnya. Keenam kebijakan itu adalah:

- a. *Samdhi*, yaitu membuat atau menjalin perdamaian
- b. *Wigraha*, yaitu melakukan peperangan
- c. *Asana*, yaitu tinggal diam atau sikap memilih netral
- d. *Yana*, yaitu mempersiapkan diri untuk perang atau bersiap siaga atau selalu berjaga-jaga
- e. *Samsraya*, yaitu mencari dukungan atau menjalin aliansi

f. *Dwaidibhawa*, yaitu kebijakan ganda untuk membuat perdamaian dengan satu negara sementara itu juga mengadakan peperangan dengan negara lainnya.

Pada dasarnya, sebuah negara dapat menjalankan lebih dari satu kebijakan atau di saat yang bersamaan dengan beberapa negara lain sekaligus. Adapun praktik dari teori *Sadgunya* di atas tidak berjalan linear sesuai urutan hirarkhisnya, namun disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi strategis negara saat itu. Artinya, pasang surut lingkungan sekitar sebuah negara sangat menentukan kebijakan apa yang akan diambil dan dijalankan. Kautilya sendiri beralasan bahwa setidaknya ada dua cara yang dapat ditempuh oleh *Wijigisu* dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu melalui perang atau jalur diplomasi.

Adapun saat Kautilya menjelaskan makna *Wijigisu*, ia menjangkarkan gagasannya pada konsep raja sebagai *Wijigisu*, yang kira-kira bermakna sebagai orang yang ingin menaklukkan. Istilah teknis ini merujuk pada arti seorang penguasa yang memiliki keinginan kuat atau berkomitmen tinggi dalam upaya penaklukkan. Namun, jika *Wijigisu* diarahkan pada makna kekinian dengan situasi percaturan politik internasional, istilah itu dapat diartikan sebagai sebuah negara yang menginginkan untuk memperluas pengaruhnya atau kekuatannya ke negara-negara lain secara terus-menerus.

Lebih lanjut, dalam hal menyusun strategi diplomasi dengan pihak luar, Kautilya dalam Arthashastra melakukannya melalui *atisamdhana*, yaitu pembuatan pakta atau perjanjian dengan pihak lain atau negara lain, serta menggunakan kesepakatan perjanjian ini untuk mengecoh dan mengguguli pasangan potensial mereka. Kemampuan

politik ini menjadi praktik sederhana dari *samdhi*, salah satu enam kebijakan politik luar negeri. Istilah *samdhi* sendiri merujuk kepada pembuatan pakta atau aliansi dengan penguasa negara lain untuk mencapai tujuan bersama, misalnya untuk menyerang pihak ketiga yang dianggap sebagai musuh bersama. Kautilya juga menginstruksikan untuk menggunakan aliansi sebagai peluang untuk tidak hanya mengalahkan musuh bersama tetapi juga sebagai sebuah proses untuk melemahkan sekutu *Wijigicu* itu sendiri. Strategi politik ini akan terlihat seperti membunuh dua burung dengan satu batu dalam waktu bersamaan. Strategi jitu Kautilya ini juga sekaligus menjadi bagian dari *Mantrayuddha* atau “perang kecerdasan”.

Bagi Kautilya, *mantra-shakti* atau kemampuan berdiplomasi diyakininya sebagai kemampuan terkuat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin negara. Sesungguhnya, dari tiga *shakti* yang diajarkan Kautilya, *mantra-shakti* dianggap paling penting karena kemampuan berdiplomasi dengan menggunakan kekuatan narasi, seperti menasehati, memengaruhi, menarik perhatian dan mengkooptasi negara-negara lain seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin negara. Kautilya menganalogikan kompetensi ini dengan sebuah ungkapan yang mengesankan:

Anak panah yang dilepaskan oleh seorang pemanah dapat saja membunuh satu orang atau bahkan justru tidak membunuh seorangpun. Namun kecerdasan yang dijalankan oleh orang (pemimpin) bijak bahkan bisa membunuh anak yang masih di dalam kandungan.

Berdasarkan uraian teori politik dan kekuasaan Kautilya Arthashastra di atas, dapat disimpulkan sang maharsi memberikan perhatian besar pada peranan diplomasi, namun secara bersamaan tidak memberikan preferensi atas perang. Gagasan bernasnya ini juga diyakini karena pengaruh situasi dan kondisi sistem sosial saat kerajaan dari Dinasti Maurya berkuasa. Pada saat itu, kaum ksatria mendapatkan porsi paling besar sebagai pengelola negara, yang secara stereotype pula mengesankan para ksatria memang seperti ditakdirkan untuk “berperang”. Untuk memperkuat negara, Kautilya memberikan satu konsep strategis kepada para penguasa untuk menjalankan *mantra-shakti*, yaitu berdiplomasi sebagai bagian dari *soft power* guna mencapai banyak tujuan penting, misalnya menarik sekutu, menunda perang jika sebuah negara itu lemah dan mudah diserang serta untuk membuat apa yang disebut *post war arrangements for a new order*.

C. Kautilya Arthashastra dan Ajaran Tentang Niti

Memaknai gagasan dan pemikiran Kautilya dalam Arthashastra sebagai filsafat politik dan kekuasaan itu penuh tantangan. Mungkin karena politik dan ilmu politik itu sudah kadung dianggap tabu, terstigma kotor. Bias diskursus ini adalah ampas dari ketertutupan dalam membicarakan politik di ruang publik, terkhusus pada jaman orde baru di masa lalu, meskipun selepas orde reformasi, pembicaraan politik malah merembes *bablas*. Pada sub bab ini, saya ingin kembali menyorikan makna politik dan kekuasaan dalam Arthashastra, melanjutkan apa yang sebagian telah diuraikan pada bagian awal bab ini, serta mengaitkannya dengan ajaran tentang kepemimpinan Hindu, terutama yang berkembang di Bali.

Untuk meyakinkan maksud di atas, tampaknya perlu dipertegas kembali bahwa Arthasastra meskipun telah berumur sekira 2000an tahun, tidak banyak orang menyadari begitu penting kehadirannya, kecuali para intelektual, akademisi dan mungkin saja spiritualis, dan komunitas ini pastilah berjumlah minor. Baru setelah R. Shamasastri “menemukan” dan mempublikasikannya pada 1905, segera bermunculan banyak komentar, analisis dan interpretasi serta tentu yang tak dapat dihindari, mulai banyak terjemahan tentang Arthasastra. Berbagai usaha ini baik-baik saja, namun juga menyulitkan untuk menganggap salah satu di antara sekian banyak literatur itu “asli”, atau “murni” berasal dari kitab aslinya. Kegembiraan lainnya adalah kitab ini telah pula diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia, sekaligus menjadi kesulitan baru karena akan terdapat bias di sana sini.

Kesulitan lain untuk mengkontekstualisasikan Arthasarta adalah ketimpangan waktu dan tempat hidup Kautilya sehingga tidak mudah juga melakukan justifikasi bahwa Arthasastra dipandang hanya sebagai kitab politik Hindu semata, meski secara khusus kitab ini dipersembahkan Kautilya sebagai kitab politik. Dalam Buku 1, Bab 2, Bagian 1, Ayat 1, Kautilya secara eksplisit menyebutkan bahwa *Anwiksaki* (filsafat), ketiga Weda (Rg, Sama dan Yajur), *Warta* (ekonomi), dan *Dandaniti* (politik) adalah empat ilmu-ilmu utama (*Widya*). Secara fundamental, ilmu politik dijadikan penyokong ilmu-ilmu utama itu, salah satunya melalui kitab Arthasastra. Oleh karena itu, menjelajahnya dengan satu perspektif, dalam hal ini sebagai filsafat politik adalah cara paling mudah untuk memahami sebagian saja isi kitab yang posisinya disejajarkan sama kuat dengan kitab klasik dan sastra Hindu lainnya, seperti *Wisnu Purana*, *Kamandaka-Nitisara*, *Panchatantra*, dlsb.⁸

⁸Hal yang sama diakui oleh Made Astana dan Anomdiputro dalam kata pengantarnya. *Op.Cit.*, hlm. 2003: vi

Agak beralasan jika Arthashastra disebut kitab politik karena hampir sebagian besar isinya mengajarkan bagaimana seorang penguasa seharusnya mengelola negara melalui politik, ekonomi, budaya, manajemen, administrasi, dlsb. Secara hiperbolik, kitab ini dapat dianggap sebagai buku manual praktis bagi seorang penguasa dalam mengelola negara dengan baik dan benar. Untuk menegaskan bahwa kitab ini sangat penting untuk para penguasa, penerjemah (Made Astana dan Anomdiputro) memberikan kutipan bahwa Kautilya—bahkan sampai kitab ini benar-benar berakhir untuk dibaca—memang ingin menjadikan Arthashastra sebagai kitab politik dengan salah satu tujuan utamanya mensejahterakan rakyat banyak. Pada Buku 15, Bab Satu, Bagian 180, Ayat 1 Kautilya menyatakan: “Sumber kehidupan umat manusia adalah *artha* (kesejahteraan), dengan kata lain adalah *bumi* (dengan segala isinya) yang didiami manusia. Ilmu yang mencakup cara untuk mencapai dan melindungi *bumi* adalah Arthashastra, Ilmu Politik”.⁹ Selain karena sebagian besar isinya mengajarkan ilmu politik, kitab ini juga merepresentasikan penulisnya sendiri yang pada zamannya dianggap sebagai ahli strategi, ahli perang dan ahli politik, sekaligus ahli agama (brahmana) yang suci.

Berkelindan dengan argumen di atas, sejarah dan tradisi politik di India sebetulnya setara dengan usia Weda itu sendiri. Politik, baik sebagai ilmu maupun secara praktis telah dikenal sejak awal kitab Smrti dan Purana-Purana sebagai *Dandaniti* yang isinya merupakan kristalisasi dari tradisi Arthashastra dan Dharmashastra. Meskipun harus diakui bahwa meski telah banyak terdapat referensi tentang manuskrip politik sebelum abad 4 SM, namun interpretasi yang dianggap paling populer dan benar-benar ilmiah dan akademis hanya ditemukan dalam Kautilya Arthashastra.

⁹*Ibid.*, hlm. vi

Untuk menemukan posisi Arthasastra sebagai kitab politik, tampaknya kita perlu mencari padanannya yang sebanding. Misalnya, Arthasastra sering disamakan atau erat hubungannya dengan Dharmasastra. Upaya menyamakan kedua kitab ini disebabkan baik *dharma* maupun *artha* adalah tujuan hidup manusia. Tujuan ini kemudian dirumuskan ke dalam istilah *Catur Purusharta*.¹⁰ Kitab lain yang dianggap sederajat dengan Arthasastra adalah Niti Sastra, meskipun dalam beberapa hal terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Namun satu hal yang menguatkannya adalah keyakinan para sastrawan bahwa Niti Sastra, yang dikenal di Bali sebagai kakawin, penyusunnya, yaitu Dang Hyang Nirartha sekurang-kurangnya diyakini telah atau pernah membaca Arthasastra.

Sampai saat ini pun, banyak kalangan mengartikan Niti Sastra sebagai ilmu politik atau ilmu kepemimpinan, padahal kakawin ini juga mengajarkan ilmu pengetahuan tentang moralitas, budi pekerti, tata cara pergaulan setiap hari, dengan sesama makhluk, sesama umat manusia dan bagaimana memusatkan perhatian dan memusatkan pelayanan bhakti kepada Tuhan. Anggapan Niti Sastra sebagai ilmu politik dan kepemimpinan lebih disebabkan kitab ini populer dikalangan umat Hindu kebanyakan, terutama di Indonesia melalui kakawin berbahasa Jawa Kuno atau lontar-lontar. Di tengah perdebatan itu, ada juga yang menganggap kitab yang sebenarnya menjadi kitab politik adalah Raja Niti, bukan Niti Sastra. Darmayasa³⁴ menguraikan panjang lebar perbedaan dan persamaan kitab Arthasastra, Niti Sastra, Raja Niti dan kitab-kitab lain sejenis. Bahkan diawal buku kecilnya itu, penerjemah tegas menyatakan bahwa Canakya Niti Sastra memang diposisikan sebagai pustaka yang berisikan pemikiran-pemikiran tinggi tentang moralitas, pergaulan sehari-hari dan juga tentang bhakti kepada Tuhan.

¹⁰IB Gunadha dalam kata pengantar buku *Studies in Kautilya*. Terjm. I Gde Sura. *Op.Cit.*, hlm. viii-ix

³⁴ Made Darmayasa, *Op.Cit.*, hlm xix-xxii

Ilmu politik atau ilmu kepemimpinan pada akhirnya menjadi satu tema yang mengikat berbagai tema yang ditemukan dalam literatur politik Hindu. Hal ini tidak lepas juga dari pengertian dasar kata Niti dalam Arthashastra, Niti Sastra maupun Raja Niti. Suhardana³⁵ menjelaskan kata Niti dari bahasa Sanskerta, "ni" dan "ktin" yang berarti "to lead, memimpin". Dalam Kamus Kecil Sanskerta-Indonesia yang dikutipnya, kata "ni" berarti "menuntun atau memimpin atau hal memimpin". Dengan demikian, kata Niti diartikan sebagai "kemudi, pimpinan". Arti lainnya adalah "politik, sosial etik, pertimbangan atau kebijakan". Sedangkan dalam Kamus Jawa Kuno-Indonesia yang juga dikutipnya, menjelaskan arti kata Niti sebagai "cara bekerja atau menjalankan yang betul/baik/benar atau bijaksana". Kata Niti juga diartikan sebagai "ilmu tata negara atau politik, kebijaksanaan politik". Pengertian yang lainnya adalah "kebijaksanaan duniawi". Dengan demikian, kata Niti Sastra misalnya, dapat disimpulkan sebagai "ilmu tentang etika politik". Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, Niti Sastra dianggap sebagai kitab yang mengajarkan ilmu politik, ilmu etika dan moralitas dan ilmu kepemimpinan. Selain itu, Niti Sastra juga disebut dengan nama lain, meskipun masing-masing istilah tersebut memiliki makna yang sedikit berbeda-beda, antara lain:

1. *Danda Niti*, yaitu ilmu pengetahuan tentang sendi-sendi hukum atau pemerintah yang berfungsi mengatur kehidupan manusia
2. *Artha Sastra*, yaitu ilmu pengetahuan tentang negara yang berfungsi mengatur kehidupan untuk mencapai kemakmuran
3. *Raja Dharma*, yaitu ilmu pengetahuan tentang kewajiban-kewajiban pemimpin

³⁵ K.M. Suhardana, 2008. *Niti Sastra. Ilmu Kepemimpinan atau Management Berdasarkan Agama Hindu*. Surabaya: Paramita. hlm. 5-8.

4. *Raja Niti*, yaitu ilmu pengetahuan tentang ilmu kepemimpinan

Suhardana³⁶ juga menjelaskan bahwa berdasarkan pengertian tentang Niti tersebut, umat Hindu di Bali dan umumnya di Indonesia mengenal banyak konsep kepemimpinan Hindu, antara lain:

1. *Asta Brata*. Ajaran kepemimpinan ini merupakan rangkuman dari nasehat Sri Rama kepada Wibhisana ketika akan dinobatkan sebagai Raja Alengkapura. Ajaran ini tersurat dalam Kitab Manawadharmasastra VII. 4 untuk dipedomani oleh para pemimpin dengan mengikuti sifat-sifat baik dari delapan dewa, yaitu Dewa Indra (raja para dewa dan sebagai dewa hujan), Dewa Wayu (dewa angin), Dewa Yama (dewa maut, kematian), Dewa Surya (dewa matahari), Dewa Agni (dewa api), Dewa Candra (dewa bulan) dan Dewa Kuwera (dewa harta, kekayaan).
2. *Sad Upaya Guna*. Konsep ini mengajarkan kepada pemimpin untuk bersahabat dengan para pemimpin lainnya dan mengembangkan enam sifat persahabatan, antara lain:
 - a. *Siddhi*, yaitu kemampuan untuk mengadakan persahabatan
 - b. *Wigrha*, yaitu kemampuan untuk memisahkan setiap permasalahan dan dapat mempertahankan hubungan baik

³⁶ *Ibid.*, hlm 53-73. Selain itu, dalam banyak buku sejenis, para penulis selain memaparkan konsep kepemimpinan yang sudah dikenal selama ini, juga mengembangkannya. Lihat misalnya, Tut De Ariasna. 2011. *Kepemimpinan Hindu*. Surabaya: Paramita. hlm. 9-41. Sebenarnya, masalah kepemimpinan juga sangat banyak ditemukan di Bali, salah satunya dalam Lontar Wрати Sasana yang menceritakan nasehat etik kepada para pemimpin. Lihat lebih lengkap I Ketut Subagiasta. 2010. *Kepemimpinan Hindu dalam Lontar Wрати Sasana*. Surabaya: Paramita.

- c. *Wibawa*, yaitu memiliki kewibawaan
 - d. *Winarya*, yaitu kecakapan dalam memimpin
 - e. *Sasraya*, yaitu kecakapan untuk menghadapi lawan yang kuat
 - f. *Sthana*, yaitu mampu mempertahankan setiap hubungan yang baik
3. *Catur Paramita*. Konsep ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin haruslah melengkapi dirinya dengan empat sifat utama, antara lain:
- a. *Maitri*, yaitu mampu memandang orang lain sebagai teman karib atau sahabat
 - b. *Karuna*, yaitu mampu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan atau yang dipimpinya
 - c. *Upeksha*, yaitu pemimpin tidak boleh terlalu memperhatikan pendapat orang lain yang belum tentu benar
 - d. *Mudhita*, yaitu selalu berusaha mendapatkan simpati orang lain
4. *Panca Sthiti Dharmaning Prabhu*. Konsep ini mengajarkan kepada pemimpin untuk memberikan contoh dan keteladanan bagi orang lain dan bawahannya. Konsep ini sebenarnya diambil dari cerita pewayangan dengan lakon Arjuna Sastrabahu. Lima keteladanan itu adalah:
- a. *Ing ngarsa sung tulada*, yaitu pemimpin berada di depan memberikan contoh dan motivasi
 - b. *Ing madya mangun karsa*, yaitu pemimpin berada di tengah-tengah masyarakat dengan mengembangkan atau membangkitkan semangat dan kreativitas

- c. *Tut wuri handayani*, yaitu pemimpin berada di belakang untuk memberikan dorongan semangat, kebebasan berkreasi dan mengembangkan ide-ide yang positif
 - d. *Maju tanpa bala*, yaitu pemimpin harus berani maju ke depan walaupun tanpa anak buah, bahkan rela berkorban dengan kepentingan bawahannya
 - e. *Sakti tanpa aji*, yaitu seorang pemimpin meskipun sukses dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya tidak mudah menerima pujian.
5. *Sad Warnaning Rajaniti*. Ajaran ini juga disebut *Sad Sasana* yang mengajarkan bahwa pemimpin harus memiliki enam sifat utama, sebagai berikut:
- a. *Abhikamika*, yaitu pemimpin harus tampil simpatik, berorientasi ke bawah dan mengutamakan rakyat banyak
 - b. *Prajna*, yaitu pemimpin harus bersikap bijaksana dan cerdas dengan menguasai agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - c. *Utsaha*, yaitu pemimpin harus produktif, kreatif, inovatif dan berinisiatif untuk maju
 - d. *Atma Sampad*, yaitu pemimpin harus memiliki kepribadian yang baik, integritas tinggi, moral luhur dan obyektif
 - e. *Satya Samanta*, yaitu pemimpin harus mampu mengawasi bawahannya secara efektif
 - f. *Aksuda Parisakta*, yaitu pemimpin harus akomodatif, memadukan berbagai perbedaan dalam permusyawaratan, pandai berdiplomasi dan mampu menyerap aspirasi bawahannya

6. *Panca Upaya Sandhi*. Konsep ini mengajarkan kepada pemimpin untuk menghadapi lawan-lawannya. Dalam lontar Siwa Bhudda Gama Tattwa disebutkan antara lain:
 - a. *Maya*, yaitu mempunyai upaya untuk mengumpulkan data atas permasalahan yang belum jelas
 - b. *Upeksha*, yaitu mempunyai gagasan untuk menyelidiki dan menganalisis semua data dan informasi yang diterima
 - c. *Indrajala*, yaitu mempunyai upaya untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi
 - d. *Wikrama*, yaitu mempunyai upaya untuk melaksanakan semua usaha yang telah dirumuskan pada tingkat Indrajala
 - e. *Lokika*, yaitu mempunyai logika untuk melaksanakan semua tindakannya agar selalui diawali dengan pertimbangan yang matang dan dapat diterima oleh akal sehat dan tidak berdasarkan emosi.
7. *Nawa Natya*. Ajaran ini memberikan pedoman agar seorang pemimpin dalam memilih pembantu-pembantunya haruslah selalu bijaksana. Dalam lontar Nawa Natya yang ditulis dengan Jawa Kuno disebutkan sembilan tuntunan, antara lain:
 - a. *Pradya Widagda*, yaitu pemimpin itu orang yang bijaksana, luas pengetahuannya, pintar, mahir dalam berbagai ilmu
 - b. *Wira Sarwa Yuda*, yaitu pemimpin itu seorang pemberani dan pantang menyerah dalam pertempuran
 - c. *Paramartha*, yaitu pemimpin itu orang yang mempunyai budi pekerti luhur
 - d. *Dhirotsaha*, yaitu pemimpin itu orang yang tekun, ulet, dan tidak kenal lelah dalam melaksanakan tugasnya

- e. *Pragiwakya*, yaitu pemimpin itu orang yang pandai bicara dan cakap berdiplomasi
 - f. *Samaupaya*, yaitu pemimpin itu orang tidak pernah ingkar janji, selalu setia pada kata-kata yang diucapkannya
 - g. *Laghawangartha*, yaitu pemimpin itu orang yang tidak pernah pamrih dengan harta benda dan ikhlas
 - h. *Wruh ring sarwa bastra*, yaitu pemimpin itu orang pandai mengatasi berbagai masalah, kekacauan dan kerusuhan.
8. *Tri Upaya Sandhi*. Dalam lontar Rajapati Candala disebutkan bahwa ada tiga upaya yang harus dilakukan seorang pemimpin, sebagai berikut:
- a. *Rupa*, yaitu seorang pemimpin harus memahami arti dari raut wajah orang yang dipimpinnya, apakah dalam keadaan senang, sedih atau stress. Dengan memahami ekspresi ini, pemimpin akan mencari jalan dan petunjuk yang bijaksana.
 - b. *Wangsa*, yaitu seorang pemimpin harus memahami stratifikasi sosial orang yang dipimpinnya dari klan, soroh, wangsa atau kelompok sehingga ia memiliki banyak pendekatan
 - c. *Guna*, yaitu seorang pemimpin harus memahami guna atau sifat, karakter, tabiat dan bakat orang yang dipimpinnya. Dengan begitu, ia akan memahami dan mengembangkan kesenangan, kepiawaian, potensi para bawahannya.

Berdasarkan berbagai pengertian dan konsep lain tentang ilmu politik, Niti Sastra tampaknya menjadi aspek moralitas dari Arthasastra, sekaligus menjadi kitab etika Hindu, sebagaimana juga dapat dibaca dalam Slokantara dan Sarasamuscaya. Semua ajaran dalam Arthasastra dan Niti

Sastra disampaikan secara estetik melalui pernyataan-pernyataannya yang indah dan menawan tetapi juga mistik karena tidak mudah memahaminya dengan sederhana karena dibutuhkan kontemplasi untuk memaknai bahasa simbolik dan analoginya. Di Bali, Arthasastra dan Niti Sastra diajarkan melalui *Subhasita* atau kata-kata bijak atau aphorisme yang sangat penting dalam kesusasteraan Hindu.

Agastya³⁷ menyatakan bahwa *Subhasita* telah banyak dikutip dalam berbagai percakapan dan membentuknya menjadi tak terhingga yang disampaikan dalam tradisi bertutur atau *Subhasita Sanggraha*. Karya sastra Niti ini menjadi monumental karena dikenal di banyak negara, termasuk di Indonesia di mana kesusasteraan Sanskerta diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Kuna, seperti Ramayana, Mahabharata, Purana hingga Panca Tantra. Karya lain dalam Jawa Kuna yang bersumber dari sastra Sanskerta adalah Nitisastra atau Nitisara baik kerangka maupun antologi bahasa Sanskertanya yang bergaya agak bebas yang bersumber dari Kamandakya Nitisastra. *Subhasita* sering dirangkai ke dalam cerita-cerita atau karya *sastra katha*, misalnya Panca Tantra dan Hitopadesa. Hitopadesa atau Hita Upadesa adalah lanjutan dari Panca Tantra dan merupakan suatu kumpulan daftar nasehat-nasehat yang sangat berguna. Kitab ini juga dapat dikatakan sebagai ajaran tentang hidup sejahtera dengan menggunakan berbagai fabel dan menjadi buku tentang seni bercerita di India yang secara tradisi dapat ditelusuri pada kitab Rgweda dan Upanisad (dari tahun 1500 hingga 500 Sebelum Masehi).³⁸

Dengan demikian, substansi Kautilya Arthasastra yang meliputi ajaran politik, kekuasaan, negara dan etikatelah diterjemahkan dengan sangat baik melalui nasehat-nasehat

³⁷Tentang ini diambil dari IBG. Agastya. "Cerita Tantri sebagai Nitisastra dan Subhasita". *Makalah Temu Sastra Purnama Jagatnatha*, tanggal 14 April 2014. hlm. 1-3

³⁸Lihat juga lebih lengkap I Wayan Maswinara (alih Bahasa). 2000. *Hita Upadesa*. Surabaya: Paramita.

kebaikan atau *Subhasita* di dalam karya sastra Panca Tantra. Seperti diketahui, Panca Tantra menceritakan bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya lengkap dengan segala dinamikanya. Mungkin semua aspek kehidupan yang dilakukan melalui binatang tidak eksplisit sebagai representasi ilmu politik, tetapi bagaimana perilaku manusia satu dengan manusia lainnya maupun dalam kelompoknya penuh dengan tindakan-tindakan politik. Dalam interaksi sosial itu, terdapat strategi, perlawanan hingga bagaimana membangun hubungan yang baik.

Dalam lima buku yang disadur Darmayasa,³⁹ tindakan politik dalam cerita Tantri secara berturut-turut dapat dibaca dengan tema "Perselisihan di Antara Sahabat", "Mendapatkan Teman", "Gagak dan Burun Hantu", "Kehilangan Keberuntungan" dan "Perbuatan Tanpa Pertimbangan Baik". Menurut Agastya,⁴⁰ Panca Tantra adalah salah satu kitab yang dikenal sangat luas di dunia. Tradisi sastra di Bali mewarisi sejumlah teks Panca Tantra yang dikenal dengan *Tantri Kamandaka* atau *Tantra Wakya* atau *Candra Pinggala*. Resepsi estetisnya dikenal dengan *Kidung Tantri Nandaka Prakarana*, *Kidung Tantri Manduka Prakarana* dan *Kidung Tantri Pisaca Prakarana*, di samping *Parikan Tantri*, *Tantri Prasi*, dlsb [*]

³⁹Darmayasa (penyadur). 1995. *Perselisihan di Antara Sahabat. Buku Pertama*. Denpasar: Manikgeni; 1996. *Mendapatkan Teman. Buku Kedua*; 1996. *Gagak dan Burun Hantu. Buku Ketiga*; 1998. *Kehilangan Keberuntungan. Buku Keempat*; dan 1998. *Perbuatan Tanpa Pertimbangan Baik. Buku Kelima*.

⁴⁰IBG. Agastya, *Op.Cit.*, hlm. 2

BAB LIMA

KAUTILYA DALAM PERBANDINGAN DAN TAFSIR KEKUASAAN

“Inilah enam kebijakan politik. Jika berada dalam dalam keadaan lebih lemah dibandingkan dengan musuh, ia hendaknya menyatakan perdamaian. Jika lebih unggul, ia hendaknya menyatakan perang. (Jika ia mengira) ‘Musuh tidak dapat menyerang saya, begitupun saya tidak dapat menyerangnya,’ ia harus tetap netral. Jika memiliki sejumlah kelebihan sifat unggul, ia harus bersiaga. Jika kehilangan kekuasaan, ia harus mencari perlindungan. Dalam suatu pekerjaan yang bisa dicapai dengan bantuan teman, ia harus mengadakan kebijakan ganda” (Arthashastra Buku Ketujuh, Bab Satu, Bagian 98, 99: 13-18)

A. Kautilya dan Niccolo Machiavelli

1. Perbedaan yang Menyatukan

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kautilya paling sering dikaitkan dengan Machiavelli. Tak sedikit, intelektual Hindu menyamakannya lalu secara dramatis menyebut Kautilya sebagai Machiavelli dari timur. Mungkin karena keduanya sama-sama *galak*, sedikit kotor dan juga kejam jika menyangkut bagaimana melindungi keamanan negara. Mereka bahkan dimasukkan sebagai pemikir yang “tak

berhati” dan “tak bermoral”. Memang pada akhirnya, perbandingan keduanya tetap tidak bisa diametral karena beberapa faktor, seperti waktu dan tempat kelahirannya, juga situasi dan kondisi yang mewarnai bukan saja jejak kehidupannya tetapi juga pikiran-pikirannya. Meskipun ada *keliyanaan* yang cukup besar, keduanya tetap dianggap memiliki kesamaan, terutama sekali lagi, pandangannya tentang keamanan negara dan melindunginya dari ancaman musuh.

Perbedaan kedua tokoh yang berbeda jaman ini dapat kita mulai dari suasana kebatinan yang memengaruhi gagasannya, dan bagaimana para ahli memberikan tanggapan terhadap keduanya. Dalam upaya melacak kesamaan kedua tokoh ini, Surpi⁴¹ dalam artikelnya memulai dengan uraiannya tentang peradaban Weda, yang salah satunya telah melahirkan pemikir besar di bidang politik, yaitu Kautilya. Maharsi ini tidak saja sebagai penulis Arthashastra tetapi juga perdana menteri, penasihat politik utama, juga seorang Brahmana yang agung. Kitab Arthashastra mungkin disusun Kautilya saat ia pensiun dengan mengundurkan diri dari pelayanannya dalam pemerintahan Candragupta. Sementara itu, jauh setelah Kautilya, tepatnya saat peradaban manusia memasuki abad pencerahan atau, Niccolo Machiavelli hadir dengan menawarkan pikiran besar di bidang politik modern. Mengutip Russell, Surpi menyatakan filsafat politik Machiavelli itu bersifat ilmiah dan empiris, yang hampir sebagian besar pemikirannya didasarkan pada pengalaman hidupnya sendiri, dan berbicara tentang cara untuk meraih tujuan, terlepas apakah tujuan itu baik atau buruk.

⁴¹Ni Kadek Surpi. *Op.Cit.*, hlm. 61-66.

Kedua pemikir politik ini, Kautilya dan Machiavelli, tidak bisa dibandingkan begitu rupa, terutama karena landasan berpikirnya tidak sama. Machiavelli menggunakan daya pikir dan pengalaman empirisnya semata dalam menyusun pemikiran politik, sedangkan Kautilya menulis dengan literatur yang sudah disusun oleh para rsi pada jaman sebelumnya dan pengetahuan politik juga sudah tersebar pada sejumlah dinasti politik pada kerajaan Hindu. Perbedaan yang lain, Kautilya mendasarkan tulisannya pada intuisi kebrahmanaanya, agama dan sastra, sedangkan Machiavelli melalui berbagai pernyataan kerasnya kadang mengutuk agama dan mengambil posisi yang berjauhan dengan agama.

Boesche, seperti dikutip Surpi menyatakan walaupun Machiavelli disebut sebagai *"a teacher of evil"* namun pemikirannya juga jauh lebih moderat meskipun ia tetap dianggap radikal pada jamannya. Ia misalnya, menghindari semua prinsip moral yang absolut dan menilai tindakan baik atau buruk berdasarkan konsekuensinya saja. Pendapatnya ini menandakan apa yang dicari Machiavelli bukanlah barang yang absolut dan tidak lekang oleh waktu, tetapi barang umum atau barang publik yang dapat diekspresikan secara beragam. Bagi Machiavelli, seseorang atau kita harus rela kadang-kadang menggunakan cara-cara politik yang keras, kejam, atau yang oleh publik disebut tidak bermoral. Ia juga sepakat dengan orang-orang sezamannya bahwa tujuan politik yang tepat adalah kehormatan, kemuliaan, dan ketenaran.

Lebih lanjut, ada sebuah nasihat Machiavelli yang sangat terkenal bahwa seorang pangeran wajib memperoleh kekuatan untuk menjadi tidak baik, dan memahami kapan meng-gunakannya dan kapan tidak menggunakannya. Pendek kata, seorang pemimpin politik dan atau militer harus memiliki pemahaman bahwa untuk mewujudkan sesuatu

yang baik, mulia, agung hingga yang megah, misalnya mendirikan negara baru atau mendirikan aturan hukum atau menyelamatkan pasukan, seseorang harus rela mengotori tangannya dengan cara yang bahkan dianggap tidak bermoral. Dan jika seseorang ingin mencapai suatu kebaikan, Machiavelli juga berpendapat bahwa seseorang harus rela melakukan apa yang secara umum dianggap sebagai tindakan jahat atau tidak bermoral. Pandangan Machiavelli ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Kautilya yang menyatakan bahwa musuh yang jahat harus ditundukkan dengan berbagai, dengan jahat juga sekalipun sepanjang demi melindungi negara. Meskipun demikian, bukan berarti seorang pemimpin boleh menggunakan cara-cara tidak terpuji dan sewenang-wenang pada setiap kesempatan. Artinya, pemimpin harus tahu waktu yang tepat untuk menggunakan cara-cara itu.

Buku *The Prince* yang ditulis Machiavelli secara eksplisit menanggalkan pertimbangan moralitas yang menjadi acuan perilaku para penguasa. Russel seperti dikutip Surpi menyatakan bahwa seorang pemimpin akan mati jika ia selalu berbuat baik. Oleh karena itu, ia juga harus selicik serigala dan segalak singa. Pernyataan ini dimuat pada bukunya "*In What Way Princess Must Keep Faith*", Bab XVIII yang menyatakan bahwa para raja harus menjaga imannya ketika memang dibutuhkan, bukan sebaliknya, seorang raja suatu saat harus mengingkari imannya. Machiavelli secara tegas menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memainkan dramaturgi dengan menyamarkan sikap aslinya, pandai berpura-pura, pintar menyembunyikan diri, menjadi manusia yang sederhana dan siap memenuhi berbagai kebutuhan yang muncul. Machiavelli menegaskan pula bahwa seorang raja haruslah terlihat seperti seorang yang religius.

Meskipun ada kesamaan, gagasan Machiavelli seperti di atas mungkin terasa masih dangkal tinimbang gagasan rinci Kautilya tentang seorang raja, menteri maupun para pemimpin kerajaan (lihat kembali uraian tentang teori politik pada bab sebelumnya). Meskipun demikian, satu hal yang dianggap sama-sama penting dari keduanya adalah bagaimana memperjuangkan tujuan politik dengan memilih strategi yang tepat dan benar sesuai kebutuhan. Bagi seorang santa, jika terjun ke dunia politik pasti juga menginginkan kesuksesan sebagaimana layaknya seorang pendosa. Machiavelli menulis banyak contoh pendosa yang berhasil lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan para santa yang berhasil. Tidak terang benar ia menyatakan bahwa ilmu tentang keberhasilan memang harus dipelajari sama baiknya oleh pendosa maupun orang baik.

Persoalan mahapenting lainnya, mungkin menjadi puncak pemikiran Machiavelli adalah kekuasaan yang seringkali dianggapnya bergantung pada opini, dan opini bergantung pada propaganda. Ia membenarkan bahwa sebuah keuntungan yang ada dalam propaganda tampaknya lebih berbudi tinimbang musuhnya, dan bahwa cara agar tampak berbudi, pastilah berbudi. Dengan adagium ini seringkali terjadi bahwa kemenangan dapat berada pada pihak yang memiliki sebagian besar dari apa yang dianggap baik oleh publik. Apa yang dikatakannya Machiavelli relevan dengan situasi di Barat saat itu. Menurut Machiavelli, kadang perlu memperlihatkan sebuah wujud kebenaran di hadapan publik yang bodoh.

Adapun moralisme Kautilya mengikuti tradisi *rajadharm* (tugas raja), yaitu seorang raja haruslah selalu berpegang pada *dharma*, sedangkan Machiavelli lebih jamak dipandu oleh ketegangan antara moral dan apa yang seharusnya. Berdasarkan ini, keduanya tampak sepakat bahwa

keberhasilan adalah *sumum bonum* dalam kehidupan politik. Keduanya lebih menekankan dua aspek yang berbeda. Seorang brahmin Hindu, Kautilya ingin menemukan kekuatan politis pada *dharma*, sedangkan Machiavelli skeptis tentang kemanjuran moralitas belaka dan ingin melihat kebajikan dibentengi kekuatan yang nyata.

Kautilya dalam bab penutup Arthashastra menegaskan kembali bahwa sumber kehidupan umat manusia adalah *artha* (kesejahteraan) yang terdapat pada bumi yang ditinggali manusia. Ilmu yang mencakup cara untuk mewujudkan sekaligus melindungi bumi, tidak lain Arthashastra. Kautilya memandang bahwa ilmu politik adalah kunci utama kesejahteraan masyarakat bahkan bumi sekalian. Secara implisit, Kautilya menegaskan bahwa ilmu politik harus didedikasikan untuk menjaga dan melindungi bumi, bukan merusaknya hanya karena semata-mata ingin berkuasa. Dengan pikiran hebatnya seperti ini menempatkan Kautilya sebagai *Teachers of Political Morals*.

Avalokitesvari⁴² mempertegas apa yang diuraikan Surpi dengan merujuk apa yang pernah diungkapkan Max Weber sewaktu memberikan kuliah politiknya yang berjudul *Politics of Vocation*. Menurut Weber, pemikiran Machiavelli bukanlah pemikiran yang brutal melainkan moderat, jika dibandingkan dengan pemikiran Sun Tzu dalam *The Arts of War* dan pemikiran Kautilya dalam Arthashastra. Kedua pemikiran ini berisi anjuran dalam *state craft* (seni memerintah) dengan cara yang lebih kejam melalui penggunaan mata-mata, membunuh musuh politik, penggunaan tentara bayaran, bahkan penyiksaan. Memang penggunaan tentara bayaran sudah lama dikenal, bahkan oleh Aristoteles tentang tirani Pisistratus dan Tacitus tentang penguasa Tiberius, namun Machiavelli tidak menganjurkan pemimpinnya untuk

⁴²Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari. *Op.Cit.*, hlm. 21.

melakukan apa yang dikatakan Sun Tzu dan Kautilya. Machiavelli bahkan terkesan lebih lunak hanya dengan menganjurkan paham oportunisme politik yang berlandaskan pada sikap yang tamak, kejam, tidak dapat dipercaya, congkak dan keras kepala.

Berdasarkan diskusi di atas, saya menyimpulkan bahwa Machiavelli tampaknya yang “hanya” bermain di wilayah politik modern, sedangkan gagasan Kautilya Arthashastra lebih komprehensif karena juga membicarakan banyak hal yang berkenaan dengan negara (politik, hukum, keadilan, ekonomi, kepemimpinan, dlsb). Tidak sampai di sini, Kautilya juga menjelaskan hal-hal teknis dan praktis, misalnya bagaimana penguasa seharusnya mengelola pertanian, mineral dan energi untuk kepentingan rakyat banyak. Pada titik ini, Kautilya tidak cukup disamakan dengan Machiavelli yang lebih modern, tetapi dapat juga disandingkan dengan Plato dan Aristoteles pada masa Yunani klasik. Implikasinya, Kautilya tidak bisa hanya dibaca secara monolitik namun justru spektrumnya diperlebar mengingat Kautilya menjadi semacam glorifikasi dari banyak pemikiran dan tokoh.

2. Kesamaan dalam Dua Gagasan Besar

Untuk membuka ruang kesamaan antara Kautilya dan Machiavelli,¹³ dalam sub bab ini saya menggunakan karya L.N. Rangarajan⁴³ (selanjutnya disingkat LNR) dan Donno Daniel⁴⁴ (DD) untuk melihat kesamaan pandangan keduanya.

¹³Khusus Machiavelli dapat dibaca melalui Paul Strathern. 1997. *Machiavelli in 90 Minutes*. Jakarta: Erlangga; Niccolo Machiavelli. 1891 (2002). *Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik*. Alih Bahasa C. Woekirsari dari judul asli *Il Principe*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; Niccolo Machiavelli. 2001. *The Art of War*, translated from *The Art of War*. Da Capo Press, Cambridge, USA.; Michael Curtis. 1961. *The Great Political Theories*. New York, Avpn Book Division; dan St. Sularto. 2003. *Niccolo Machiavelli: Penguasa Arsitek Masyarakat*. Jakarta: Kompas.

⁴³L.N. Rangarajan (ed). 1992. *The Arthashastra*. Delhi: Penguin Book.

⁴⁴Donno Daniel. *Op.Cit*.

Selanjutnya, saya juga berkesempatan membangun tematik perbandingan, yang memperlihatkan dua simpulan besar antara Kautilya dan Machiavelli, yaitu *pertama*, tema tentang "Negara dan Kekuasaan". Dalam DD disebutkan, agak berbeda dengan Plato yang mengajarkan negara harus dijalankan secara paternalistik serta bertolak belakang dengan gagasan Aristoteles tentang cara matrimonial, Machiavelli menginginkan kekuasaan negara diselenggarakan secara despotik, yakni dijalankan secara tunggal oleh penguasa kepada rakyatnya. Dan untuk menjaga keutuhan negara harus diperkuat dengan tentara atau militer yang hebat, yang dilatih dengan baik, di mana hukum harus tegak (hal 47, 48, 53).

Sementara dalam LNR, Kautilya mengasumsikan bahwa keamanan negara hanya bisa terjamin jika militernya kuat, namun ia memperluasnya dengan bagaimana pola hubungan kerja yang baik di antara perangkat kekuasaan penyelenggara negara, di mana militer termasuk di dalamnya. Pandangan ini diuraikan lengkap pada Bab III tentang Elemen-Elemen Pembentuk Negara dan Ancaman-Ancamannya (hal 25-37). Pada bab ini dijelaskan secara lengkap elemen apa saja yang dijadikan penyusun negara, para penasehat dan menteri atau *amatya*, angkatan perang, sekutu/mitra di luar negeri, hubungan antara raja dan menteri, antara menteri dan janapada, antara kosa (kekayaan) dan tentara, antara tentara dan sekutu.

Kedua, tema tentang "Penguasa Negara". DD menguraikan bahwa seorang pemimpin harus dicintai rakyatnya dan ini tidak sulit didapat asalkan penguasa tidak menyakiti hati rakyatnya serta menjadikan kemakmuran rakyat sebagai prioritas (hal 14). Dan untuk menjadi penguasa yang baik, maka mereka harus mempersiapkan diri secara matang dan banyak belajar dari sifat-sifat binatang. Jika perlu penguasa itu seperti setengah binatang (hal 62). Yang terpenting adalah bagaimana ia mem-

praktikkannya dengan cara *generous, open-handed, merciful, faithful, fierce and bold, courteous, frank, pliant, merry, religious* (hal 56). Menurut Machiavelli, rakyat akan senang jika pemimpinnya memiliki kualitas seperti ini (hal 56-57) dan terpuji jika melakukannya secara sungguh-sungguh, berbelas kasihan, setia, manusiawi, jujur dan religius (hal 63). Dengan sifat-sifat sempurna ini, penguasa harus memiliki kualifikasi sebagai orang yang berhati-hati untuk berbuat tidak baik sehingga ia terhindar dari kebencian rakyatnya. Penguasa juga tidak boleh serakah atau merampas hak milik rakyatnya (hal 63, 95).

Dalam LNR dinyatakan, gagasan Kautilya tentang bagaimana menyiapkan penguasa yang baik dapat dilihat pada salah satu bab yang khusus membicarakan Raja. Kautilya bahkan menguraikan detail tentang perlunya pelatihan khusus bagi calon raja, bagaimana raja harus mengutamakan disiplin diri (*sadhana*), mengikuti pelatihan untuk sang calon pangeran. Masuk ke aspek etika dan religius, seorang raja harus mampu mengalahkan enam musuh yang ada dalam dirinya, sehingga ia bisa dikatakan sebagai *Rajarishi-Raja* yang bijaksana. Pada bab ini pula diuraikan tugas-tugas apa yang harus dilakukan seorang calon raja kelak ketika naik tahta, bagaimana ia diamankan dan dilindungi dari bahaya orang-orang terdekatnya, pemberontakan, persekongkolan dan pengkhianatan.

B. Kautilya dan Thomas Hobbes

Salah satu gagasan Kautilya, yaitu tentang negara dan bagaimana mengelolanya, telah pula mendapat banyak perhatian. Dan gagasan ini memang yang paling sulit dijelaskan. Sejak lama, bukan saja dalam ilmu politik, soal negara juga menjadi kajian menarik dalam antropologi. Ketertarikan para antropolog di masa lalu adalah fenomena orang, yang sepanjang hayatnya, dipengaruhi oleh pemikiran dan tindakan orang lain

di sekitarnya. Atas hal ini, pendiri antropologi lalu mengembangkan konsep masyarakat sebagai sistem dari bagian-bagian yang saling berkaitan.⁴⁵

Dalam upayanya membangun hubungan antarmanusia, orang seringkali dihambat oleh tindakan orang lain karena mereka, nenek moyang mereka, terlibat dalam suatu kontrak. Hobbes memandang kontrak seperti itu yang menghambat mereka dari bertindak sepenuhnya atas kehendak sendiri, melainkan untuk menguntungkan bagi setiap orang. Hal yang sama dikemukakan Rousseau yang mengatakan bahwa masyarakat, bukan sebagai gejala alam, melainkan penjumlahan kekuatan-kekuatan (yang) hanya dapat muncul apabila beberapa orang berhimpun.⁴⁶ Melanjutkan pemikiran Hobbes dan Rousseau di atas, termasuk ke arah konsep negara, Dwipayana⁴⁷ dengan runtut menyandingkannya dengan Kautilya Arthashastra.

Konsep negara, sampai hari ini memang agak tidak mudah didefinisikan. Bahkan dalam antropologi sekalipun yang menjadi tugasnya membicarakan kesukubangsaan, juga penuh diskusi. Istilah negara, bangsa dan kebangsaan sering menjadi perdebatan. Salah satu pemicu perdebatan itu adalah gagasan Anderson⁴⁸ dalam *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*, yang di dalamnya memuat dimensi sensoris jika membicarakan rasa kebangsaan sehingga nasionalisme tidak semata-mata dipandang hanya sebagai prinsip politik. Antropologi menempatkan nasionalisme bersamaan dengan negara karena di dalamnya terdapat nilai-nilai kesetiaan, komitmen dan rasa memiliki negara yang tidak hanya bersifat instrumental, yaitu keterikatan oleh prinsip politik melainkan juga bersifat sensorik yang berisi sentimen, emosi dan perasaan.⁴⁹

⁴⁵ Lihat Achmad Fedyani Saifuddin. 2006. *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana. hlm. 141.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 141

⁴⁷ Dirangkum dari AAGN. Ari Dwipayana. "Antara Leviathan dan Hukum Ikan". *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*. Vol. 3 No 2 November 1999: 188-205.

⁴⁸ Lihat lebih lengkap Benedict Anderson. 1991. *Imagined Communities: Reflection The Origins and Spread Nationalism*. London: Verso.

⁴⁹ Lihat juga Ernest Gellner. 1983. *Nations and Nationalism. New Perspectives on the Past*. Oxford: Basil Blackwell.

Pertanyaannya adalah jika rasa berbangsa dan bernegara tidak hanya berprinsip politik, tetapi berdimensi sensorik seperti di atas, maka rasa kebangsaan juga akan menjadi sesuatu yang *imagined*. Artinya, orang-orang yang mendefinisikan diri mereka sebagai warga suatu bangsa, meski tidak pernah saling mengenal, bertemu, atau bahkan mendengar, namun dalam pikiran mereka hidup suatu image mengenai suatu kesatuan bersama. Itulah sebabnya ada warga negara yang rela mengorbankan jiwa raganya demi membela bangsa dan negaranya, sebagaimana diartikan dalam cinta tanah air atau bela negara.

Berangkat dari gagasan Anderson bahwa *nation* itu pada akhirnya *imagined*, maka nasionalisme adalah suatu ideologi yang menyelimuti imajinasi itu, sehingga nasionalisme dapat saja mengalami kemerosotan apabila terdapat distorsi yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dalam negara bangsa. Oleh karena itu, negara-bangsa juga harus direfleksikan kembali bahkan juga dapat diintropeksi mengingat akan berhadapan dengan perubahan. Indonesia yang beragam oleh banyak hal (suku, agama, ras, etnis, bahasa, adat istiadat, dlsb) secara keseluruhan harus diikat oleh rasa kebangsaan yang setidaknya terdiri dari tiga pilar, yaitu kesadaran identitas bersama, kesadaran historis dan gerakan bersama dalam menghadapi berbagai ancaman. Ketiga pilar ini bekerja bersama-sama, terlebih Indonesia dianggap sebagai salah satu negara-bangsa yang muncul pasca perang dunia kedua.⁵⁰

Berkelindan dengan antropologi, ilmu politik juga mengalami kesulitan untuk mendefinisikan negara. Kesulitan ini salah satunya disebabkan karena belum ditemukannya cukup bukti untuk meyakinkan tentang genetika negara. Implikasinya,

⁵⁰ Lihat lebih lengkap Benedict Anderson. 1991. *Imagined Communities: Reflection The Origins and Spread Nationalism*. London: Verso.

berbagai teori tentang negara umumnya bercorak spekulatif dan abstrak. Oleh karena itu, kita perlu kembali pada teori kontrak sosial, yang sekurang-kurangnya dianggap sebagai dasar hubungan negara dan masyarakat. Tampaknya, teori kontrak sosial terinspirasi dari berbagai tradisi pemikiran, mulai dari pemikiran klasik India dalam Kautilya Arthashastra, rasionalisme dalam tulisan para filosof Yunani Kuno hingga pemikiran John Locke dan Rousseau. Apa yang dapat diperbandingkan antara Hobbes dalam *Leviathan* dan Kautilya dalam arthashastra?

Leviathan adalah karya besar Thomas Hobbes, selain *The Element of Law* (1640), *Natural and Political* (1640) dan *The Citizen* (1642). Seperti Kautilya dan kebanyakan para ahli di masa lalu, kehadiran *Leviathan* juga sangat dipengaruhi oleh sejarah dan peristiwa besar yang dilaluinya. Misalnya, ketika ia dilahirkan pada 3 April 1588 di Malmesbury, Inggris, ia dan seluruh penduduk ketika itu terancam bahaya akibat kehadiran armada tak terkalahkan dari Spanyol. Selain peristiwa yang menakutkan dan peperangan yang melanda Inggris hingga kekalahan Raja Charles I, secara intelektualitas, Hobbes dipengaruhi oleh Machiavelli dan Bacon. Yang pasti, Hobbes bukanlah seorang negarawan atau bagian dari penguasa negara, tetapi filosof yang memiliki ketertarikan besar dalam bidang politik. Sebagai Machivellian, Hobbes searah dengan mentornya menemukan hukum moral yang bukan berdasarkan atas akal tetapi nafsu. Nafsu untuk berkuasa dianggapnya sebagai akar terdalam dari tingkah laku manusia, sehingga jika ada pandangan lain yang tidak sesuai dengan pendapatnya ini dianggap tidak mampu memahami tingkah laku manusia.

Lebih lanjut, keadaan Inggris yang penuh tekanan dan ketakutan serta potensial terjadi perang saudara, sejalan dengan penggambaran Hobbes sebagai keadaan alamiah sebelum terbentuknya masyarakat sipil yang dianggapnya bukan

keadaan yang ideal menemukan keamanan dan keadilan. Keadaan ini disebutnya penuh kekacauan, tanpa hukum dan tanpa perintah, serta tanpa ikatan sosial antarindividu. Menurut Hobbes, *the state of nature* itu didorong oleh sifat-sifat kodrat manusia sebagai makhluk yang cenderung mengutamakan dirinya sendiri, egoistik, individualistik dan tindakannya tidak dituntun oleh akal sehat tetapi didominasi oleh nafsu (*passion*). Manusia seolah berhadapan dengan manusia lainnya melalui kompetisi, ketidakpercayaan dan kebesaran diri. Salah satu pernyataan Hobbes yang terkenal mengenai alam adalah perang semua melawan semua. Jika setiap orang memiliki hak untuk setiap hal, maka setiap orang juga mempunyai hak untuk mengambilnya dari orang lain. Bagi Hobbes, kebahagiaan akan sulit ditemukan dalam keadaan alamiah manusia sebelum institusi yang disebut pemerintah atau negara ada. Jadi, keadaan alamiah terjadi karena absennya negara dan masyarakat sipil.⁵¹

Keadaan alamiah dengan segala kekacauan dan ketidakteraturan itu, menurut Hobbes harus dihentikan karena tidak dapat diteruskan dan berlangsung lama. Oleh karena itu, manusia dengan akalnya perlu menjalin hubungan dengan manusia lainnya melalui kontrak sosial. Manusia yang sebelumnya hidup dalam keadaan alamiah itu berjanji menyerahkan hak-hak kodrat yang dimilikinya dalam keadaan alamiah kepada seseorang atau kepada sebuah badan. Perjanjian melalui kontrak sosial ini mengakhiri anarkhi yang terjadi pada keadaan alamiah menuju terbentuknya negara. Selanjutnya Hobbes mengatakan bahwa hanya terdapat satu perjanjian, yaitu perjanjian pemerintahan dengan jalan mana segenap individu yang berjanji menyerahkan hak-hak kodrat yang mereka miliki ketika hidup dalam keadaan alamiah kepada

⁵¹ Lihat lebih lengkap tentang hal ini dalam Thomas Hobbes. 1962. *Leviathan*. M. Oakshott (ed). New York: Collier Books.

seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan mereka.

Namun, Hobbes juga mengatakan bahwa perjanjian saja belum cukup, karena itu harus pula diberikan kekuasaan. Bagi Hobbes, negara harus berkuasa penuh sebagaimana halnya binatang buas "Leviathan" yang dapat menaklukkan segenap binatang buas lainnya. Negara harus diberikan kekuasaan yang mutlak sehingga kekuasaan negara tidak dapat ditandingi dan disaingi oleh kekuasaan apapun. Pandangan kekuasaan negara yang absolut ini, mengantarkan Hobbes sebagai peletak dasar falsafah dan absolutisme negara. Pendeknya, kehendak Hobbes adalah tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan negara. Bagaimana pandangan Kautilya tentang kontrak sosial dan negara?

Pandangan Kautilya tentang negara dalam keadaan alamiah dapat dilacak saat ia menjadi penasehat utama Candragupta yang menawarkan "teori hukum ikan". Menurutny, dalam hukum ini, ikan yang besar akan memangsa ikan yang lebih kecil. Dalam keadaan seperti itu, manusia mengalami ketakutan dan kebingungan, yang dalam gambaran Hobbes, manusia satu merupakan lawan dari manusia lainnya. Dalam kondisi inilah terjadi anarki, tidak ada hukum dan negara yang mengatur kehidupan bersama. Untuk menyudahi keadaan alamiah ini, maka dibuat kontrak sosial dengan mengangkat Manu sebagai raja. Dalam kontrak sosialnya, masing-masing orang harus menyerahkan haknya kepada raja untuk digunakan sebagai jaminan kelangsungan hidup bersama. Bagi Kautilya, kehadiran negara atau raja lebih bertujuan untuk melaksanakan beberapa peran.

Pertama, peranan utama negara (atau raja) yaitu melindungi seluruh wilayah dan *janapada* (rakyatnya). Objek dari perlindungan negara adalah masyarakat atau loka yang terdiri dari *catur warna* dan *catur asrama* yang diperintah oleh raja untuk memelihara jalannya kekuasaan, mematuhi

kewajiban dan pekerjaannya. *Kedua*, peranan negara adalah memelihara kepatuhan kepada aturan yang ada. Negara melindungi *dharma* sehingga jika negara melindungi masyarakatnya, ia telah membawa masyarakatnya ke surga. Sebaliknya jika negara melalaikan tugasnya, masyarakat akan mendapatkan bencana. *Ketiga*, negara berperan memajukan kesejahteraan rakyatnya. Kautilya menyatakan sumpah seorang raja adalah selalu siaga untuk membuat rakyatnya bahagia. Oleh karena itu, negara menurut Kautilya memiliki otoritas mutlak untuk menarik pajak dari rakyatnya. Bahkan dirumuskan, jika seorang raja mampu bersikap adil dengan melindungi rakyatnya, ia akan memperoleh masing-masing seperenam bagian, jika tidak, ia hanya menerima seperenam bagian juga. Juga, jika raja yang tidak adil tetapi masih menarik pajak, setelah mati akan masuk neraka. *Keempat*, negara memiliki peranan untuk menjaga kepatuhan rakyatnya pada hukum dan keadilan. *Kelima*, negara berperan menjaga stabilitas perdamaian dunia dengan konsep *Mandala*.

Melalui teori kontrak sosial di atas, Kautilya memiliki posisi yang sama dengan Hobbes dalam membela posisi negara yang absolut. Beberapa pernyataan Kautilya dalam Arthashastra berikut menguatkan kesamaan pandangannya dengan Hobbes tentang Leviathan, hukum ikan dan keadaan (negara) alamiah:

“Ketika masyarakat tertindas oleh hukum ikan (matsyayana: ikan besar memangsa ikan yang lebih kecil), mereka mengangkat Manu, putra Wiswawat menjadi raja. Kemudian mereka menetapkan seperenam bagian dari biji-bijian (gandum) dan sepersepuluh dari barang-barang dan uang sebagai sumbangan. Raja yang telah menerima sumbangan ini akan mampu menjamin keberadaan dan kelangsungan warganya”.⁵²

⁵² Dwipayana., *Op.Cit.*, hlm. 199 yang kutipannya ini diambil dari *Majalah Warta Hindu Dharma* (1996: 8-9).

“Ketika ciptaan ini (yang diciptakan Prajapati) hidup tanpa raja, semuanya hidup dalam ketakutan dan kebingungan, menyebar ke segala arah. Tuhan menciptakan raja untuk melindungi semuanya (ciptaanNya). Pada kitab Mahabharata dinyatakan, memberikan perlindungan adalah pupuk atau esensi dari kewajiban raja/negara. Oleh karena itu, raja harus selalu aktif dan menyelesaikan kewajibannya: sumber kesejahteraan adalah aktivitas, dan kejahatan adalah sebaliknya”.⁵³

“Rakyat menderita akibat dari anarkis, seperti diibaratkan ikan besar memangsa ikan yang kecil. Mula-mula Manu turunan Wiswawat, terpilih menjadi raja mereka, menetapkan seperenam bagian dari biji yang tumbuh, dan sepersepuluh dari barang dagangan diberikan kepada raja. Atas penerimaan ini, raja berkewajiban dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan rakyatnya, dan memberikan ganjaran apabila aturan denda hukuman dan pajak dilanggar. Pertapaan juga menyerahkan seperenam biji-bijian yang dikumpulkannya dengan menganggap pembayaran tersebut kepada orang yang memberikan perlindungan”.⁵⁴

C. Politik Hindu di Nusantara

1. Pasca Kedatangan Hindu

Pertanyaan banyak orang apakah sistem politik Hindu yang berlaku di India, termasuk konsep politik dan kekuasaan yang tersebar dalam banyak kitab dan buku terbawa hingga ke

⁵³*Ibid.*, hlm. 199-200.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 201 yang kutipannya ini diambil dari dari KA. Nilakanta. 1957. *Manu and Kautilya*. London: Pelican Book. hlm. 107

luar India? Tidak dapat dipastikan secara valid. Cerita tentang kedatangan Maharsi Agastya sebagai brahmana pertama yang langsung datang dari India, masih diperdebatkan. Diskusi panjang juga mewarnai apakah kedatangan India ke Indonesia sebagai misi penyebaran agama Hindu, penaklukan atau perdagangan masih samar. Kedatangan rombongan pertama itu memiliki banyak misi dengan kehadiran para brahmana, ksatria dan waisya (pedagang) di dalamnya.

Namun anasir Arthasastra yang terserap ke dalam Panca Tantra atau kakawin Niti Sastra hingga ke Bali misalnya, menandakan pengaruh itu dapat menyebar, salah satunya melalui cerita dan berbagai karya sastra. Perjalanan Arthasastra dan Niti Sastra yang menyebar dari India ke beberapa negara membuktikan tesis itu. Misalnya, di Tibet ada ajaran *Niti-Niti* yang disebut *Tanjur*. Karya yang sama ditulis Masuraksa dengan judul *Subhasita Ratna Nidhi* yang bersumber dari ajaran Niti ditemukan bahasa Mongol, Mongol Barat, dan Mancuria. Begitu juga di Nepal dijumpai Chanakya Niti Sastra yang lengkap dan kitab lain *Subhasita Ratna Kosa*. Sedangkan di Srilangka terdapat ajaran Niti dalam bahasa Singghli. Darmayasa mencatat masih banyak lagi negara-negara di luar India yang terpengaruh dari bagaimana ajaran Niti itu dapat berkembang pesat.⁵⁵

Secara simplitis namun tanpa mengurangi aliran sejarah yang telah diyakini selama ini, usaha yang dapat dilakukan selain membaca pengaruh India melalui karya sastra di atas adalah menggambarkan kembali awal mula kedatangan Hindu di tanah nusantara, terutama saat kerajaan Hindu pertama hingga berakhir di Bali. Bagaimanapun, seperti diuraikan Sutrisno,⁵⁶ kehadiran agama Hindu dari India ke Indonesia dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam

⁵⁵Darmayasa, *Op.Cit.*, hlm. Xxii-xxiii.

⁵⁶Nanang Sutrisno, *Op.Cit.*, hlm. 12-15.

transformasi sosial-budaya dan lanskap peta politik di nusantara. Bahkan masuknya Hindu dianggap ikut mengeluarkan bangsa Indonesia dari residu sejarah yang buram (*nirleka*) sekaligus memperkenalkan-kannya dengan sistem politik yang baru. Fakta sejarah itu dapat dimulai dengan berdirinya kerajaan Kerajaan Kutai pada sekitar abad ke-4 masehi. Kehadiran kerajaan Hindu pertama di Indonesia ini, dengan raja Kudungga dan setelahnya Mulawarman menjadi awal mula sejarah politik nusantara wajah perpolitikan melalui kerajaan makin terang diteruskan secara berturut-turut di Jawa Barat melalui kerajaan Tarumanegara dengan raja Purnawarman (400-700 M), Kerajaan Kalingga (618-906 M) di Jawa Tengah yang dipimpin seorang raja perempuan bernama Ratu Simha yang pada masa kepemimpinannya diperkirakan telah ada kontak intensif antara Hindu dan Buddha.⁵⁷

Lebih lanjut, Sutrisno menguraikan bawa politik Hindu di Jawa mulai mengalami perkembangan pesat, terutama masa Mataram Kuno yang ditandai dengan banyak temuan prasasti dan artefak keagamaan Hindu. Pada masa ini pula, dinasti Sanjaya (Hindu-Siwa) dan dinasti Syailendra (Buddha Mahayana) menjadi penguasanya, dan keduanya (Siwa-Buddha) menjadi agama negara yang berkaitan dengan wangsa-wangsa kerajaan yang berkuasa. Semasa dengan itu, di Jawa Timur mulai juga muncul kerajaan Hindu bernama Kanjuruhan, sebagaimana tertulis dalam prasasti Dinoyo berangka tahun 760 M yang menceritakan bahwa pada abad ke-8, terdapat kerajaan yang dipimpin Dewasimha, berputra Limwa yang menggantikannya sebagai raja dengan Gajayana. Kerajaan Hindu di daerah Jawa Timur didirikan dinasti Isana

⁵⁷ Tentang sejarah Hindu awal mula di nusantara, lihat selengkapnya dalam Soekmono. 1981. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*. Yogyakarta: Kanisius.

(Isanawamsa) setelah berakhirnya kekuasaan Sanjayawamsa di Jawa Tengah. Raja pertama dari dinasti ini adalah Mpu Sindok (929-947 M) yang kemudian digantikan Dharmawangsa Teguh Anantawikramatunggadewa (991-1016 M). Pada masa ini pula perkembangan keagamaan Hindu semakin pesat dengan penulisan kembali teks-teks Hindu dan Buddha ke dalam bahasa Jawa Kuno. Penerus Dharmawangsa Teguh adalah Airlangga yang digambarkan sebagai titisan Wisnu, yang sebelum mangkat pada 1049 M, ia membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala (Singhasari) beribukota di Kahuripan dan Panjalu (Kadiri) yang beribukota di Daha.

Pada mulanya, kerajaan Panjalu (Kadiri) lebih berkembang dengan raja pertamanya Sri Jayawarsa Digjaya Sastraprabhu, sesuai prasasti berangka tahun 1104 M. Kejayaannya dilanjutkan oleh Kameswara (1115-1130 M) dan diteruskan oleh Jayabaya (1130-1160 M) yang pemerintahannya dikekalkan dalam Kakawin Bharatayuddha gubahan Mpu Sedah dan Mpu Panuluh. Jayabaya diganti Sarweswara (1160-1170 M), serta Aryeswara (1170-1180). Raja terakhir Kadiri adalah Krtajaya (1200-1222 M) dan pada masa inilah pemerintahan berpindah ke Singhasari setelah Ken Arok berhasil mengalahkan Krtajaya dalam sebuah pertempuran di Genter.

Kemenangan Ken Arok menjadikannya raja Singhasari pada 1222-1227 M, sebelum digulingkan Anusapati (1227-1248 M). Anusapati digulingkan oleh Tohjaya dan Tohjaya yang akhirnya digulingkan juga oleh Ranggawuni—putra Anusapati sendiri. Sejak 1248 M, Singhasari diperintah Ranggawuni dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardhana. Pada tahun 1254 M, Wisnuwardhana melantik puteranya, Krtanegara sebagai raja Singhasari dan meraih puncak kejayaannya. Dalam teks *Negarakertagama* disebutkan

bahwa Kertanegara berhasil menaklukkan Bali, Pahang, Sunda, Bakulapura (Kalimantan Barat) dan Gurun (Maluku). Selain itu, Kertanegara juga telah membangun hubungan politik dengan Campa dengan memberi salah satu putrinya kepada raja Campa, Jaya Simhawarman III. Kejayaan Singhasari akhirnya mengalami kehancuran pada 1292 M yang diakibatkan serangan dari kerajaan Kadiri yang mulai bangkit lagi setelah dipimpin Jayakatwang.

Diceritakan bahwa Raden Wijaya yang sedang mengejar tentara Kadiri ke utara terpaksa melarikan diri setelah mengetahui Singhasari jatuh. Ia bersama pasukannya lalu menyeberang ke Madura untuk mencari perlindungan kepada Arya Wiraraja di Sumenep. Atas saran dan jaminan Arya Wiraraja, Raden Wijaya mengabdikan diri ke Jayakatwang di Kadiri dan dianugerahi tanah di desa Tarik. Dengan memanfaatkan serangan pasukan Tiongkok ke Singhasari, maka Raden Wijaya berhasil menguasai Singhasari dan mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit. Dengan bantuan pasukan Singhasari yang kembali dari ekspansi Pamalayu ke Sumatera, Raden Wijaya lalu dinobatkan sebagai raja pertama Majapahit bergelar Krtarajasa Jayawardhana (1293-1309 M). Raden Wijaya digantikan Kalagemet atau Jayanegara (1309-1328 M) yang selanjutnya digantikan Bhre Kahuripan bergelar Tribhuwananottunggadewi Jayawisnuwardhani (1328-1360 M). Pada tahun 1331 M, muncul pemberontakan di Sadeng dan Keta yang berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Tribhuwananottunggadewi menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya, Hayam Wuruk yang bergelar Rajasanagara (1360-1369 M) dan Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan patih Gajah Mada inilah, Majapahit mengalami puncak keemasan. Seluruh wilayah nusantara (Indonesia

sekarang) berhasil dikuasi Mahapahit dan kekuasaannya juga merambat ke sejumlah wilayah di Asia Tenggara sekarang. Pasca mangkatnya Raja Hayam Wuruk, Majapahit mengalami masa kemunduran dan menuju kehancurannya, sekaligus ditandai dengan masuknya Islam ke Jawa. Penerus Majapahit akhir adalah Kertabumi atau Brawijaya yang memerintah pada tahun 1453-1478 M, tetapi tidak diketahui mengenai perjalanan kerajaannya.

Singkat cerita, setelah berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, Blambangan menjadi kerajaan Hindu terakhir yang baru dapat ditaklukkan oleh Mataram Islam dan VOC pada 1771 M, dan hanya menyisakan Bali sebagai satu-satunya kerajaan Hindu yang tetap mencatatkan eksistensinya hingga era colonial. Sejarah kerajaan Bali dapat dibentangkan dari periode Bali Kuno (abad ke-8 sampai ke-14 M) hingga Bali Majapahit (abad ke-14 sampai era kemerdekaan). Dengan berakhirnya kerajaan Bali seiring dengan perubahan sistem politik nasional, maka berakhir pula sejarah politik Hindu nusantara.

Lepas dari memudarnya pengaruh dan kerajaan Hindu di nusantara, pada masa kejayaan Majapahit pula, kita dapat menemukan dua kitab penting yang menggambarkan politik Hindu dan bagaimana kekuasaan itu diajalkan oleh sebelumnya dalam kerajaan Singashari lalu mencapai puncaknya oleh Hayam Wuruk dan Gajah Mada. *Pertama*, kitab *Nagarakretagama* yang digubah oleh Mpu Prapanca⁵⁸ atau Dang Acarya Nadendra, seorang Dharmadyaksa Kasogatan pada tahun Caka Gunung-Gajah-Budi-Janma

⁵⁸ Meskipun nama ini oleh kalangan kritikus sastra sering dikritik sebagai pujangga yang terlalu subjektif bahkan suka hanya memuja muji Prabhu Rajasanagara (Hayam Wuruk), sehingga gambaran masa keemasan Majapahit melalui *Nagarakretagama* dianggap begitu sempurna tanpa cela. Lihat Stuart Robson (Monash University). "Memperkenalkan *Nagarakretagama* sebagai Karya Sastra Agung". *Makalah Seminar pada 26 Mei 2008*, hlm. 1-17.

atau 1287 C/1365 M. Kitab ini disusunnya sebagai pujian atau puja sastra untuk mengagungkan kebesaran Hayam Wuruk khususnya dan Majapahit secara umum dalam 94/2 Pupuh. Nagarakretagama diartikan sebagai “sejarah pembangunan negara”, namun juga diberi nama Desawarnana yang berarti “uraian tentang desa-desa” berdasarkan hasil amatan dan pengalaman sang mpu saat ikut berkeliling sepanjang perjalanan bersama para penguasa kerajaan. *Kedua*, kitab Pararaton. Kitab ini cukup terkenal, namun sayang tidak diketahui secara pasti penulisnya. Hanya waktu penulisannya dapat diperkirakan. Jika merujuk waktu disusunnya Nagarakretagama, diperkirakan Pararaton disusun 248 tahun setelah Nagarakretagama, tepatnya pada Caka Wisaya-Guna-Banyuning-Wong atau 1535 C/1613 M. Berbeda dengan Nagarakretagama, para ahli cenderung membaca Pararaton sebagai kitab yang isinya penuh dongeng. Ada 14 bagian dalam Pararaton yang menceritakan riwayat Ken Arok saat sebelum menjadi raja Singashari hingga berakhir pada Bhre Pandan Salas. Namun yang pasti, Pararaton tidak sama dengan Nagarakretagama.⁵⁹

2. Politik dan Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa

Melanjutkan perjalanan sejarah Hindu yang mengalir nusantara, dan menempatkan Jawa sebagai episentrumnya melalui sistem kerajaan, temuan prasasti dan artefak, serta tersebarnya teks Hindu, lebih kurang mulai abad 4 M hingga jatuhnya Majapahit di akhir abad 15, maka politik dan kekuasaan sebagai sebuah konsep dapat juga dikonstruksi mulai dari Jawa. Meskipun konstruksi ini sangat ringkih secara epistemologis karena lebih kuat dengan klaim bahwa

⁵⁹ Lihat selengkapnya dalam K.M. Suhardana. 2008. *Nagarakretagama & Pararaton. Sejarah Pembangunan Majapahit*. Surabaya: Paramita.

Jawa pernah dikuasai agama dan ajaran Hindu sangat lama, namun tidak dapat dinapikan bahwa pengaruh itu mungkin saja atau masih hidup di tanah Jawa. Jadi, konstruksi konsep politik dan kekuasaan menurut kebudayaan Jawa adalah akumulasi dari silang pengaruh berbagai agama yang pernah ada di Jawa, salah satu yang sempat dominan adalah Hindu. Oleh karena itu, konstruksi ini mengambil banyak sudut pandang, termasuk ketika Sultan Agung memerintah Mataram (1613-1615), namun tidak keluar dari kejawaannya. Bagaimanapun, sebuah sistem pemerintahan tidak hanya ditemukan dalam masyarakat modern, tetapi juga pada masyarakat tradisional, seperti Mesir Kuno, China Kuno, dan Romawi Kuno, termasuk di Indonesia khususnya pada era sebelum kolonialisme.⁶⁰

Kita dapat mulai dari pendapat ahli Anderson⁶¹ yang membagi konsep kekuasaan menurut Jawa ke dalam empat bagian, yang sekaligus dapat menjadi perbandingan konsep kekuasaan di barat. *Pertama*, kekuasaan itu konkrit karena keberadaannya diturunkan langsung oleh Hyang Murbeng Dumadi atas dasar wahyu kepada para “wakilnya” di dunia. Jika pendapat ini dikaitkan dengan politik, maka kekuasaan itu merupakan ungkapan *kesekten* atau sakti yang didasarkan atas wahyu. Berbeda dengan konsep di barat bahwa kekuasaan itu bersifat abstrak dan akan ada kalau orang atau kelompok yang saling berhubungan, dan kepatuhan pada kemauan orang atau sekelompok orang lainnya. Dalam Hindu, dan pada masa lalu saat sistem kerajaan begitu absolut, terdapat istilah *Dewa Raja*, yaitu raja dianggap sebagai wakil Tuhan yang memerintah masyarakat.

⁶⁰ Lihat juga Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. 2000. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern* (terjemahan). Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

⁶¹ Benedict R.O.G. Anderson. 1972. “The Idea of Power in Javanese Culture” in Holt Claire (ed). *Culture and Polirics in Indonesia*

Kedua, kekuasaan itu homogen, yaitu semua kekuasaan pada dasarnya sama jenis dan sumbernya. Kekuasaan di tangan satu orang atau kelompok itu sama saja dengan kekuasaan yang ada di tangan individu atau kelompok lain, di manapun ia berada. Berbeda dengan di barat, yang memandang kekuasaan itu bersifat heterogen yang sumbernya beraneka, misalnya kekuasaan yang bersumber pada kekayaan, status sosial, senjata, kepandaian, hingga jumlah dan populasi. *Ketiga*, jumlah kekuasaan dalam alam semesta selalu bersifat tetap. Jadi, kekuasaan itu adalah ungkapan dari realitas yang sama, berasal dari sumber tunggal yang sama, berkualitas sama dan bahkan kekuasaan itu lebih dulu ada tinimbang keberadaan yang lain. Konsep ini jauh berbeda konsep di barat yang menganggap kekuasaan itu bersifat inheren yang sifatnya tak terbatas. *Keempat*, kekuasaan itu tidak mempersoalkan keabsahan karena sumber kekuasaan itu tunggal dan homogen sehingga tidak perlu mempersoalkan kekuasaan itu bersumber darimana.⁶²

Berdasarkan pandangan Anderson di atas, konsep kekuasaan dalam budaya Jawa lebih kepada bagaimana menghimpun atau memusatkan kekuasaan karena dengan cara itu akan melahirkan kekuatan luar biasa pada diri penguasa. Berbeda dengan konsep kekuasaan di barat yang menitikberatkan pada bagaimana menggunakan kekuasaan itu. Tidak mengherankan jika pada masa lalu, dan mungkin masih berlaku hingga saat ini, seorang pemimpin akan menghimpun kekuatan melalui ragam cara, misalnya bertapa (asketik). Bahkan ada seseorang yang menginginkan

⁶²Selain Anderson, tentu saja ada banyak pembagian kekuasaan menurut ahli lainnya, misalnya dari Blaine Lee. 2002. *Prinsip Kekuasaan*. Terjemahan Arvin Saputra. Jakarta: Binarupa Aksara. hlm. 29, yang membagi kekuasaan itu menjadi tiga, yaitu kekuasaan yang dibangun atas paksaan, manfaat dan prinsip kehormatan.

kekuasaan dengan menghimpun kekuatan melalui tindakan yang terkesan irasional, seperti memelihara “orang-orang aneh”, atau melakukan persekutuan dengan dunia gaib. Membawa serta banyak pengikut dan iringan-iringan rakyat (abdi) dalam perayaan dan penobatan seorang raja di masa lalu juga dianggap sebagai bagian untuk memegahkan panggung si penguasa. Fakta ini adalah satu keunikan dan kekhasan budaya Jawa dalam memandang kekuasaan yang merupakan salah satu unsur budaya serta menjadi bagian dari klasifikasi simbolik dan orientasi nilai budaya Jawa dalam bahasa, kesenian, agama, ritus, dlsb.

Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan dalam kebudayaan Jawa bukan semata ditentukan oleh kemampuan penguasa memusatkan kekuasaannya tetapi ditandai oleh adanya “wahyu”. Selain itu, pemusatan kekuasaan seringkali disimbolisasi dengan kesuburan, kemuliaan dan keadaan yang aman atau stabil. Tidak mengherankan pula, karena simbolisasi ini, para penguasa berlomba-lomba untuk mengejar kesuburan sebagai pertanda kemakmuran dan stabilitas sebagai pertanda keadaan yang aman.

Wuriyanto⁶³ menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana seorang raja menjadi sumbu utama dari pijar kekuasaannya kelak, yang dalam tataran budaya Jawa merupakan simbol atas hakikat hidup, hakikat karya, hakikat hubungan dengan alam, persepsi waktu dan hubungan sosial lainnya. Dalam *Serat Sastra Gending* yang diciptakan Sultan Agung, kekuasaan diformulasikan dengan *Turasing Ratu Pinandhita Kang Hanyakrawati Kang Wenang Masesa Wong Sanagari*. Sifat *Kuwagung dadi Wewayanging*

⁶³ Dirangkum dari Arif Budi Wuriyanto. “Gung Binatara: Kekuasaan dan Moralitas Jawa. Kasus Religiusitas Sultan Agung di Mataram”. *Jurnal Ilmiah Bestari*. No. 32. Th. XIV. 2001: 46-52.

Allah. (tokoh keturunan raja yang bersifat pendeta yang patut dan layak menjadi penguasa negara. Mampu berbuat arif bijaksana laksana bayang-bayang Tuhan). Oleh karena itu, seorang raja dalam memeriksa semua pengikutnya dan menyayangi laskar prajuritnya, ia harus memiliki empat macam cara, yaitu pertama kali duduk, kedua kepandaian, ketiga pekerjaan dan keempat keberanian (Panitisastra: Jasadipura I).⁶⁴

Konsep politik dan kekuasaan yang digagas Sultan Agung saat memerintah Mataram adalah kelanjutan dari *Statecraft* atau istilah untuk sebuah kerajaan pertanian yang khas yang dilingkupi oleh struktur filosofis budaya agraris, sekaligus kosmis, mistik dan simbolis. Kondisi ini melahirkan sebuah konsep budaya politik dan kenegaraan yang mengakumulasi sistem perubahan sosial budaya yang radikal. Sultan Agung yang memerintah Mataram pada masa itu, dianggap sebagai peletak dasar ketatanegaraan dan sistem politik yang mensinkretiskan atau bahkan melakukan kompromi antara sistem formal dengan supranatural, termasuk perubahan dari pengaruh peradaban Hindu-Buddha atau jaman *Kebudan* ke arah pengaruh Islam atau jaman *Kewalen*. Dalam perjalanannya, konsep politik, kekuasaan dan ketatanegaraan Sultan Agung ditafsirkan dalam berbagai bentuk sinkretik.

Tafsiran pujangga Ranggawarsita tentang kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang mengutamakan keseimbangan jika pemimpinnya memiliki sifat *Ajipamasa* dan *Raja Pengging Witaradya*, antara lain *Paramengkawi*,

⁶⁴Dalam kebudayaan Jawa, kitab Panitisastra cukup terkenal dan banyak dipengaruhi oleh berbagai gubahan dari karya sastra dan epos Jawa Kuno. Panitisastra berisi ajaran tentang moral dan sikap hidup, terutama yang berasal Nitisastra Jawa Kuno yang “kembali hidup”, terutama dalam kurun waktu abad XVIII hingga XIX. Untuk mengetahui lebih lengkap kitab ini, baca A. Sudewa. 1991. *Serat Panitisastra*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

yaitu pemimpin yang ahli dalam ilmu-ilmu luhur termasuk pengetahuan yang luas tentang kajian sejarah lama; *Sambegana*, yaitu pemimpin yang melalui kekuasaannya dapat menimbang secara adil dalam melihat perbedaan antara hak dan wewenang, dan *Nawangkridha*, yaitu kekuasaan yang menjadikan sosok idaman yang dapat memperlihatkan fleksibilitas suara jaman dan perubahan.

Adapun tafsiran dari pujangga Jasadipura tentang kekuasaan yang *gung binathara* dapat menjadi lengkap apabila dalam kekuasaan itu terdapat beberapa sifat, antara lain *Amartanipura*, yaitu kekuasaan yang membawa pemerintahan secara teguh dan menjamin keselamatan rakyat; *Wijangkalpa*, yaitu tidak meninggalkan kaum pendahulu, pini sepuh, dan para guru; dan *Kalantagrahita*, yaitu kekuasaan seorang pemimpin yang cukup memiliki bakat intelektual sehingga mampu menangkap tanda-tanda perubahan jaman dalam mewujudkan keinginan orang yang dipimpin atau rakyatnya.

3. Inspirasi dari Gajah Mada tentang Politik Hindu dan Kekuasaan

Tafsir terhadap Gajah Mada tentang kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari pengalaman hidupnya yang sangat panjang hingga menjadi mahapatih paling legendaris pada sebuah kerajaan yang kekuasaannya sangat luas, Majapahit. Farchan dan Syam⁶⁵ mencoba menafsir kembali kekuasaan menurut Gajah Mada, yang secara filosofis dipengaruhi oleh konsep kosmologis dalam ajaran Brahma, kosmologis dari ajaran Buddhisme dan kosmogini Hinduisme. Melanjutkan berbagai pengaruh ini, kekuasaan dalam pandangan Gajah

⁶⁵ Dirangkum dari Yusak Farchan dan Firdaus Syam. "Tafsir Kekuasaan Menurut Gajah Mada". *Jurnal Politik*. Vol. 11 No. 01. 2015: 1589-1599.

Mada dapat ditafsirkan sebagai kemampuan untuk mengendalikan tindakan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Dan ini dapat dilakukannya karena ia seorang patih yang memiliki tugas dan wewenang penuh untuk menjalankan pemerintahan.

Tafsir kekuasaan Gajah Mada, sekali lagi, tak bisa dilepaskan dari pandangannya tentang kepemimpinan. Ia misalnya, adalah pengagas falsafah kepemimpinan Tri Dharma yang memiliki dimensi spiritual, dimensi moral, dan dimensi manajerial. Adapun upaya Gajah Mada dalam mengendalikan kekuasaannya dilakukan melalui, *pertama*, penataan birokrasi yang dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu penataan struktur dan mencari dukungan di tingkat desa. *Kedua*, penerapan militer dengan melakukan penaklukan dan persekutuan kekuatan militer dalam rangka mengukuhkan kedaulatan, melindungi rakyat dan mendapatkan pengakuan dari politik pesaingnya. *Ketiga*, penerapan sistem hukum di mana saat menjadi patih, Majapahit telah memiliki kitab-kitab hukum tertulis yang bersifat “nasional”, hukum adat masih dijadikan sumber aturan tambahan dan pengetahuan tentang hukum formal telah dikenal oleh penduduk pedesaan. *Keempat*, penerapan nilai-nilai tradisi besar dan aktivitas publik dengan maksud pengendalian kekuasaan dilakukan melalui pendirian bangunan peribadatan yang bersifat monumental, upacara-upacara yang diselenggarakan di keraton, dan perjalanan keliling kerajaan.

Namun yang tak dapat dipungkiri adalah Gajah Mada juga amat sangat dipengaruhi oleh Gayatri, putri bungsu Kertanegara, Raja Singashari yang juga ibu Raja Hayam Wuruk. Setidaknya ada empat tema besar sebagai dialektika pemikiran antara Gayatri dan Gajah Mada, yaitu *pertama*, tentang kesetiaan. Gayatri menjelaskan bahwa

ketika seseorang memberikan kesetiaannya kepada seseorang yang jahat, kesetiaannya itu tidak diabdikan pada tujuan yang lebih mulia, maka kesetiaan semacam itu hanya akan merendahkan dirinya sendiri. *Kedua*, tentang perluasan teritorial kerajaan. Gayatri memiliki pandangan bahwa untuk menyatukan seluruh negara tetangga di seantero kepulauan nusantara ke dalam sebuah federasi yang dilandasi oleh jalinan kebudayaan, bahasa, agama, serta ekonomi. Namun sebenarnya, Gayatri tidak percaya bahwa penaklukan adalah cara paling efektif untuk menciptakan persatuan. *Ketiga*, tentang pembangunan tata hukum bersama. Tujuan upaya menciptakan seperangkat hukum adalah untuk menggantikan banyaknya peraturan dan sanksi tradisional serta agama yang membingungkan dan saling tumpang tindih yang penerapannya tidak sama di beberapa wilayah kerajaan. *Keempat*, tentang pentingnya pembangunan monumen peninggalan dinasti penguasa Majapahit. Menurut Gayatri, pembangunan monumen tersebut dimaksudkan untuk mengajarkan kepada khalayak tentang peninggalan agung dinasti Majapahit. Empat hasil diskusinya dengan Gayatri ini, Gajah Mada dikatakan sangat antusias untuk diwujudkan, dan sebagian besar telah berhasil diwujudkannya.

Selain menjadi negarawan hebat, sosok Gajah Mada juga dikenal pula sebagai ahli hukum dan politik. Pemikirannya dibidang politik disusunnya ke dalam kitab Kutaramanwa yang dijadikan kitab hukum pada masa Kerajaan Majapahit. Kitab ini didasarkan pada kitab hukum Kutarasastra dan kitab Hindu Manawadharmasastra. Gajah Mada juga memiliki konsep kepemimpinan yang juga sangat menarik untuk menjadi inspirasi yang dikenal dengan

Pancadasa Pramiteng Prabhu.⁵² Lima belas sifat kepemimpinan ini merupakan perwujudan dari tabiat istimewa Gajah Mada yang secara khusus tertuang dalam kitab *Nagara Kertagama* karya Mpu Prapanca. Lima belas sifat baik kepemimpinan itu anatar lain:

- a. *Wijaya*, yaitu bijaksana, tenang, dan sabar
- b. *Mantriwira*, yaitu gagah berani membela kebenaran
- c. *Matanggwan*, yaitu mendapat kepercayaan bawahan dan menghormati kepercayaan itu
- d. *Satya Bhakti Aprabhu*, yaitu memiliki loyalitas atau setia dengan tulus ikhlas
- e. *Wagmi Wak*, yaitu pandai berbicara untuk meyakinkan pendapatnya kepada orang lain
- f. *Wicaksaneng Naya*, yaitu bijaksana dalam segala tindakan atau cerdik mengatur siasat
- g. *Sarjjawopasama (Sarjawa Upasama)*, yaitu rendah hati, tidak sombong
- h. *Dhirotsaha*, yaitu ulet, rajin dan tekun bekerja
- i. *Tan Sutrsna*, yaitu tidak mementingkan keperluan pribadi, pandai mengendalikan nafsu
- j. *Sih Samastabhuwana (Masihi Samasta Bhuwana)*, yaitu mencintai semua makhluk dan alam semesta
- k. *Ginong Pratidina (Ginung Prati Dina)*, yaitu berusaha berbuat baik dan menghindari perbuatan yang tidak baik
- l. *Diwyacitta (Diwyacitra)*, yaitu lapang dada, berhati baik, demokratis dan mau menerima pendapat orang lain
- m. *Anayaken Musuh*, yaitu mampu mengalahkan dan menguasai musuh
- n. *Tanleana (Tan Lalana)*, yaitu teguh iman, selalu optimis, bersifat gembira.

⁵²I Gusti Agung Oka, *Op.Cit.*, hlm. 7

BAB ENAM

MELANJUTKAN PESAN POLITIK KAUTILYA ARTHASASTRA

Bagi seorang raja, sumpah (sucinya) adalah kesediaannya untuk bekerja, pengorbanan dalam urusan pemerintahan adalah pengorbanan sucinya, imbalan dari pengorbanannya adalah sikap yang adil, (dan) inisiasi pengorbanan baginya adalah pentasbihannya (Arthasastra Buku Pertama, Bab Kesembilan Belas, Bagian 16:33)

A. Berpolitik, Kenapa Tidak?

Membaca pikiran Kautilya, dan mencermati para penafsirnya, tampaknya posisi Arthasastra sangat kuat merepresentasikan kitab yang *prescriptive* dan *normative*, layaknya kitab-kitab yang disusun oleh para maharsi dan pada jaman Brahmana. Bahkan mungkin pada masa itu, yaitu pasca Weda, kitab ini telah menjadi pegangan pokok bagi penguasa sangat erat kaitanya dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Secara filosofis, pesan dalam kitab ini sangat kuat untuk siapa saja yang ingin menjadi politisi dan pemimpin, namun juga secara normatif kepada siapa saja yang mau belajar politik dan kekuasaan. Ini berarti, Arthasastra menjadi pedoman sekaligus tuntunan bagi kita semua.

Membicarakan politik dan kekuasaan, juga melaksanakannya, jika merujuk pada apa yang ideal diajarkan Kautilya,

menjadi sesuatu yang (seharusnya) biasa, bukan sebuah tabu. Banyak teks suci menjustifikasi narasi ini. Selain Arthasastra dan Niti Sastra, juga masih ada Manawadharmasastra dan karya-karya sastra lainnya yang terpengaruh langsung maupun tidak dari Arthasastra. Kita yang hidup hari ini, juga dapat belajar dari beberapa tokoh besar Hindu yang telah berhasil bukan saja memahami, tetapi juga sekali lagi, mempraktikkan ilmu politik dan kekuasaan. Maharsi Kautilya sudah membuktikan itu pada jamannya, bahkan dalam arena yang mungkin sangat kompleks, khas kejadian di masa lalu. Cerita perang dalam Ramayana dan Mahabharata memperlihatkan kompleksitas kejadian itu.

Banyak tokoh spiritual Hindu yang juga berhasil berjuang di ranah politik. Selain Kautilya, Mahatma Gandhi salah satu dari sekian banyak tokoh lainnya. Ia bahkan secara konsisten menjalankan ajaran Hindu dalam pergerakan politiknya, sekaligus tanpa harus kehilangan atau menurunkan derajat kesucian dirinya. Mungkin saja ada banyak ajaran moral yang mengajarkan kita saat berada dalam proses tumbuh dan berkembang dalam dekapan spiritual, lalu mencoba menghindari politik, namun bergerak di ranah politik bukanlah sebuah larangan, bukan juga tabu yang gelap gulita. Namun asumsi ini dapat saja salah, sehingga tidak dimaksudkan sebagai generalisasi, karena mungkin dalam sebuah tradisi atau perguruan spiritual tertentu terdapat tata cara yang melarang para murid atau *bhakta* yang telah mencapai tahapan tertentu untuk terjun ke dalam politik praktis.

Suwantana⁶⁷ menunjukkan beberapa tradisi itu, salah satunya tradisi *kesulinggihan* di Bali yang sangat melarang seseorang yang telah melaksanakan upacara *dwijati* dan atau sudah menjadi *sulinggih* untuk terjun ke dalam politik praktis.

⁶⁷ Tulisan dalam bab ini banyak bersumber dari I Gede Suwantana. "Politik Hindu, Antara Natural dan Moral" dalam I Nyoman Yoga Segara (ed). 2019. *Politik Hindu. Sejarah, Moral dan Proyeksinya*. hlm. 100-113

Mereka harus taat mengikutinya jika memang berada dalam sistem atau perguruan itu. Namun jika mengingat bahwa kesadaran spiritual itu sesuatu yang bersifat universal, baik mereka yang berada pada sistem tertentu itu atau tidak, maka Hindu memberikan juga kebebasan untuk memilih. Misalnya, jika memang berkehendak untuk terjun ke politik praktis, mereka mesti tidak memasuki kedudukan khusus tertentu di dalam sistem keagamaan, sebagaimana pada model *kesulinggihan* itu.

Kembali kepada Mahatma Gandhi, seorang spiritualis sekaligus politikus yang mengedepankan nilai-nilai moral dengan pandangan bahwa politik sebagai alat yang dapat digunakan untuk mencapai kebenaran bersama.⁶⁸ Bagi Gandhi, perjuangan manusia pada hakikatnya adalah meraih kebebasan, dan politik menjadi salah satu alat paling efektif untuk membebaskan manusia dari berbagai sistem tirani yang memenjarakannya. Pada saat India, dan juga yang dilihat Gandhi secara langung di Afrika Selatan, Inggris melakukan tidak saja penjajahan, tetapi perbudakan, eksploitasi, hegemoni, dan membuat ketimpangan sistem sosial mengakar tajam di masyarakat, dilawannya dengan pendekatan politik. Bagi Gandhi, politik dalam konteks ini tidak dimaksudkan dalam rangka memusuhi mereka, melainkan berupaya untuk merangkul dan menyadarkan mereka. Cara revolusionernya ini tidak saja ditujukan kepada pihak lawan yang nyaman sebagai penjajah dan yang ternyamankan sebagai budak atau pihak terjajah. Menurutnya, kehidupan seperti ini bukan lagi kehidupan yang bebas, merdeka, egaliter dan berperikemanusiaan.

Pada tahap pemikiran yang lebih tinggi, kehidupan manusia pada hakikatnya adalah sama, yaitu sama-sama

⁶⁸ Tentang sepak terjang Mahatma Gandhi dapat dibaca dalam banyak buku, salah satunya dari penulis sendiri. I Nyoman Yoga Segara. 2017. *Ahimsa dalam Teropong Filsafat Antropologi*. Denpasar: WartamPlus

sebagai makhluk hidup yang bebas, saling mengasihi dan menyayangi, bukan sebaliknya saling menguasai dan memusuhi. Oleh karena itu, senjata perjuangan Gandhi bukan lagi senjata canggih dan mutakhir, tetapi perjuangan nirkekerasan (*ahimsa*), kebenaran (*satya*), kemandirian (*swadesi*) dan welas asih (*karuna*). Model perjuangan ini digunakan Gandhi dengan harapan manusia akan mampu melihat sesamanya sebagai dirinya hanya ketika ia juga memiliki kesadaran diri yang luas. Gerakan politik Gandhi ini sebenarnya adalah upayanya yang tak kenal lelah untuk menyadarkan manusia akan hakikat sang diri yang sejati. Baginya, tujuan ultimate politik adalah bangkitnya kesadaran manusia sehingga mereka mampu melihat dirinya pada orang lain dan orang lain pada dirinya sendiri. Dengan begitu, hasil akhir dari perjuangannya adalah munculnya rasa kebersamaan, toleransi, saling menghormati, kasih sayang, dan tolong menolong. Dan pada akhirnya, India menikmati kemerdekaan dari buah perjuangan panjang Gandhi, sang jiwa yang agung (Mahatma).

B. Syarat, Tujuan dan Strategi dalam Politik Hindu

1. Syarat Orang Berpolitik

Permasalahan pokok dalam politik Hindu bukanlah tentang apa konsekuensi dari pelaksanaan ilmu itu, tetapi bagaimana politik Hindu itu berjalan sebagaimana mestinya, lengkap dengan tujuan yang baik dan benar yang hendak diwujudkan. Kautilya, dan juga Machiavelli dan Hobbes secara tersirat menginginkan suasana membahagiakan rakyat harus dilakukan melalui politik, bernegara dan adanya pemimpin di tengah masyarakat. Untuk maksud ini, Suwantana⁶⁹ memberikan sejumlah prasyarat yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan politik. *Pertama*, siapa

⁶⁹ I Gede Suwantana, *Op.Cit.*, hlm. 102

dari mereka yang mau terjun ke dunia politik praktis? *Kedua*, apa yang akan diperjuangkan di dalam dunia politik tersebut? *Ketiga*, bagaimana mestinya mereka melakukan perjuangan itu? Pertanyaan tentang siapa akan berkenaan dengan kriteria yang harus dipenuhinya, misalnya latar belakang hidupnya, pendidikan, karakter dan ketentuan lainnya. Lalu, pertanyaan tentang apa yang akan diperjuangkannya sangat tergantung dari isi dan tujuan perjuangannya. Terakhir, pertanyaan bagaimana politik itu akan dijalankan lebih kepada strategi yang akan digunakan dalam memperjuangkan tujuan politiknya.

Dalam ajaran Hindu, persyaratan khusus tentang siapa saja yang boleh terjun ke dalam politik praktis diperlukan karena politik berkaitan erat dengan kekuasaan dan bagaimana mengatur orang banyak. Dengan syarat ini, tidak semua orang yang, misalnya karena memiliki uang banyak atau hanya karena terkenal bisa dengan mudah masuk ke ranah ini. Kualitas diri sejak semula menjadi penentu apakah ia layak atau tidak masuk dalam lingkaran politik. Sebab, jika sebagian besar orang yang masuk ke dalamnya tidak layak, dapat dipastikan sistem ketatanegaraan akan mengalami kehancuran.

Dalam beberapa kitab suci dan juga teks lontar di Bali, disebutkan bahwa siapa saja yang hendak terjun ke dalam politik praktis dan oleh rakyatnya dianggap layak untuk memimpin dan memegang kekuasaan diwajibkan mempunyai beberapa kualitas kepemimpinan, sebagaimana yang sudah diuraikan pada Bab Empat di atas. Sebagai tambahan, seorang politisi juga semestinya adalah mereka yang memiliki karakter seperti pohon yang kuat, berbuah manis dan lebat. Dalam kitab Bhagawadgita disebutkan 20 karakter seorang politikus Hindu yang harus dimiliki, yaitu kejujuran (*arjawam*), kebenaran (*satyam*), keberanian

(*abhayam*), kepahlawanan (*sauryam*), tahan uji (*titiksa*), ketetapan hati (*sankalpa*), hidup sederhana (*tapasya*), hidup penuh semangat (*tejah*), pengendalian diri (*dama*), kebijaksanaan yang mantap (*samah samya*), tidak mencari kesalahan orang lain (*apaisunam*), rendah hati (*aminatwam*), tanpa kekerasan (*ahimsa*), tidak membenci (*adwesta*), tidak marah (*akrodah*), tidak serakah (*alouptwam*), kedermawanan (*danam*), berterimakasih (*kritajna*), suci (*saucam*), pantangan seksual (*brahmacharya*), ketidakterikatan (*wairagya*), kesabaran (*ksantih*), pengampunan (*ksama*), welas asih (*karuna*), pertemanan (*maitri*), kelemahan-lembutan (*mardawam*), dan damai (*santih*).

Lebih khusus dalam Kautilya Arthashastra (IV.I.2-6)⁷⁰ dinyatakan ada enam disiplin hidup jika seseorang ingin menjadi pemimpin, yaitu *abhigamika* (simpatik kepada rakyat), *prajna* (cerdas, arif, dan bijaksana), *utsaha* (mengambil inisiatif, proaktif), *atmasampad* (berintegritas tinggi, bermoral luhur), *sakhyasamanta* (mampu mengawasi bawahannya), dan *aksudraparisakta* (mampu memadukan pendapat yang berbeda). Demikianlah kualitas individu yang menjadi syarat pokok yang harus diperhatikan bagi seseorang yang ingin menjadi politikus atau yang sudah terjun dalam ranah politik praktis.

2. Tujuan Politik Hindu

Jika membicarakan politik Hindu, maka kita akan memasuki konsep besar *Catur Purusartha*. Siapapun orang yang ingin terjun atau telah berkecimpung dalam dunia politik, mau tidak mau harus terlebih dahulu memahami secara tepat ajaran tentang bagaimana meraih kebebasan

⁷⁰ Tut De Ariasna. 2011. *Kepemimpinan Hindu*. Surabaya: Paramita, hlm. 40. Namun jika harus merujuk pada syarat-syarat menjadi pemimpin, di luar teks yang telah dikutip dalam buku ini, masih sangat banyak yang belum dikompilasi, bahkan syarat-syarat itu juga diajarkan dalam mantra kitab Weda Sruti dan Smrti lainnya.

(moksa) melalui tahapan *dharma*, *artha*, dan *kama*. Dalam konsep Hindu, manusia lahir ke dunia pada dasarnya untuk menjalankan *dharmanya* sendiri dengan benar, dan secara alamiah diarahkan untuk memenuhi, pertama-tama kebutuhan dasarnya, seperti makan, tidur, dlsb. Yang kedua, secara transcendental manusia pada akhirnya juga harus menggunakan akal, pikiran dan kecerdasannya untuk mengembangkan kesadaran dirinya sehingga dapat melaksanakan aktivitas kemanusiaan lainnya, seperti melayani, mengasahi, menciptakan perdamaian dan sejenisnya. Kedua jenis *dharma* ini (alamiah dan transedental), diyakini dapat mengantarkan mereka pada tujuan tertinggi, yaitu kebebasan (*moksa*) baik yang diperoleh di dunia maupun setelahnya, baik kebebasan individu maupun kebahagiaan dunia (*jagadhita*).

Dalam rangka menjalankan *dharma* untuk meraih *moksa* ini diperlukan kekayaan materi (*artha*) dan kehendak atau niat atau nafsu (*kama*). *Artha* dan *kama* hanya alat bantu untuk mewujudkan kebebasan. *Artha* dan *kama* digunakan dalam dunia politik hanya untuk mencapaisemua tujuan tersebut, bukan sebaliknya, politik dipakai dalam upaya merengkuh kekayaan sebanyak-banyaknya dan kesenangan sepuas-puasnya. Dalam kitab Bhagawadgita diuraikan bahwa tujuan akhir setiap orang adalah menyadari bahwa dirinya adalah Yang Tertinggi itu, dan benda material atau keinginan-keinginan di dalam diri harus digunakan secara efektif dan efisien.

Apapun, politik praktis yang dapat menjadi pilihan orang Hindu harus diarahkan untuk melahirkan *jagadhita*, yaitu dunia yang dipenuhi keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan atau *Loka Samgraha*. Pikiran ideal, dan perilaku konsisten (*satya*) dengan ajaran *Catur Purusartha* harus menjadi panduan sejak awal memulai

langkah besar menjadi politisi. Ini adalah visi Hindu tentang politik. Untuk mencapai visi ini, setiap politisi Hindu wajib berkomitmen untuk memegang prinsip-prinsip politik yang dinafasi ajaran agama. Sekali lagi, Gandhi jika harus menjadikannya sebagai *role model*, pernah mengatakan bahwa mereka yang berpolitik tanpa prinsip akan mendatangkan dosa sosial. Seorang pemimpin harus *satya* untuk menciptakan negara dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, saling menghargai dan menghormati, memelihara keutuhan negara dan tetap merawat nilai-nilai luhur budaya bangsanya. Menurut Gandhi, pemimpin juga harus memiliki kemampuan manajemen yang baik, memiliki kesanggupan secara obyektif menempatkan orang secara benar, memiliki strategi pemerintahan yang mumpuni, mampu menyusun perencanaan yang matang, menjadi eksekutor yang baik, memiliki kemampuan manajemen konflik, dan memiliki strategi alternatif jika strategi awal yang dijalankan mengalami kegagalan. Terakhir, pemimpin juga harus mampu memprediksi sebuah peristiwa secara tepat dengan menganalisis tanda-tanda dari apa yang terjadi secara nyata di lapangan.

Dengan demikian, dasar pemikiran politik Hindu dan kekuasaan terletak pada dialektika filosofis yang tercerap di dalamnya. Artinya, siapapun mereka, apapun tujuan yang diperjuangkan, apapun strategi yang akan digunakannya kelak, arah politik seharusnya menuju pada dua kanal besar, yaitu moral-transcendental dan natural. Secara moral-transcendental artinya mereka berjuang dalam kedalaman kesadarannya dan tujuannya adalah untuk mencapai kedalaman itu secara makro, sedangkan secara natural artinya politik yang dijalankan sesuai dengan naluri manusia, yaitu keinginan untuk berkuasa, memperoleh kehidupan,

dan kenyamanan lahir batinnya. Dunia politik adalah dunia pertarungan kedua sifat dan sikap manusia ini. Kemenangan dari pertarungan politik ini sangat ditentukan oleh kedua pondasi ini, apakah dominan moral-transendental atau natural.

Namun secara ideal, dan juga dicontohkan oleh Kautilya dan Gandhi, hasil akhir dari perjuangan politik adalah meraih tujuan-tujuan moral-transendental, sedangkan apa yang terjadi di luar itu lebih berhubungan dengan kekuasaan dan bagaimana memperolehnya. Adapun visi, misi, atau program kerja yang dikampanyekan hanyalah bunga-bunga atau barang dagangan untuk meyakinkan calon pemilihnya. Jika kita mendapati orang terjun ke dunia politik semata-mata untuk memenuhi Hasrat naturalnya untuk berkuasa, maka ia sebenarnya bukan melakukan perjuangan sama sekali, namun hanya sekadar memenuhi ambisi pribadinya. Padahal politik hanyalah alat belaka, bukan tujuan segala-galanya.

3. Strategi dalam Politik Hindu

Strategi dalam politik Hindu yang dimaksudkan di sini adalah metode yang sekurang-kurangnya dapat dilakukan dalam perjuangan politik praktis. Hindu memandang bahwa strategi tidak hanya bicara keterampilan khusus yang bersifat *textbook* namun strategi yang bertujuan mengarahkannya pada sesuatu yang menjadi bagian dari dirinya sendiri, bukan sekadar pengetahuan yang ditempelkan begitu rupa. Dapat dibilang bahwa seorang politisi Hindu harus memiliki *skill inherent*, yaitu keterampilan yang lahir dari pengetahuan dan pengalamannya, misalnya *taksu* dan anugerah yang diperoleh dari Tuhan. Keterampilan yang muncul dari pengetahuan dan pengalaman mencakup pemahamannya yang komprehensif atas peta politik dari

politik lokal, regional dan geopolitik, pengetahuannya tentang sistem hukum dan ketatanegaraan, pengetahuannya tentang strategi dan keterampilan berkomunikasi, memahami sistem kepartaian dan segala hal yang berkenaan dengan politik secara teknis maupun substantif.

Tentang *taksu* atau *yoni* menurut Hindu sangat penting, meskipun dalam dunia kontemporer dan post-modern ini tidak banyak yang memahaminya, bahkan mengabaikannya. *Taksu* sering dimaknai sebagai bakat alam atau sesuatu yang telah dibawa sejak lahir, dan anugerah ini boleh jadi sangat menentukan karena orang yang bekerja sesuai dengan *yoninya* akan kelihatan patut, pantas dan sesuai dengan apa yang dikerjakannya.⁷¹ Dalam teks Bhagawadgita ada disebutkan bahwa setiap orang sebenarnya telah digariskan untuk menjalankan *swadharma* sesuai dengan *guna* dan *karmanya*. Misalnya, jika seseorang memiliki kelahiran Brahmana, maka kelak pekerjaan yang berhubungan dengan kebrahmanaan akan menjadi pekerjaannya, demikian juga bagi mereka yang memiliki kelahiran sebagai Ksatrya, Waishya dan Sudra.

Selain *taksu* atau *yoni*, anugerah Tuhan juga memegang peranan yang sangat penting. Sehebat apapun orang sudah melakukan berbagai usaha, atau sebanyak apapun pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang dialami, dan keterampilan yang dikuasainya, jika Tuhan tidak berkehendak, maka ia tidak akan pernah dapat maksimal melakukan dan mendapatkan hasil atau mungkin ia akan mengalami kegagalan. Anugerah Tuhan seperti ini

⁷¹ Dalam kebudayaan Bali, *taksu* dianggap sebagai salah satu karakter manusia Bali yang paling utama. Lihat IB. Mantra 1996. *Landasan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra. Untuk mengetahui karakter orang Bali, dan mungkin akan berguna sebagai bahan untuk melihat siapa diri sebelum terjun ke dunia politik, baca Gregory Bateson. 1972. *Steps to an Ecology of Mind, Balinese Ethos*. Collected Essay in Anthropology, Psychiatry and Epistemology. University of Chicago Press; I Ketut Artadi. 1993. *Manusia Bali*. Denpasar: Bali Post.

dapat dikaitkan dengan respon alam terhadap perilaku dan tindakan seseorang. Jika seseorang yang pribadinya sudah kelihatan memiliki kualitas untuk terjun di bidang politik dan kemudian dia tampak sangat pandai memainkan politik serta bekerja dengan sangat keras, tetapi jika Tuhan mempunyai kehendak berbeda, ia tidak akan mampu meraih puncak kariernya dalam politik. Oleh karena itu, kitab Bhagawadgita tegas mengatakan bahwa agar seseorang tetap merasakan kebahagiaan, ia disarankan untuk tidak terikat terlebih dahulu dengan hasilnya. Setiap orang disarankan untuk tetap dan selalu fokus pada tindakannya dan membiarkan Tuhan yang bekerja untuk memberikan hasilnya. Dalam teks yang berbeda dengan makna yang sama disebutkan dalam Yoga Sutra Patanjali melalui Ishwara Pranidana, yaitu berserah sepenuhnya ke hadapan Tuhan, sebab hanya dengan itu, seseorang bisa berkembang kesadarannya.

Seorang politisi jika ingin memiliki keterampilan dan teknik (strategi) politik dengan mumpuni ia dapat memperolehnya melalui pendidikan formal, seperti pelatihan, seminar, atau bahkan belajar otodidak yang semua pengetahuan itu akan berupa konseptual, filosofi maupun teknis. Ia juga dapat memiliki keterampilan yang bersumber dari luar, misalnya dari mentor, buku, *expert*, maupun sumber lainnya. Artinya, seorang politisi haruslah menjadi terpelajar yang tidak saja paham teori tetapi juga mempraktikkannya secara benar, bukan hanya kaya material dan populer saja. Dalam cerita dan epos, salah satunya dalam kisah Mahabharata disebutkan Arjuna sekalipun membutuhkan seorang guru hebat bernama Drona untuk mengasah bakat alamnya (*yoni*). Hal yang sama juga dilakukan dengan sangat gigih oleh Ekalawya yang bahkan secara otodidak. Jadi, seorang politisi yang sempurna adalah dia yang berkepribadian mantap dan yang ahli di bidangnya.

Kitab Bhagawadgita menyebutnya sebagai seseorang yang *Sthita Pradnya*.

Satu hal lain yang tidak kalah penting harus juga dimiliki oleh seseorang yang ingin ulung sebagai politisi adalah mengetahui *yoninya* secara tepat. Jika ia merasa *yoninya* itu dalam bidang politik, maka seharusnya sejak awal ia sudah berkecimpung di dalamnya yang bisa dimulai dari berbagai tingkatan, misalnya organisasi kepemudaan, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan orang banyak, ikut serta dalam kepanitiaan sebuah kegiatan dan atau secara langsung terjun dari tingkat dasar di dunia politik praktis. Dengan pengalaman yang lama, bertahap dan berjenjang seperti ini, seseorang akan dikatakan mapan sehingga posisinya layak diperhitungkan. Jam terbang ini pula dapat menjadi medan ujian yang sesungguhnya, apakah antara *yoninya* dan keterampilan yang dipelajari telah sesuai. Jika orang telah merasa nyaman di sana, maka antara *yoninya* dan kemampuannya dianggap telah sesuai sehingga apapun tantangan dan hambatan yang akan dihadapinya dapat dilalui dengan merangkak terus hingga sampai ke puncak karier sebagai seorang politikus.

Mengetahui bakat (*taksu* atau *yoninya*) lalu mengasahnya melalui pengalaman dan jam terbang, ditambah usaha untuk memperoleh pengetahuan politik adalah strategi yang dapat dikembangkan oleh siapa saja yang ingin menjadi politisi Hindu. Ia akan menjadi politisi mumpuni, jika prasyarat yang ditentukan dan dengan tujuan yang jelas, tepat dan benar akan menjadikan politik Hindu bermartabat.

C. Dari Kautilya untuk Kita

Apa yang bisa kita pelajari dari seluruh uraian di atas? Bukankah pikiran Kautilya terlalu ideal, bahkan mungkin utopis. Bukankah juga, Arthashastra hingga sosok Gajah Mada yang

dihadirkan dalam uraian sangat romantik, sesuatu yang tidak bisa diulang begitu rupa. Mari kita berefleksi, dengan memulai dari semesta kefilsafatan — termasuk tentu saja kebudayaan di dalamnya — bahwa aspek waktu, terlebih peristiwa-peristiwa menyenjata dalam hidup manusia menjadi penting untuk diulang. Bahkan dalam momen tertentu, manusia dewasa secara paradoks sering ingin kembali ke masa lalunya.⁷² Kondisi psikologis ini menjadi satu fakta bahwa masa lalu dapat terus dihidupkan. Memang, menjadikan masa lalu sama persis seperti saat ini, atau sebaliknya, saat ini harus sama seperti di masa lalu adalah sebuah kemuskilan. Jika waktu tidak bisa meruang lagi seperti dikehendaki, manusia memiliki kemampuan untuk melakukan manuver, atau bahkan yang terjauh mampu mengubah dan memetik pelajaran penting apa yang pernah terjadi di masa lalu dengan tujuan memenuhi kepentingan dan kebutuhannya kini.

Mengambil, setidaknya hanya belajar pada masa lalu, menjadi cara paling sederhana untuk dilakukan karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup dalam kevakuman secara terus menerus.⁷³ Atas alasan seperti ini, sub bab ini akan menguraikan apa saja yang Kautilya telah sukses lakukan di masa lalu, dan ajaran apa saja dalam Arthashastra yang bisa dipelajari kembali sebagai “ajaran baru”, bahkan mungkin Neo-

⁷² Lihat juga P. Swantoro. 2007. *Masa Lalu Selalu Aktual. Cet. 1.* Jakarta: Buku Kompas, Rumah Budaya TeMBi

⁷³ Bandingkan hal ini dengan konsep hegemoni dari Antonio Gramsci. 1971. *Selection from the Prison Notebooks.* Q. Hoare, Q and G Nowel Smith, eds. New York: International Publishers. Sementara masalah waktu, banyak yang meyakini dalam kehidupan sering terjadi apa yang disebut repetisi sejarah. Dalam antropologi, upaya memahami sejarah dan masa lalu mendapat ruang yang sangat besar karena bagaimanapun, seperti dalam kalimat Tony Rudyansjah. 2009. *Sejarah, Kekuasaan dan Tindakan.* Jakarta: Rajawali Press, hlm. 17, 18: “kebudayaan tidak mungkin ada tanpa sejarah, dan sejarah tidak mungkin ada tanpa kebudayaan; melalui sejarah kebudayaan mewujudkan, dan melalui kebudayaan sejarah mengada”. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa keberadaan manusia dalam kebudayaannya dapat terbentuk melalui mediasi sejarah, dan sejarah dapat terwujud melalui mediasi kebudayaan, sehingga keduanya selalu dapat berdialektika. Namun sejarah yang dimaksud dalam buku ini bukanlah ilmu sejarah sebagaimana sejarawan mempelajari teks dan artefak dalam bingkai *time and space*.

Kautilya untuk memenuhi kebutuhan kita dimasa kini, karena Arthasastra, sebagaimana kitab suci dan cerita religi masa lalu, *value* yang dikandungnya diyakini akan terus dapat hidup. Semangat seperti ini dapat ditemukan dalam kalimat awal dalam wiracerita Ramayana: “*yawat sthayanti girayah, saritas'ca mahitale, tawat Ramayanakatha lokesu pracarisyati*” (selama gunung masih tegak berdiri dan sungai-sungai masih mengalir dipermukaan bumi, selama itu pula wiracarita Ramayana akan tetap masyur di seluruh dunia. Ramayana itu tetap awet meski Walmiki dipercaya menulisnya pada sekitar 3.100 Sebelum Masehi.⁷⁴ S. Budhisantoso yang mengutip Teeuw⁷⁵ menyatakan “*was ducererbt von deinen vetern hast, erwirt es um es zu besitzewn*” (apa yang kamu warisi dari leluhur atau nenek moyang, harus kamu rebut agar dapat dimiliki).⁷⁶

Pada bagian lain, karena Arthasastra juga muncul dengan batas-batas ke-Asia-annya, maka tidak adil kalau melupakan arus pemikiran besar dibidang politik yang berkembang di Asia. Bagaimana pun, situasi politik di Indonesia misalnya, tidak bisa lepas dari dinamika geopolitik Asia secara umum. William Theodore de Bary⁷⁷ juga menceritakan bagaimana cita-cita ideal kepemimpinan di Asia yang diharapkan datang dari hubungan

⁷⁴ Lihat kembali semangat ini melalui Tjok Rai Sudharta. 2009. *Kepemimpinan Hindu Asta Bratha dan Nasehat Sri Rama Lainnya*. Surabaya: Paramita.

⁷⁵ S. Budhisantoso (at al), *Op.Cit.*

⁷⁶ Untuk sekadar mendapatkan insight dari masa lalu, kita bisa belajar dari pikiran filsuf Hannah Arendt. 1968. *Between Past and Future*. New York: Penguin Books, yang mengajarkan bagaimana seorang intelektual (filosof) seharusnya dapat membaca wacana dengan berada di antara (*in between*) masa lalu dan masa depan. Buku lainnya dari Limen Yohanes Jehuru. “Meneropong Krisis Negara Indonesia Dengan Teleskop Negara Ideal Plato”. *Biro Penelitian Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Fajar Timur* Hal: 73-97. Vol. 7 (2011) afl. 2 (Apr). Artikel ini mengajak penulis untuk membaca dimensi krisis yang dialami Indonesia, jika misalnya, Indonesia diimajinasikan sebagai negara yang digagas Plato sebagai negara ideal.

⁷⁷ William Theodore de Bary. 2004. *Nobility and Civility: Asian Ideals of Leadership and The Common Good*. Cambridge, Mas: Harvard University Press.

raja dan atau para bangsawan dengan masyarakatnya dan sebagai manifestasi dari apa yang disebut *The Common Good*. Hal yang kurang lebih sama juga dikatakan Alton L. Becker and Aram A⁷⁸ bahwa sistem koherensi yang terjadi khususnya di Asia Tenggara, yang ternyata selalu ada dialektika bolak balik antara imajinasi dan realitas. Oleh karena itu, memahami lanskap sejarah dan budaya dari lima negara paling penting di daratan Timur dan Selatan Asia, yakni Malaysia dan Indonesia, Cina dan Korea, dan Jepang menjadi sangat penting, hingga apa yang bisa dikaitkan dengan kepemimpinan Hindu di Bali.⁷⁹

Lalu bagaimana dengan Arthashastra yang ditulis Kautilya? Beberapa literatur memperlihatkan bahwa dalam beberapa konteks tertentu, ajaran Arthashastra sekurang-kurangnya masih cukup relevan, bahkan masih bisa dipraktikkan. Untuk sampai mempraktikkannya kini, tentu kita juga harus memahami bagaimana perenialisme ajaran Kautilya tetap mengikuti setiap jejak waktu. Romila Thapar,⁸⁰ mengatakan bahwa pada masa India kontemporer, citra Asoka (anak dari Bhindusara dan cucu Chadragupta) yang menjadikan Arthashastra sebagai buku pegangan pada kerajaan Maurya begitu populer dan memengaruhi banyak orang. Bahkan konsep seperti *ahimsa* berhubungan sangat erat dengan ide-ide Asoka. Gejala ini adalah tradisi panjang politik Asoka mulai dari non-kekerasan dan toleransi dari semua keyakinan politik dan agama, dirawat terus tak terputus selama berabad-abad dan akhirnya memuncak

⁷⁸ Alton L. Becker and Aram A. "The Imagination of Reality: Essay in Southeast Asian Coherence System". *Papers Presented at a Conference Held at Coherence System*, Yengoyan. 1979

⁷⁹ Baca tentang hal ini dalam I Gede Sura. 1985. "Kepemimpinan Yang Ideal dalam Sastra Jawa Kuno dan Pengaruhnya dalam Masyarakat Bali". *Laporan Pertemuan Ilmiah Kebudayaan Bali*, 26-29 Desember 1985; I Made Suastika. "Konsepsi Kepemimpinan Hindu di Bali: Telaah Teks Bahasa Jawa Kuna serta Penerapan Zaman Gelgel." *Historiografi. Makalah Seminar Sejarah Nasional 4*. Yogyakarta, 16-19 Desember 1985.

⁸⁰ Romila Thapar. 1961 dalam *Ashoka and the decline of the Mauryas*. Oxford: OxfordUniversityPress, hlm. 214

dalam filsafat politik Mahatma Gandhi. Ashoka pada masa India kuno, juga diceritakan telah belajar banyak dari kitab Arthashastra terutama bagaimana strateginya memperluas wilayah kekuasaan, meningkatkan komoditi, melindungi kerajaan dari musuh sekaligus mengembangkan strategi bersaing antarkerajaan.

Sekali lagi, sebagai langkah awal dari analisis dalam buku ini, beberapa konsep filsafat politik dan kekuasaan Kautilya Arthashastra yang masih bagus untuk dirawat, antara lain *pertama*, pemimpin itu juga sekaligus pemikir. Konsep ini mengingatkan kita pada apa yang dikatakan Plato dalam *The Republic* sebagai *The Philosopher King*,⁸¹ yakni raja juga sekaligus pemikir yang bijak. Artinya, kepemimpinan dan kapasitas melekat menjadi satu di dalamnya. Bandingkan kini di Indonesia begitu mudah orang menjadi pemimpin, misalnya hanya bermodal populer sebagai artis atau dapat meraih kekuasaan dan jabatan hanya semata-mata karena memiliki pengikut yang banyak, status sosial yang dibawa dari lahir dan harta berlimpah. *Kedua*, keteraturan negara akan baik kalau disokong oleh nilai-nilai bersama di mana moralitas individu menjadi panglima. Bandingkan misalnya, kalau Indonesia sebagai negara bangsa harus takluk dan lembek kepada para teroris dan kelompok-kelompok intoleran melalui gerakan anarkhis yang bertujuan mengganti ideologi bersama. Kautilya, dan juga Machiavelli, menghendaki negara tidak bisa membiarkan cara-cara seperti itu. *Ketiga*, pemimpin itu harus dipersiapkan secara matang. Oleh Kautilya disebut *swamin* yang berhasil dilakukannya pada diri Chandragupta. Bagaimana dengan sekarang?

Masih berkaitan dengan poin pertama, tidak banyak orang yang ingin menjadi pemimpin atau penguasa di Indonesia harus repot mengikuti proses pematangan diri seperti digagas Kautilya.

⁸¹ Lihat selengkapnya Francis Macdonald Cornford. *The Republic of Plato* (translated with Introduction and Notes). Oxford at The Clarendon Press.

Edukasi, terutama politik belum banyak ada. Mereka hanya mengandalkan konsultan politik yang saat ini sedang menjamur, ditambah hanya bersandar pada lembaga-lembaga survei untuk mengetahui elektabilitasnya di masyarakat, bukan karena kapabilitas yang dimilikinya. Peran *purohito* pada masa kerajaan kini sudah tergantikan ahli atau konsultan politik. Meski perubahan seperti ini tidak bisa dihentikan, tetapi peran *purohito* (atau konsultan politik kini) mestinya tidak hanya menasehati raja atau pemimpin tentang ilmu duniawi tetapi juga rohani. Karena bagaimanapun, di Indonesia, terutama Bali, dua dunia ini tidak bisa berjalan sendirian dan saling menegasi. Raja dan *purohito* atau pendeta di masa lalu adalah dua sosok yang bisa saling melengkapi. I Gusti Agung Oka⁸² menyatakan dengan “*wiku tan pa natha ya hilang, tan pa wiku ratu ya cirmna*” (pendeta bila tanpa didampingi atau dilindungi raja tiada berarti, demikian pula seorang raja tanpa dibantu oleh pendeta akan hancur). Sementara itu bagaimana hubungan yang harus dibangun seorang raja, S. Budhisantoso⁸³ memaparkan agar raja dengan rakyat dan dengan pendeta harus selalu dalam keadaan harmonis [*]

⁸² I Gusti Agung Oka, *Op.Cit.*, hlm. 7

⁸³ S. Budhisantoso (*at al*), *Op.Cit.*, hlm. 112-116

CATATAN PENUTUP

Bagai menyelam di tengah samudera pengetahuan yang luas. Analogi ini juga belum telat benar untuk menggambarkan upaya menyelami sejarah pemikiran politik Hindu. Meski demikian, ajaran-ajaran serta dalil yang membahas mengenai sistem politik, filsafat politik kenegaraan, kepemimpinan, sistem tata negara, etika politik maupun pemikiran-pemikiran politik Hindu masih dapat dilacak keberadaannya dari puluhan ribu tahun yang lalu, dimulai dari kitab Weda Sruti maupun Weda Smrti. Salah satu kitab yang dianggap sangat dekat dengan Weda yang membahas secara detail mengenai ilmu politik dan pemerintahan adalah Arthashastra.

Kitab Arthashastra mungkin tidak dapat dinyatakan tunggal sebagai kitab politik semata, tetapi juga ilmu tentang administrasi pemerintahan, mengatur dan mengelola negara, pemberdayaan aparatur (agen), mendayagunakan sumber-sumber alam untuk kemakmuran masyarakat. Namun, satu hal yang agak sama adalah semua daya upaya ini, sesuai konteksnya, diarahkan sebagai pedoman bagi pemimpin/penguasa negara. Ketika hal ini eksplisit dinyatakan, maka ia menjadi ideologi politik yang harus diperjuangkan, bahkan dengan cara-cara yang tidak lazim sekalipun. Pada sisi yang lain, jika menyelami sosok Kautilya, ia terlihat menjadi glorifikasi

dari perpaduan banyak karakter. Yang paling kentara adalah ketika ia tampil dengan wajah brahmana yang amat sangat religius dengan kemampuan dan pengetahuan agama yang dimilikinya. Pada saat yang bersamaan, ia menjadi sosok pemberani, teguh memegang kebenaran yang diyakininya, pemimpin dalam menjaga keamanan negara, bahkan dilakukannya di medan perang.

Pelajaran penting yang dapat diambil dari Kautilya Arthashastra adalah tentang ajarannya yang mengisyaratkan bahwa pemimpin, termasuk politikus dalam hal ini, wajib mengutamakan tiga dasar utama dalam *Catur Purusartha*, yaitu *dharma*, *artha*, dan *kama* untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, raja/pemimpin/politikus harus mengusahakan ketiganyasebagai sesuatu yang konkret dalam hidup dengan tujuan akhir, yaitu *moksa*. Berikut *lesson learn* dari saripati gagasan Kautilya.

Pertama, Dharma yang jika diturunkan ke tataran sosial dapat diartikan sebagai (a) *guna*, yaitu *susila* atau seperangkat aturan tingkah laku yang ditujukan bagi masyarakat dan sekaligus menjadi *niti*, yakni kemampuan politik dan seni memimpin bagi raja dan perangkat pemerintah di bawah raja. Dalam konteks *niti* ini, raja disarankan untuk menerapkan delapan kepemimpinan (*Astabrata*). (b) mengusahakan *widya*, terutama *apara widya*, yaitu “pengetahuan duniawi” bagi rakyatnya agar dapat melaksanakan *karma* atau *swadharma*. Melalui *widya* ini, raja dan rakyat dapat bekerja secara profesional demi untuk kesejahteraan duniawi. (c) *rta*, yaitu hukum untuk menegakkan keadilan. *Kedua, Artha* yang dapat diartikan sebagai kekuatan atau modal sosial di samping kekayaan materiil dalam arti yang sebenarnya. Arti ini barangkali dapat diperluas sesuai dengan kepentingan kemakmuran dan keamanan negara dan rakyat. Dan *ketiga, Kama* dalam konteks sosial dapat diartikan sebagai pelestarian

dan pengembangan seni budaya. Selain juga berarti keinginan atau motivasi.

Selanjutnya, Kautilya adalah tokoh yang sanggup menurunkan, kalau bukan membumikan ajaran suci dalam Arthasastra menjadi sesuatu yang *practical*, nyata. Jadi, boleh dikatakan bahwa Arthasastra menjadi semacam kompedium tentang bagaimana seorang pemimpin atau penguasa mengelola sebuah negara secara lengkap, utuh dan detail. Hal ini karena mengingat isi dan cakupan Arthasastra sangat luas. Selain yang sudah dijelaskan, Arthasastra juga dianggap sebagai kitab tentang pengobatan dan ilmu magi. Sebagai sosok yang dianggap keras dan kejam, Kautilya bergeming dari segala kritik atau ketidakberanian banyak orang untuk membaca Arthasastra, terutama bagaimana gagasannya dalam mempertahankan keutuhan negara dan memberikan keadilan bagi rakyatnya. Ia menjadi begitu *satya* karena tempaan jaman yang berliku.

Terakhir, inspirasi yang dapat kita ambil maknanya, selain yang sudah banyak dibicarakan di bagian atas adalah bagaimana ia diakhir buku Arthasastra menyatakan: "*Sumber kehidupan umat manusia adalah artha (kesejahteraan), dengan kata lain adalah Bumi dengan segala isinya yang didiami manusia. Ilmu yang mencakup cara untuk mencapai dan melindungi Bumi adalah Arthasastra, Ilmu Politik!*" [*]

DAFTAR PUSTAKA

- Adia Wiratmadja, G.K. 1975. *Leadership: Kepemimpinan Hindu*. Magelang: s.n.
- Adia Wiratmadja, G.K. 1995. *Kepemimpinan Hindu*. Denpasar: Yayasan Dharma Narada.
- Agastya, IBG. "Cerita Tantri sebagai Nitisastra dan Subhasita". *Makalah Temu Sastra Purnama Jagatnatha*, tanggal 14 April 2014.
- Anderson, Benedict R.O.G. 1972. "The Idea of Power in Javanese Culture" in Holt Claire (ed). *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Anderson, Benedict. 1991. *Imagines Communities: Reflection The Origins and Spread Nationalism*. London: Verso.
- Arendt, Hannah. 1968. *Between Past and Future*. New York: Penguin Books.
- Ariasna, Ketut Gede. 2000. *Kepemimpinan Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Ariasna, Tut De. 2011. *Kepemimpinan Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Artadi, I Ketut. 1993. *Manusia Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Astana, Made dan C.S. Anomdiputro. 2003. *Arthasastra*. Terjemahan dari buku *Kautilya's Arthasastra* oleh R. Shamasastri dan *The Kautilya Arthasastra* oleh R.P. Kangle. Surabaya: Paramita.

- Avalokitesvari, Ni Nyoman Ayu Nikki. "Canakya Arthasastra: Warisan Politik Kenegaraan Hindu" dalam I Nyoman Yoga Segara (ed). 2019. *Politik Hindu. Sejarah, Moral dan Proyeksinya*. Denpasar: IHDN Press, hlm. 19-31.
- Bateson, Gregory. 1972. *Steps to an Ecology of Mind, Balinese Ethos*. Collected Essay in Anthropology, Psychiatry and Epistemology. University of Chicago Press.
- Bary, William Theodore de. 2004. *Nobility and Civility: Asian Ideals of Leadership and The Common Good*. Cambridge, Mas: Harvard University Press.
- Becker, Alton L. and Aram A. "The Imagination of Reality: Essay in Southeast Asian Coherence System". *Papers Presented at a Conference Held at Coherence System*, Yengoyan. 1979.
- Blau, Peter M. dan Marshall W. Meyer. 2000. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern* (terjemahan). Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Budhisantoso, S. (at al), 1990. *Niti Raja Sasana*. Depdikbud.
- Budiardjo, Miriam. 1983. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Burd, L.A., (ed). 1891. *Il Principe*. Oxford University Press.
- Brown, Alan. 1986. *Modern Political Philosophy*. Middlesex: Penguin Books.
- Cahn, Steven M. 2005. *Political Philosophy, The Essential Texts*. New York: Oxford University Press.
- Chaturvedi, B.K. *Chanakya. An Original Novel*. New Delhi: Diamond Pocket Books Pvt. Ltd.
- Cornford, Francis Macdonald. *The Republic of Plato* (translated with Introduction and Notes). Oxford at The Clarendon Press.
- Curtis, Michael. 1961. *The Great Political Theories*. New York, Avpn Book Division.
- Daniel, Donno. 1985. *The Prince with Selection from Discourses, Niccolo Machiavelli*. New York: Bantam Books.

- Dharmayasa. 1995. *Chanakya Niti Sastra*. Jakarta: Yayasan Dharma Naradha.
- Darmayasa (penyadur). 1995. *Perselisihan di Antara Sahabat. Buku Pertama*. Denpasar: Manikgeni.
- Darmayasa (penyadur). 1996. *Mendapatkan Teman. Buku Kedua*. Denpasar: Manikgeni.
- Darmayasa (penyadur). 1996. *Gagak dan Burun Hantu. Buku Ketiga*. Denpasar: Manikgeni.
- Darmayasa (penyadur). 1998. *Kehilangan Keberuntungan. Buku Keempat*. Denpasar: Manikgeni.
- Darmayasa (penyadur). 1998. *Perbuatan Tanpa Pertimbangan Baik. Buku Kelima*. Denpasar: Manikgeni.
- Davis, Steven. 1976. *Philosophy and Language*. TheBobbs Merril Company.
- Dwipayana, AAGN. Ari. "Antara Leviathan dan Hukum Ikan". *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*. Vol. 3 No 2 November 1999: 188-205.
- Ebenstein, William. 1959. *Modern Political Thought: The Great Issues*. New York: Rinehart & Company, Inc.
- Farchan, Yusak dan Firdaus Syam. "Tafsir Kekuasaan Menurut Gajah Mada". *Jurnal Politik*. Vol. 11 No. 01. 2015: 1589-1599.
- Gellner, Ernest. 1983. *Nations and Nationalism. New Perspectives on the Past*. Oxford: Basil Blackwell.
- Geertz, Clifford. 1969. *The Old Societies and New States*. Chicago: Aldine Publ.
- Godin, Robert E. and Philip Pettit (eds.). 1997. *Contemporary Political Philosophy: An Anthology*. Oxford: Blackwell Publisher Ltd.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selection from the Prison Notebooks*. Q. Hoare, Q and G Nowel Smith, eds. New York: International Publishers.

- Hobbes, Thomas. 1962. *Leviathan*. M. Oakshott (ed). New York: Collier Books.
- Jehuru, Limen Yohanes. "Meneropong Krisis Negara Indonesia Dengan Teleskop Negara Ideal Plato". *Biro Penelitian Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Fajar Timur* Hal: 73-97. Vol. 7 (2011) afl. 2 (Apr).
- King, J. Charles and James A. Mc Gilvray. 1973. *Political and Social Philosophy: Traditional and Contemporary Readings*. New York: Mc Graw-Hill.
- Krishnarao, M.V. 1979. *Studies in Kautilya*. Munshiram Manoharlal Publisher Pvt. Ltd.
- Kymlicka, Will. 1990. *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Lee, Blaine. 2002. *Prinsip Kekuasaan*. Terjemahan Arvin Saputra. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Machiavelli, Niccolo. 1891 (2002). *Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik*. Alih Bahasa C. Woekirsari dari judul asli *Il Principe*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Machiavelli, Niccolo. 2001. *The Art of War*, translated from *The Art of War*. Da Capo Press, Cambridge, USA.
- Mantra, IB. 1996. *Landasan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.
- Maswinara, I Wayan. 2000. *Hita Upadesa* (alih Bahasa). Surabaya: Paramita.
- McBride William L. 1994. *Social and Political Philosophy*. New York: Paragon House
- Mookerji, R.K. 1943. *Chandragupta Maurya and His Times*. Madras.
- Murray, A.R.M. 1953. *An Introduction to Political Philosophy*. London: Cohen and West.
- Nambu, Abdulkadir B. dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa. "Memahami Tentang Beberapa Konsep

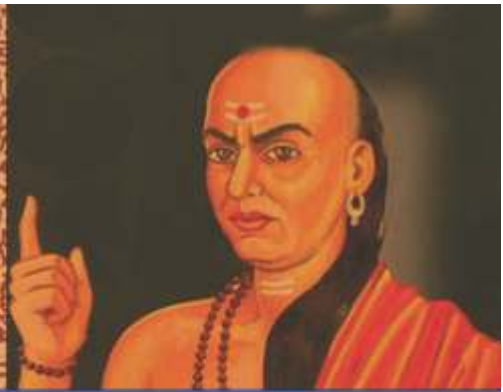
- Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)". *Jurnal Mimbar*. Volume XXI No. 2 April-Juni 2005: 262-285.
- Noer, Delia. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Oka, I Gusti Agung. 1970. *Niti Sastra, Rajaniti, Pengetahuan (untuk Leadership yang Berorientasi) Agama Hindu*.
- Philip, Pettit. "The Contribution of Analytical Philosophy", in *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, Robert E. Goodin and Philip Pettit (eds). 2004.
- Radendra, IB. S. 2009. *Ekonomi dan Politik dalam Arthasastra*. Denpasar: Vidya Dharma.
- Rangarajan, L.N. (ed). 1992. *The Arthasastra*. Delhi: Penguin Book.
- Ricoeur, Paul. 1991. *Hermeneutics the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation*, Ed. and Trans. John B. Cambridge: Cambridge University Press.
- Robson, Stuart (Monash University) "Memperkenalkan Nagarakrtagama sebagai Karya Sastra Agung". *Makalah Seminar* pada 26 Mei 2008, hlm. 1-17.
- Rudyansjah, Tony. 2009. *Sejarah, Kekuasaan dan Tindakan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. 2006. *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana.
- Segara, I Nyoman Yoga. 2017. *Ahimsa dalam Teropong Filsafat Antropologi*. Denpasar: WartamPlus.
- Soekmono. 1981. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Strathern, Paul. 1997. *Machiavelli in 90 Minutes*. Jakarta: Erlangga.
- Suastika, I Made. "Konsepsi Kepemimpinan Hindu di Bali: Telaah Teks Bahasa Jawa Kuna serta Penerapan Zaman

- Gelgel." *Historiografi. Makalah Seminar Sejarah Nasional 4*. Yogyakarta, 16-19 Desember 1985.
- Subagiasta, I Ketut. 2010. *Kepemimpinan Hindu dalam Lontar Wрати Sasana*. Surabaya: Paramita.
- Sudewa, A. 1991. *Serat Panitisastra*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sudharta, Tjok Rai. 2009. *Kepemimpinan Hindu Asta Bratha dan Nasehat Sri Rama Lainnya*. Surabaya: Paramita.
- Suhardana, K.M. 2008. *Niti Sastra. Ilmu Kepemimpinan atau Management Berdasarkan Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Suhardana, K.M. 2008. *Nagarakretagama & Pararaton. Sejarah Pembangunan Majapahit*. Surabaya: Paramita.
- Sularto, St. 2003. *Niccolo Machiavelli: Penguasa Arsitek Masyarakat*. Jakarta: Kompas.
- Sura, I Gede. 1985. "Kepemimpinan Yang Ideal dalam Sastra Jawa Kuno dan Pengaruhnya dalam Masyarakat Bali". *Laporan Pertemuan Ilmiah Kebudayaan Bali*, 26-29 Desember 1985.
- Sura, I Gde. 2003. *Studies in Kautilya*. (terjm). Denpasar: UNHI.
- Surpi, Ni Kadek. "Moral Politik dan Merosotnya Kualitas Peradaban Manusia" dalam I Nyoman Yoga Segara (ed), 2019. *Politik Hindu. Sejarah, Moral dan Proyeksinya*. Denpasar: IHDN Press, hlm. 58-73.
- Sutrisno, Nanang. "Sejarah Politik Hindu" dalam I Nyoman Yoga Segara (ed). 2019. *Politik Hindu. Sejarah, Moral dan Proyeksinya*. Denpasar: IHDN Press, hlm. 1-18.
- Suwantana, I Gede. "Politik Hindu, Antara Natural dan Moral" dalam I Nyoman Yoga Segara (ed). 2019. *Politik Hindu. Sejarah, Moral dan Proyeksinya*. Denpasar: IHDN Press, hlm. 101-114.
- Swantoro, P. 2007. *Masa Lalu Selalu Aktual. Cet. 1*. Jakarta: Buku Kompas, Rumah Budaya TeMBi.

- Thapar, Romila. 1961 dalam *Ashoka and the decline of the Mauryas*. Oxford: OxfordUniversityPress.
- Wolin, Sheldon S.. 2004. *Politics and Vision*. Expanded Edition. New Jersey: Princeton University Press.
- Wolf, Jonathan. 2006. *An Introduction to Political Philosophy*. Revised Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Wurianto, Arif Budi. "Gung Binatara: Kekuasaan dan Moralitas Jawa. Kasus Religiusitas Sultan Agung di Mataram". *Jurnal Ilmiah Bestari*. No. 32. Th. XIV. 2001: 46-52.

TENTANG PENULIS

I Nyoman Yoga Segara lahir di Serangan, Denpasar. Menyelesaikan S1 Sastra dan Filsafat Agama di Universitas Hindu Indonesia, S2 Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia, dan S3 Antropologi di Universitas Indonesia. Selama di Jakarta dari 1998-2015, sempat menjadi pegawai di Ditjen Bimas Hindu, Widyaisawara serta Peneliti di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, dan dosen di Binus University, Universitas Atmajaya, Universitas Mercu Buana, dan STAH DN Jakarta. Sejak 2016 menjadi dosen di IHDN Denpasar dalam bidang Antropologi Sosial dan Budaya. Penulis dapat dihubungi melalui yogasegara@yahoo.com [*]



Kautilya Arthasastra | N. Yoga Segara *Jejak Pemikiran Politik Hindu*

Berpolitik praktis, apalagi hanya sekadar membicarakannya, tidaklah tabu. Tidak juga harus dianggap "kiri" dan dihindari. Hindu memberikan ruang untuk mempraktikkan politik dalam kehidupan. Apa kontribusi kita terhadap negara adalah pertanyaan politik yang juga harus dijawab dengan tindakan-tindakan politik. Karena itu, konsep dharmaning agama dan dharmaning negara adalah juga konsep politik yang dimaksud. Namun untuk dapat melakoni politik secara benar harus memenuhi sejumlah prasyarat, tujuan yang ingin diraih dan strategi menjalankannya. Memahami secara holistik ajaran Catur Purusartha adalah salah satu prasyarat itu. Secara lebih lengkap, Kautilya menerangkan semua ini dalam Arthasastra, salah satu kitab yang sangat dekat dengan Weda. Dengan pengetahuan, kesucian intuisi, pengalaman hidup dan keterampilannya, Kautilya adalah sosok yang kontroversial sekaligus jenius. Arthasastra yang disusunnya dianggap manual terpenting dalam ilmu politik, pemerintahan dan administrasi, ketatanegaraan, hingga pengelolaan ekonomi dan sumber daya lainnya. Kitab ini multi-perspektif dan mengabstraksi berbagai gagasan tentang politik dan kekuasaan. Arthasastra mengandung pesan politik yang beralaskan moral kepada pemimpin dan pengelola negara. Dengan posisinya ini, Arthasastra sama pentingnya dengan *Il Principe* karya Niccolo Machiavelli yang diimani para ilmuwan politik dan para politisi. Namun, Kautilya "melampui" lanskap pemikiran politik dari tokoh setelahnya, bukan saja karena ia seorang yang sangat ahli politik dan strategi perang, tetapi juga brahmana agung [*)



Penerbit ESBE
esbeutama@yahoo.com
ISBN 978-602-6740-47-2